

Republik Indonesia

**Studi Awal tentang
Kebijakan Pengembangan Daerah
di Indonesia**

Laporan Akhir

September 2015

Japan International Cooperation Agency (JICA)

System Science Consultants Inc.
KRI International Corp.

1R
JR
15-043

Studi Awal tentang Kebijakan Pengembangan Daerah di Indonesia

Laporan Akhir

Daftar Isi

Daftar Singkatan

Foto Studi Lapangan

BAB 1. Garis Besar Studi	1
1-1 Latar Belakang dan Tujuan.....	1
1-2 Metode Studi.....	2
1-3 Proses Studi.....	3
1-4 Inti dan Maksud Laporan.....	3
BAB 2. Arahan Kebijakan dan Program Pengembangan Daerah	5
2-1 RPJMN Baru dan Program Pengembangan Daerah.....	5
2-2 Peningkatan Konektivitas dan Promosi Ekonomi dan Industri.....	12
2-3 Undang-undang Desa dan Program Dana Desa.....	21
BAB 3. Tinjauan Bantuan JICA di Sektor Pengembangan Daerah	27
3-1 Pengembangan Wilayah Sulawesi Selatan dan Pengembangan Kawasan Timur Laut.....	27
3-2 Pembangunan Desa dan Pelatihan Fasilitator.....	33
3-3 Keadaan Saat Ini dan Tantangan Fasilitator yang dilatih oleh JICA.....	38
3-4 Pembangunan Infrastruktur Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan.....	40
BAB 4. Tinjauan Bantuan Negara-negara Donor dan Organisasi Internasional di Sektor Pengembangan Daerah	45
4-1 Garis Besar Program Bantuan masing-masing Lembaga.....	45
4-2 Karakteristik Pelaksanaan Program di Kawasan Timur Laut.....	54
4-3 Contoh dari Negara Lain dalam Mendukung Sektor Pengembangan Daerah.....	56
BAB 5. Arahan Bantuan JICA untuk Sektor Pengembangan Daerah	60
5-1 Pemikiran Dasar dalam Pertimbangan Arahan Bantuan.....	60
5-2 Pendapat dan Nasehat dari Para Intelektual dan Pemangku Kepentingan.....	62
5-3 Program Bantuan yang Mungkin.....	64
5-4 Poin-poin untuk dicatat dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Program.....	72

Lampiran

- I. Jadwal Studi Lapangan
- II. Daftar Narasumber yang diwawancarai
- III. Daftar Bahan Informasi yang terkumpul

Daftar Singkatan

Singkatan	Nama Lengkap/ Nama Panjang
ADB	Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)
ADD	Alokasi Dana Desa
BaKTI	Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BATAN	Badan Tenaga Nuklir Nasional
BPPT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
CDP	Capacity Development Project (Proyek JICA)
CEP	Community Empowerment Program (Proyek JICA)
COMMIT	Community Initiatives for Transformation
DAK	Dana Alokasi Khusus
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade (eks AusAID)
DFATD	Department of Foreign Affairs and Trade and Development (eks CIDA)
GIZ	Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (<i>German Agency for International Cooperation</i>)
JICA	Japan International Cooperation Agency
KSK	Kawasan Strategis Kabupaten
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LSP FPM	Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
MP3KI	Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia
Musrenbang	Musyawaharah Rencana Pembangunan
PT. Pelindo	PT. Pelabuhan Indonesia
PKPM	Pengembangan Kemitraan untuk Pemberdayaan Masyarakat (Proyek JICA)
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PMD	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PRIMA-K	Project for Improvement of District Health Management Capacity in South Sulawesi Province
PROSPEK	Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung
RESPEK	Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Proyek di Papua)
RISE	Regional Infrastructure for Social and Economic Development (Proyek JICA)
RISTEK-DIKTI	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
RKPDes	Rencana Kerja Pembangunan Desa
RPJMDes	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SKKNI	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
UNHAS	Universitas Hasanuddin
USAID	United States Agency for International Development

Foto Studi Lapangan Tahap Pertama



Rapat Bersama antara BAPPENAS, Cipta Karya, Tim Konsultan RISE-II dan Misi Studi JICA (di Ruang Rapat BAPPENAS)



Gedung BAPPEDA Propinsi Sulawesi Selatan (di Kota Makassar, Sulawesi Selatan)



Musrenbang untuk Periode Tahun 2016 di Propinsi Sulawesi Selatan (tanggal 30 Maret 2015 di hotel di kota Makassar)



Wawancara dengan Biro Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan (di Ruang Kantor Sektetaris Daerah Kab. Bantaeng)



Kunjungan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan (di Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan)



Pusat Inkubasi yang dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (Lokasi: Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor)

Foto Studi Lapangan Tahap Pertama (lanjutan)



Visi & Misi BUMDes yang dipasang di Kantor Desa (Desa Bonto Tiro, Kec. Sinoa, Kab. Bantaeng)



Wawancara dengan Ketua COMMIT (di Kantor COMMIT di Kota Makassar)



Produsen cokelat yang telah dibina dalam Proyek Promosi Industri Lokal di Propinsi Sulawesi Selatan (di Pabrik Perumahan di Kota Makassar)



Tempat Pengeringan Rumput Laut yang dibangun dengan bantuan dari Proyek RISE-II (di Kecamatan Penang, Kabupaten Jeneponto)



Fasilitas Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang dibangun dengan dana pinjamandari JICA (di Kota Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan)



Pejabat DFAT menjelaskan tentang Kerjasama dengan BaKTI (di Kantor BaKTI di Kota Makassar)

Foto Studi Lapangan Tahap Kedua



Rapat pertama para pemangku kepentingan
(di ruang rapat sebuah hotel di Jakarta)



Wawancara dengan Direktorat Pulau Pulau Kecil dan Pesisir, KKP
(di ruang rapat KKP)



Wawancara dengan Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa
(di kantor Sekretaris Jenderal)



Wawancara dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
(di ruang rapat Kementerian Perhubungan)



Laporan Kemajuan ke BAPPEDA SULSEL
(di kantor Kepala BAPPEDA Sulsel)



Wawancara dengan BKPM, Sulsel
(di ruang rapat BKPM, Makassar)

Foto Studi Lapangan Tahap Kedua (lanjutan)



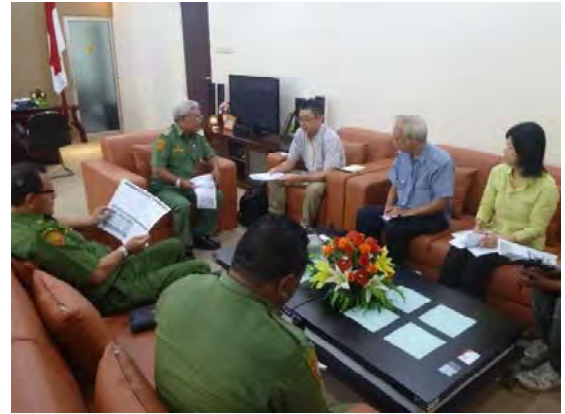
RPJMDes (2010-2015), Desa Aeng Batu-batu
(di rumah kepala desa, Desa Aeng Batu-batu, Kec.
Galesong Utara, Kab. Takalar)



Wawancara dengan kepala desa Palajau
(di kantor desa Palajau Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto)



Wawancara dengan Direktur BAPPEDA Prop. NTT
(di kantor BAPPEDA Prop. NTT)



Wawancara dengan wakil walikota Kota Kupang
(di kantor walikota, Kota Kupang)



Lokasi Irigasi Oesao-II
(Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang)



Monumen Bendungan Tilong yang didanai dengan dana
pinjaman dari Jepang, selesai bulan Mei 2002
(Desa Bokong, Kabupaten Kupang)

BAB 1. Garis Besar Studi

1-1 Latar Belakang dan Tujuan

(1) Latar Belakang Studi

Pemerintah pusat Republik Indonesia, dengan dimulainya penerapan Otonomi Daerah pada tahun 1990-an yang diikuti dengan Undang-undang Otonomi Daerah, telah mengupayakan penguatan/ pemberdayaan pemerintah daerah melalui berbagai cara seperti pengalokasian dana kepada pemerintah daerah, penyerahan kewenangan kantor wilayah dan sebagainya. Meskipun demikian, untuk perencanaan proyek yang efektif, pemanfaatan anggaran yang efisien, dan juga pemberian pelayanan berkualitas kepada masyarakat, kapasitas pemerintah daerah secara umum tetap perlu ditingkatkan. Sementara itu, masih juga terdapat kesenjangan ekonomi antara Jawa-Bali (pusat ekonomi di Indonesia) dan wilayah lainnya. Maka, pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan untuk memperkecilkan kesenjangan ekonomi tersebut, dengan melaksanakan berbagai program strategis termasuk di antaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (selanjutnya disingkat PNPM) yang dilaksanakan dari tahun 2006 hingga tahun 2014.

Dalam kondisi seperti tersebut, sejak akhir tahun 1990-an, *Japan International Cooperation Agency* (selanjutnya disingkat JICA) telah melaksanakan berbagai program/ proyek kerjasama. Program/ proyek tersebut adalah dalam rangka berkontribusi dalam mengembangkan desentralisasi dan meningkatkan daerah melalui perumusan dan pelaksanaan Program Pembangunan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan Program Pengembangan Kawasan Timur Laut, dalam rangka memperkecilkan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Proyek-proyek yang masuk ke dalam kedua program di antaranya adalah proyek kerjasama teknis "*Capacity Development Project in Sulawesi*" (selanjutnya disebut CDP) dan proyek pinjamdana "*Regional Infrastructure for Social and Economic Development*" (selanjutnya disebut RISE). Kedua proyek tersebut menerapkan konsep pengembangan dengan pendekatan partisipatif baik pada tingkat masyarakat maupun tingkat pemerintah daerah sedemikian rupa sehingga pengembangan daerah lancar dan mendapat dukungan secara luas.

Pada bulan Oktober 2014, pemerintah dengan Presiden baru telah melahirkan, kemudian RPJMN [2015-2019] ditetapkan pada awal tahun 2015, sedangkan PNPM secara resmi dihentikan. Dengan latar belakang pemahaman ini, JICA melakukan tinjauan, baik terhadap kebijakan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka penanggulangan kesenjangan antar wilayah maupun terhadap hasil dari program/ proyek JICA yang sudah terlaksana. Tujuannya adalah untuk dijadikan bahan pertimbangan ke depan terhadap arah dukungan di sektor pengembangan daerah di Indonesia sesuai dengan kebijakan pemerintah setelah tahun 2015.

(2) Tujuan Studi

Studi ini bertujuan untuk mendapatkan implikasi, yang akan menjadibahkan dasar di dalam perumusan bantuan kerjasama JICA kedepan, untuk dijadikan pertimbangan lebih lanjut di antara pemerintah Indonesia dan pihak Jepang. Implikasi tersebut diperoleh melalui pengumpulan informasi dan data mengenai i) kebijakan/ program pengembangan daerah di Indonesia (pasca PNPM), ii) kebijakan/ program bantuan yang dilaksanakan/ disiapkan oleh negara-negara donor atau organisasi internasional, dan iii) hasil dan permasalahan/ tantangan dari program JICA.

Bersamaan dengan pengumpulan informasi dan data, baik dari instansi pemerintah terkait (BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan) maupun lembaga donor (Bank Dunia, ADB, Amerika Serikat, Australia, Jerman dan Kanada, dll), juga dilakukan survei dengan kuesioner terhadap penerima manfaat/ pejabat pemerintah daerah di wilayah percontohan dari Kawasan Timur Laut, yaitu Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Papua.

1-2 Metode Studi

Dalam melaksanakan studi ini, sebuah kerangka terkait pencapaian tujuan pengembangan daerah di Indonesia diasumsikan sebagaimana ditunjukkan di Gambar 1-1, dengan pemahaman bahwa organisasi internasional dan negara-negara donor termasuk JICA memberikan dukungan/ intervensi sesuai dengan kebijakan/ program pengembangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, sehingga tujuan pengembangan daerah yang tercantum di RPJMN dapat terwujud.



Gambar 1-1 Kerangkamengenai Pencapaian Tujuan Pengembangan Daerah

Berdasarkan kerangka tersebut di atas, Studi ini dilaksanakan dalam empat komponen, yaitu:

- I. Pengumpulan informasi dan data mengenai arahan kebijakan dan program pengembangan daerah di Indonesia,
- II. Tinjauan bantuan JICA di sektor pengembangan daerah,
- III. Tinjauan bantuan negara-negara donor dan organisasi internasional di sektor pengembangan daerah, dan
- IV. Pertimbangan arahan bantuan JICA kedepan untuk sektor pengembangan daerah.

Seperti diperlihatkan di dalam gambar di bawah ini, berdasarkan hasil dari komponen I, II dan III, arahan bantuan kedepan pada komponen IV akan dipertimbangkan.



Gambar 1-2 Empat Komponen Studi

Dalam komponen I, tinjauan dilakukan terhadap kebijakan/ program pemerintah Indonesia yang telah dilaksanakan terkait pengembangan daerah termasuk hasil dan permasalahan/ tantangan dari PNPM, sedangkan pengumpulan informasi/ data mengenai RPJMN baru yang ditetapkan di bawah pemerintahan baru serta kebijakan/ program terkait dengan penanggulangan kemiskinan/ pembangunan daerah secara partisipatif dilakukan.

Dalam komponen II, program/ proyek bantuan yang telah dilaksanakan oleh JICA di bidang pengembangan daerah akan ditinjau, khusus berfokus pada hasil dan isu/ masalah saat ini berkaitan dengan pelatihan fasilitator (pendamping) untuk pengembangan daerah maupun program pembangunan infrastruktur demi penanggulangan kemiskinan. Kemudian, Program Pengembangan Wilayah Propinsi Sulsel dan Program Pengembangan Kawasan Timur Laut akan ditelaah kembali sehingga kemungkinan kelanjutan dari program semacamnya akan dipertimbangkan.

Dalam komponen III, bersamaan dengan pengumpulan informasi/ data dari negara donor/ organisasi internasional mengenai hasil dari program dukungan terlaksana selama ini di bidang pengembangan daerah dan prospek ke depan, mencari *lesson-learned* dari contoh di negara lain dalam memperkuat pemerintahan daerah (misalnya penerapan PBA (*performance-based allocation*) dalam alokasi dana atau pelatihan pegawai pemerintah daerah) sehingga dapat diterapkan/ diaplikasikan dalam dukungan sektor pengembangan daerah di Indonesia.

Dikomponen IV, akan dipertimbangkan arahan bantuan JICA ke depan dalam mendukung sektor pengembangan daerah berdasarkan hasil pertimbangan dari ketiga komponen I, II dan III di atas. Dalam proses pertimbangan, pertemuan penasehat di pihak Jepang dan pertemuan para pejabat instansi pemerintah bersangkutan di Indonesia juga akan diadakan.

1-3 Proses Studi

Studi ini dilaksanakan dalam periode Februari~September 2015, dengan 3 kali studi lapangan dan 4 kali tugas di dalam negeri. Halaman berikut menunjukkan jadwal keseluruhan studi ini.

1-4 Inti dan Maksud Laporan

Laporan ini merupakan hasil akhir, yang dibuat dengan mengacu pada hasil studi lapangan tahap pertama, yang dilaksanakan dari awal Maret 2015 hingga pertengahan April 2015 dan studi lapangan tahap kedua yang dilaksanakan dari akhir Mei 2015 hingga awal Juli 2015¹. Laporan akhir ini dibuat untuk tujuan memberikan informasi dan pandangan dasar untuk dipertimbangkan sebagai arahan dasar bantuan JICA ke depan.

Laporan ini disusun dalam rangka memahami arti pentingnya penentuan/ penetapan permasalahan utama untuk pertimbangan arahan bantuan JICA ke depan. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah bahwa dalam menyusun usulan awal program bantuan, saran dan pendapat yang diberikan para ahli di pihak Jepang dan para pemangku kepentingan di pihak Indonesia dipertimbangkan juga.

¹ Dilakukan studi kunjungan ke lembaga pemerintah pusat (Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian PU-Per, Kemenkeu, Kemenperin, dan LIPI), ke instansi Pemda (Propinsi Sulsel, Kab. Jeneponto, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng), Profesor UNHAS, Anggota Parlemen, Negara-negara Donor dan Organisasi Internasional, Organisasi Fasilitator (LSP-FPM, COMMIT). (Lihat lampiran I, II).

Item Kegiatan Studi	Tahun, Bulan								
	2015								
	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	
Kegiatan Umum (rapat, dsb)	★ Rapat JICA Jepang (1)	★ Pertemuan Awal di Indonesia Kegiatan di Indonesia (1)		★ Rapat JICA Pertemuan T.Ahli (1) Jepang (2)	★ Pertemuan Lapcran Kemajuan Indonesia (2)	★ Rapat JICA Pertemuan T.Ahli (2) Jepang (3)	★ Pertemuan Laporan Akhir Indo (3)	★ Rapat JICA Jepang (4)	
I. Arahan Kebijakan dan Program Pengembangan Daerah									
I-1. Tinjauan dan Prospek PNPM		[Green Box]		→	[Green Box]				
I-2. Kebijakan Pasca PNPM tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Daerah secara Partisipatif		[Green Box]		→	[Green Box]				
I-3. Kebijakan Pembinaan/ Pemanfaatan Fasilitator		[Green Box]		→	[Green Box]				
I. Tinjauan Bantuan JICA di Sektor Pengembangan Daerah									
II-1. Implementasi PNPM dan Pembinaan Fasilitator		[Blue Box]		→	[Blue Box]				
II-2. Tinjauan Program Pengembangan Daerah JICA		[Blue Box]		→	[Blue Box]				
II. Tinjauan Bantuan Negara-negara Donor dan Organisasi Internasional di Sektor Pengembangan Daerah									
III-1. Upaya Mitra Pembangunan/ Organisasi Internasional di Bidang Pengembangan Daerah Indonesia		[Red Box]		→	[Red Box]				
III-2. Pelajaran/ Rekomendasi diperoleh dari Upaya Negara Lain di Bidang Pengembangan Daerah		[Red Box]		→	[Red Box]				
III. Pertimbangan Arahan Bantuan JICA untuk Sektor Pengembangan Daerah									
IV-1. Kebijakan Bantuan Pengembangan Daerah Secara Keseluruhan				[Purple Box]	→	[Purple Box]	→	[Purple Box]	
IV-2. Pertimbangan/ Pengusulan Pendekatan Bantuan di Daerah Percorotan		[Purple Box]		→	[Purple Box]		→	[Purple Box]	
Laporan Studi				IC/R		IT/R		DF/R	F/R

Gambar1-3 Jadwal Keseluruhan Studi

BAB 2. Arahan Kebijakan dan Program Pengembangan Daerah

Dalam Bab ini, akan dipahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang baru diumumkan bulan Januari 2015 (RPJMN: 2015-2019) yang dirancang sebagai komitmen pemerintah baru presiden Jokowi yang mulai menjabat di bulan Oktober tahun 2014, dengan mencerminkan makna yang disebut NAWACITA (9 agenda prioritas)(2-1). Di antaranya adalah kebijakan/ program pokok mengenai pengembangan daerah yang difokuskan sesuai dengan tujuan Studi ini, supaya status saat ini yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya juga dilaporkan (2-2, 2-3). Sementara itu, mengingat berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada akhir tahun 2014 yang selama ini dilaksanakan di masa pemerintahan Presiden Yudhoyono dan peluncuran Program Dana Desa dari tahun 2015 atas prakarsa pemerintah Indonesia, maka informasi program tersebut serta praturan perundang-undangan akan di kumpulkan (2-4).

2-1 RPJMN Baru dan Program Pengembangan Daerah

(1) Kebijakan Utama Pemerintahan Presiden Baru

Pada tanggal 20 Oktober 2014, presiden Jokowi tampil sebagai presiden yang ke-7, dan pimpinan pemerintahan berganti pertama kali setelah sepuluh tahun. Dengan mencerminkan tindakan kebijakan pemerintahan presiden baru yang diluncurkan pada waktu kampanye pemilu presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN: 2015-2019) dirumuskan dan ditetapkan pada Januari 2015 sebagai komitmen pemerintah yang terdiri dari visi, misi, 9 agenda prioritas (yang disebut NAWA CITA) dan tiga bidang pilar yaitu Politik, Ekonomi, Budaya yang masing-masing tertuang dengan berbagai program aksi yang isinya dikembangkan dengan mempertimbangkan syarat-syarat seperti pengalokasian anggaran dan penetapan masa pelaksanaan.

Atas komitmen pemerintah baru yang berjudul “memiliki kedaulatan, kemerdekaan jalan menuju perubahan menjadi Indonesia yang berkepribadian”, visi dan misi dicantumkan seperti di bawah ini.

Visi dan Misi Komitmen Pemerintah Presiden Baru

Visi	Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi	<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.6. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sumber: Kebijakan Dasar Pemerintahan Jokowi/Indonesia (Dikutip dari materi JETRO-IDE, Desember 2014)

Di dalam 7 misi, kata “laut” muncul beberapa kali. Pada pidato pelantikan presidenpun disebutkan ungkapan “*kita telah cukup lama memungungi laut*”. Dengan menitik-beratkan pada hal itu, laut pada dasarnya merupakan kekuatan Indonesia yang bertujuan mengembangkan 3 bidang yaitu Politik, Ekonomi dan Budaya, dan oleh karenanya program aksi yang kongkrit telah disusun. Saat wawancara dalam kunjungan instansi pemerintah, yang dilakukan pada waktu studi lapangan, konsep Poros Maritim atau Tol Laut (=Pembangunan Kelautan) sudah sering terdengar. Konsep tersebut bertujuan meningkatkan sarana prasarana pelabuhan-pelabuhan baik di daerah maupun pada pulau perbatasan, dan membangun sistem pelayanan maritim secara *hub-and-spoke*, sehingga mendukung pengembangan sosial ekonomi di daerah. (deskripsi isi terkait di 2-2(1)). Selanjutnya akan dilihat agenda prioritas (NAWACITA) sebagai berikut:

Nawa Cita pada Komitmen Pemerintah Presiden Baru

Agenda Prioritas yang berhubungan dengan “Kedaulatan di Bidang Politik”

1. Untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah.

Agenda Prioritas yang berhubungan dengan “Kemandirian di Bidang Ekonomi”

4. Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Agenda Prioritas yang berhubungan dengan “Kepribadian di Bidang Budaya”.

7. Mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sumber : Sama seperti terdahulu

Sektor pengembangan daerah yang menjadi fokus studi ini, terutama dari segi penanggulangan kemiskinan atau pembangunan industri ekonomi di daerah, berkaitan langsung dengan Agenda Prioritas nomor 3 dan nomor 6². Mengenai Agenda Prioritas nomor 3, Undang-Undang Desa³ diberlakukan pada tahun 2014 di bawah pemerintahan presiden lama Yudhoyono dan dari tahun 2015 dikembangkan sistem dan peraturan terkait dengan pengalokasian dana (bantuan langsung) ke seluruh desa di Indonesia (Dana Desa). Menghadapi selesainya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada tahun 2014 yang dilaksanakan di bawah bantuan keuangan dari negara-negara donor termasuk Jepang dan Bank Dunia selama ini, pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk melanjutkan pelaksanaan program yang sama seperti PNPM di tingkat pedesaan (deskripsi isi terkait di 2-2(3))

Selain itu, berkaitan dengan agenda prioritas nomor 6, dalam rangka mempromosikan pengembangan industri ekonomi dan industri di seluruh negeri dengan sistem kolaborasi industri-pemerintah-akademisi konsep Science/ Techno Park telah disiapkan. Park-park ini bermaksud meningkatkan kualitas produk lokal, menggunakannya sebagai pusat peningkatan teknologi manufaktur/ pengolahan dari IKM agar daya saing industri lokal dapat ditingkatkan (deskripsi isi terkait 2-2(2)).

Dengan mengikuti alur agenda prioritas yang dicantumkan di atas, program aksi di masing-masing bidang didaftarkan. Program aksi yang tercantum di bawah ini adalah sebagai referensi.

² Dari wawancara dengan BAPPENAS, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

³ Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

Daftar Program Aksi menurut Ketiga Bidang sesuai Agenda Prioritas

Program Aksi untuk Mendirikan Kedaulatan Politik (12)

1. Memperkuat sistem pertahanan negara dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global.
2. Membangun wibawa politik luar negeri
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara.
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi.
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah
8. Memberdayakan desa.
9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
10. Memberdayakan perempuan dalam politik dan pembangunan.
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan.
12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Program Aksi untuk Berdikari dalam Bidang Ekonomi (16)

1. Membangun kualitas sumber daya manusia.
2. Membangun kedaulatan pangan berbasis pada agribisnis kerakyatan.
3. Membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional.
4. Penguasaan sumber daya alam.
5. Pemberdayaan buruh.
6. Penguatan sektor keuangan
7. Penguatan investasi sumber domestik.
8. Penguatan kapasitas fiskal negara.
9. Penguatan infrastruktur
10. Pembangunan ekonomi maritim
11. Penguatan sektor kehutanan
12. Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan.
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan
14. Membangun karakter dan potensial pariwisata
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional
16. Pengembangan industri manufaktur

Program Aksi untuk Berkepribadian dalam Kebudayaan (3)

1. Mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa.
2. Memperteguh ke-bhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial.
3. Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga.

Sumber: Sama dengan terdahulu

(2) Bidang Prioritas RPJMN (2015~2019)

Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN: 2015~2019) mulai dilaksanakan sebagai RPJMN periode ke-3⁴ dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN: 2005~2025), atas penerbitan Keputusan Presiden nomor 2 tahun 2015.

⁴ Masing-masing periode mempunyai tujuan, tahap pertama tahun 2005~2009 “Memajukan pembangunan negara, masyarakat yang aman dan damai, pembangunan masyarakat yang adil dan demokratis”, tahap ke-2 tahun 2010~2014 “Meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan kemampuan ilmu dan teknologi, penguatan daya saing ekonomi”, tahap ke-3 tahun 2015~2019 “Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam”, tahap ke-4 “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri dan mengembangkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dan sumber daya manusia yang berkualitas”.

Rencana Jangka Menengah yang baru, terdiri dari tiga pilar utama (dinyatakan sebagai dimensi) yang mencerminkan karakteristik dari komitmen pemerintah presiden baru (pembangunan ekonomi berbasis maritim, memajukan strategi politik luar negeri, dan kemandirian ekonomi sebagai negara) yaitu:

A) Dimensi Pembangunan Manusia

Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, Penyediaan perumahan bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, Perbaikan jaminan sosial, Perkembangan patriotisme.

B) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

Kedaulatan pangan, Pembangunan kemaritiman dan kelautan, Kedaulatan energi dan kelistrikan, Promosi pariwisata, Pengembangan industri.

C) Dimensi Pemerataan Kewilayahan

Pengurangan kesenjangan pembangunan dan pendapatan yang ada antara wilayah Jawa dengan wilayah di luarnya, desa-desa dan daerah pinggiran.

Mengenai lima sektor utama yang dituangkan dalam pilar kedua bisa dilihat di bawah ini⁵.

Sektor Pangan Mengingat keadaan impor dan kecenderungan pertumbuhan penduduk di masa mendatang (setiap tahun 3 juta orang bertambah), sektor pangan dikhawatirkan akan menghadapi kondisi krisis dalam skenario terburuk. Beras, gula, jagung, cabai, bawang, garam, dan ikan segar telah jatuh dalam keadaan surplus impor. Untuk mengatasi situasi ini kekuatan swasembada harus ditingkatkan.

Sektor Maritim Sektor maritim dan kelautan perlu diperkuat dari sudut pandang promosi pelayanan dan perdagangan di dalam negeri. Sejauh ini, ada situasi di mana perusahaan asing telah mendominasi sektor maritim dan kelautan, maka perlu keluar dari keadaan tersebut.

Sektor Energi dan Kelistrikan Selama ini sumber energi asal Indonesia dipasok ke negara lain, akibatnya kegiatan ekonomi di luar negeri makin berkembang dan kehadirannya mengancam keadaan perekonomian Indonesia. Sumber energi seharusnya diperlukan/ dimanfaatkan untuk pembangkitan daya listrik yang diperlukan oleh sektor ekonomi domestik, daripada dijual ke negara lain. Perlu dibangun juga fasilitas pendinginan/ pembekuan untuk menyimpan hasil laut, selain itu perlu juga memperkuat industri galangan kapal.

Sektor Pariwisata Walaupun Indonesia mempunyai sumber pariwisata yang menarik (alam, budaya, sejarah) tetapi jumlah kunjungan wisatawan dari luar negeri masih sedikit (hanya setengah dari jumlah kunjungan wisatawan ke Singapura dan sepertiga dari jumlah yang keMalaysia)

Sektor Industri Perekonomian Indonesia saat ini bergantung pada minyak, gas alam dan sumber daya hutan, tidak didukung oleh sektor perindustrian (=manufaktur). Maka perlu dihentikan pola pemikiran “memperoleh pemasukan dengan menjual sumber daya alam” dan menggantikannya dengan “memproses sumber alam dengan teknologi industri dan memasarkannya dengan meningkatkan nilai tambah”.

Dalam rangka menjawab tantangan sektor utama yang diungkapkan diatas, direncanakan investasi infrastruktur seperti berikut di bawah ini, yaitu:

⁵ Mengutip pesan dari Menteri (Bpk. Andrianof Chaniago) yang dimuat di jurnal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS UPDATES, 19 March 2015).

- Memperkuat sector pangan demi kekuatan swasembada, membangun 28 dam di seluruh negeri, dan membangun dan memperbaiki fasititas irigasi mencakup 1 juta hektar.
- Memperkuat sektor kemaritiman dan kelautan, dibangun/ direhabilitasi pelabuhan besar nasional di 24 lokasi di seluruh negeri.
- Memperkuat sectorenergi dan kelistrikan, dikembangkan daya listrik sebesar 35.000MW.
- Memperkuat sektor industri, dibangunkawasanekonomi khusus dan zona industri di luar wilayah Jawa.

Untuk memperbaiki kesenjangan pembangunan antara wilayah yang menjadi tujuan Pilar ketiga, RPJMN (2015~2019) mengidentifikasi arah dasar pengembangan wilayah seperti di bawah. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa percepatan pembangunan ekonomi pulau pulau di luar pulau Jawa bisa mengangkat perekonomian seluruh negeri sedemikian rupa sehingga seluruh pulau bisa menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Sasaran Pengembangan Wilayah

Pembangunan Industri di pulau pulau di luar pulau Jawa	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan 8 SEZs ※7 SEZs di luar Jawa• Pembangunan 14 <i>industrial parks</i> untuk mendukung penciptaan lapangan kerja baru dan nilai tambah• Peningkatan industri setempat untuk mempercepat <i>Tol Laut</i>
Penguatan konektivitas di seluruh negeri	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan jalan (2.000km), 10 pelabuhan dan 10 bandara udara• Dorongan pertumbuhan ekonomi dari pusat negeri ke daerah• Menghubungkan daerah industri utama ke seluruh negeri melalui penguatan konektivitas dan perwujudan pembagian keuntungan melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Pembangunan SDM di bidang industri di daerah daerah di luar pulau Jawa	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sumberdaya manusia sesuai kebutuhan setempat• Pembangunan prasarana moderen dan politeknik• Promosi lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembaharuan teknologi• Penambahan anggaran untuk penelitian dan pengembangan
Peningkatan lingkungan bisnis/ investasi di daerah daerah di luar pulau Jawa	<ul style="list-style-type: none">• Penyederhanaan prosedur investasi• Peningkatan efisiensi distribusi fisik di kawasan strategis• Penyebarluasan "sistim layanan satu atap" untuk meningkatkan persetujuan investasi di kawasan strategis• Penetapan insentif moneter dan non moneter terhadap wilayah penting yang secara aktif mengundang investasi dalam pengolahan bahan baku untuk peningkatan industri nasional dan pengolahan sumber daya alam.

Sumber : RPJMN (2015~2019)

Walaupun promosi pengembangan wilayah di daerah daerah di luar Pulau Jawa bisa menghalangi pertumbuhan seluruh negeri, dari sudut pandang sosial politik, keberlangsungan "*Bhinneka Tunggal Ika*"⁶ tetaplah penting.

RPJMN juga memaparkan pentingnya melakukan pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah (sebagai contoh: Industri lokal, fitur geopolitik) menurut tujuh pulau utama. Arah pembangunan menurut pulau pulau utama tersaji sebagai berikut.

⁶ Studi terhadap Tren Ekonomi dan Politik dan Permasalahannya di Indonesia, Kementerian Perdagangan dan Industri, Jepang; Maret 2015

Arahan Pengembangan setiap wilayah utama (menurut pulau utama)

Wilayah Jawa dan Bali

Area produksi pangan, pengembangan industri dan jasa di tingkat nasional, pintu gerbang ke tujuan wisata terbaik dunia, industri pariwisata bahari dan maritime.

Wilayah Sumatera

Pintu gerbang perdagangan internasional, produksi energi dan batubara, industrialisasi dengan produk primer (kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dll.) perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan.

Wilayah Kalimantan

Pencegahan bencana dan konservasi sumber daya air dan kehutanan, energi yang bisa didaur ulang dan produksi batubara, industrialisasi dengan produk primer (kelapa sawit, karet, bauksit, dll.), areaproduksi pangan.

Wilayah Sulawesi

Pintu gerbang untuk perdagangan internasional dan kawasan timur laut, logistik, pertanian (kakau, padi, jagung), industri dan pertambangan (kerajinan, aspal, sumber daya alam), perikanan dan pariwisata bahari.

Wilayah Nusa Tenggara

Ekowisata, perikanan, produksi garam, produksi rumput laut, daging sapi, jagung, pertambangan (mangan dan tembaga)

Wilayah Maluku

Perikanan dan produk hasil laut, pertambangan (nikel dan tembaga), wisata bahari.

Wilayah Papua

Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan wisata bahari, pengembangan pariwisata (budaya dan keanekaragaman hayati), pertambangan (minyak, gas alam, industri tembaga), peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga pemerintah daerah, pembangunan ekonomi tradisional yang berkelanjutan berbasis sosialdesa tradisional.

Sumber: dikutip dari RPJMN [2015~2019]

Wilayah di luar Jawa dan Bali, terutama di kawasan timur laut termasuk Sulawesi menghadapi masalah/tantangan pembangunan secara umum yaitu “memperkuat hubungan kelautan”, “mempromosikan pengolahan produk primer” maupun “memperkuat perindustrian dan pertambangan”.

(3) Karakteristik Kebijakan Pengembangan Daerah [dari PNPM ke Undang-undang Desa]

Untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia, PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat: 2006-2014) telah memainkan peran penting setelah Otonomi Daerah. PNPM-Mandiri, salah satu komponen utama dari PNPM, selama ini diposisikan sebagai komponen yang mendekati klaster ke-2 dari tiga klaster yang ditetapkan dalam program penanggulangan kemiskinan Indonesia. PNPM-mandiri ini dilaksanakan dengan menerima bantuan baik dan ataupun teknis dari organisasi internasional maupun negara-negara donor yang dipimpin oleh Bank Dunia.

Tiga Klaster terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia

Klaster-1: Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Sebagai bantuan langsung kepada kalangan masyarakat yang kurang mampu, memberikan dukungan dan pasokan dari segi pangan, kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi.

Klaster-2 : Bantuan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat/PNPM Mandiri.

Memberikan bantuan dana kepada masyarakat di daerah miskin, supaya pelayanan sosial dan ekonomi di daerah bisa ditingkatkan sesuai dengan prioritas diberikan masyarakat setempat.

Klaster-3 : Bantuan Sosial Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Sistem pinjaman dana untuk UKM yang mudah diakses oleh kalangan masyarakat yang kurang mampu.

Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

PNPM-Mandiri terdiri dari lima program inti dan tujuh program penguatan, Proyek Pembangunan Infrastruktur Daerah Penanggulangan Kemiskinan (RISE) yang telah dilaksanakan JICA dengan nama PNPM-PISEW telah memainkan peran penting dalam membangun infrastruktur skala kecil di desa miskin (jalan, irigasi, pasar, pasokan air, drainase, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dll)⁷.

Komposisi PNPM-Mandiri

Program Inti: Program yang ditujukan untuk wilayah seluruh negeri

- PNPM Perdesaan
- PNPM Perkotaan
- PNPM Prasarana Perdesaan (PNPM RIS)
- PNPM Prasarana Wilayah untuk Pengembangan Sosial Ekonomi (PNPM PISEW)
- PNPM Daerah Khusus & Terpinggirkan

Program Penguatan: Program yang ditujukan untuk masalah atau kelompok tertentu

- PNPM Peningkatan Usaha Pertanian (PNPM PUAP)
- PNPM Perikanan dan Kelautan (PNPM KP)
- PNPM Pariwisata
- PNPM Generasi
- PNPM Penghijauan (G-KDP)
- PNPM Pembangunan Lingkungan tempat tinggal (PNPM ND)
- PNPM Perumahan dan Pemukiman

Sumber: Sama dengan atas

Setelah selesainya PNPM pada tahun 2014, Tim Studi melakukan survei kuesioner dengan sasaran organisasi organisasi yang melaksanakan program tersebut, termasuk Bappenas. Hasilnya, secara umum PNPM yang dilaksanakan di seluruh negeri dianggap telah membawa tingkat dampak tertentu dalam berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan yang ditargetkan MDGs. Kesetaraan, transparansi dan kompetensi dari proyek proyek khusus nampak sebagai sebuah cahaya positif secara keseluruhan walaupun pengakuan bisa berbeda untuk organisasi yang berbeda. Dengan perkembangan desentralisasi, PNPM, dianggap memainkan suatu peran utama sebagai suatu model proyek proyek partisipatif yang dimulai oleh pemerintah daerah.

Di sisi lain, beberapa perhatian masih tersisakan. Karena hampir seluruh PNPM dilaksanakan secara seragam dengan suatu pedoman teknis, pendekatan programnya menjadi tidak benar benar partisipatif. Juga ditunjukkan bahwa pemberdayaan kapasitas untuk para fasilitator tidak sepenuhnya dilakukan dan dananya bersumber dari pinjaman luar negeri. Terdapat persoalan yang menjadi perhatian terkait kesinambungan finansial untuk melanjutkan program program sejenis. Untuk pemberdayaan kapasitas para fasilitator, proyek proyek bantuan teknis JICA seperti CDP di Sulawesi menunjukkan sebuah peran yang komplementer. Di samping itu, pengenalan Dana Desa di bawah pemberlakuan Undang-undang Desa dapat dilihat sebagai alternatif dari pinjaman luar negeri. Tantangan selanjutnya adalah apakah dana desa dapat menjamin konsistensi, keseragaman dan transparansi dibandingkan dengan PNPM.

⁷ Lihat "3-4 Pembangunan infrastruktur daerah yang berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan".

2-2 Peningkatan Konektivitas dan Promosi Ekonomi dan Industri

(1) Konsep Tol Laut terkait dengan Peningkatan Konektivitas

Bagi Negara Indonesia yang panjang garis pantainya terbesar ketiga di dunia (no.1 Kanada, no.2 Norwegia, dan Jepang no.6) dengan membanggakan jumlah pularnya terbanyak di dunia (ada yang mengatakan 13.500 ada yang 17.000), peningkatan kenyamanan transportasi laut merupakan masalah besar demi pengembangan ekonomi. Karena biaya pengangkutan udara didaerah relatif mahal, biaya kegiatan ekonomi atau pelayanan publik (kesehatan dan pendidikan) tidak efisien maka pada dasarnya dipikirkan bahwa daripada pengangkutan udara lebih efektif menurunkan biaya dengan meningkatkan transportasi laut⁸. Dalam konteks tersebut, di antara berbagai komitmen presiden baru yang tertuang dalam RPJMN, konsep pengembangan kelautan (disebut: Tol Laut) menjadi salah satu bahan perhatian utama.

Di siniakan diberikan garis besar mengenai Tol Laut. Dengan tujuan untuk meningkatkan transportasi laut dikawasan timur lautdimana pembangunan ekonominya relatif lambat, dan dengan pengertian untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan orang dan barang, program Tol Laut dicanangkan. Anggaran total yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini (total dari sektor publikdan swasta) diperkirakan 700 trilyun rupiah (sekitar 6,5 trilyunYen), di antaranya adalah 24 pelabuhan (termasuk lima *Hub Port*; Belawan/ Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Tanjung Priok/ Kali Baru di DKI, Tanjung Perak di Surabaya, New Port di Sulawesi Selatan, Bitung di Sulawesi Utara, dan 19 pelabuhan pengumpulan) yang memerlukan 234 trilyun rupiah (sekitar 2,2 trilyun Yen) untuk pemeliharaan dan perluasannya saja.

9 Program Utama Tol Laut

1. Pengembangan 24 pelabuhan utama (Termasuk pengerukan, pembangunan terminal peti kemas)	: 243 trilyun rupiah
2. Pengembangan transportasi laut jarak pendek (mengembangkan rute yang menghubungkan tujuh pelabuhan di Jawa dan Sumatera)	: 7.5 trilyun rupiah
3. Memfasilitasi pelabuhan utama dengan kargo dan bulk	: 40.6 trilyun rupiah
4. Pengembangan pelabuhan non-komersial (pelabuhan kecil) di 1.481 lokasi.	: 198 trilyun rupiah
5. Pengembangan pelabuhan komersial di 83 lokasi.	: 41.5 trilyun rupiah
6. Pengembangan jalan akses ke pelabuhan, kereta barang, infra. transportasi sekitarnya.	: 50 trilyun rupiah
7. Reinvest galangan kapal di 12 lokasi	: 10.8 trilyun rupiah
8. Pengadaan/konstruksi berbagai jenis kapal (hingga 5 tahun kedepan)	: 101.7 trilyun rupiah
9. Pengadaan/konstruksi kapal patrol laut	: 6.0 trilyun rupiah

Sumber : Pengembangan Tol Laut dalam RPJMN 2015~2019 (Terbitan bagian Transportasi Bappenas)

Menurut Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Tol Laut dilaksanakan di bawah pengawasan staf Presiden (yang bertugas untuk promosi pembangunan) dan Kementerian Koordinator bidang Kelautan. Kemudian, BAPPENAS bertugas mengkoordinasikan diantara organisasi pelaksana sedangkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Industri, Kementerian PU dan Perumahan dan PT. Pelindo bertugas melaksanakannya. Diantara sembilan program, PT. Pelindo bertanggungjawab atas kementerian tersebut dalam pengelolaan pelabuhan komersial (1, 3, dan 5) sementara Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan bertanggungjawab dalam hal organisasi pelabuhan besar bukan-komersial dan rute transportasi laut, termasuk pembangunan/ pengadaan kapal (2, 4, 8 dan 9).

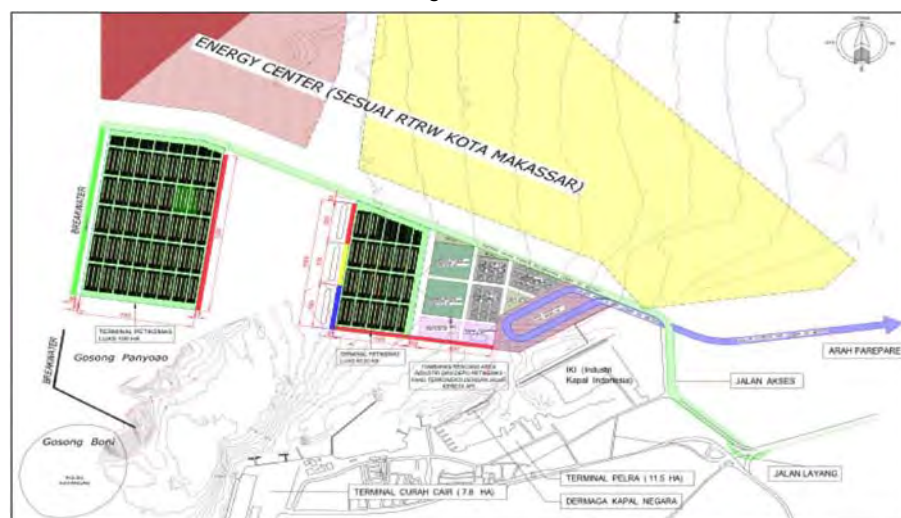
⁸ Dengan memperkuat konektivitas antar pulau hemat biaya sehingga cocok dengan rencana pembangunan tata ruang nasional dari masa pemerintahan sebelumnya.

Lebih dari itu, Kementerian Industri mengerjakan investasi ulang untuk galangan kapal (7) dan Kementerian PU dan Perumahan pada pembangunan prasarana di daerah pedalaman (6), secara terpisah. Lagi, menurut Direktorat Perhubungan Laut, kemajuan Tol Laut secara keseluruhan lambat. Alasan kelambatan adalah, sebagai contoh, kenyataan bahwa diskusi tentang bagaimana memajukan pembangunan 1.481 pelabuhan non-komersial masih berlangsung. Alasan yang lain adalah bahwa pembangunan beberapa pelabuhan besar/ penting mungkin memerlukan studi kelayakan (menilai dampak dari pembangunan daerah pedalaman) atau analisis mengenai dampak lingkungan.

PT. Pelindo, yang berhubungan dengan pembangunan pelabuhan besar/ penting, merupakan sebuah BUMN (pemerintah memiliki 100% saham) dan mengoperasikan empat kantor wilayah I-IV dan bertugas dalam pengelolaan/ operasi dan pemeliharaan atas pelabuhan besar dalam negeri yang penting. Tim Studi mengunjungi PT. Pelindo IV di Makassar yang secara luas melingkupi Indonesia bagian Timur dalam rangka mengumpulkan informasi terkait kondisi saat ini dari proyek proyek utama yang dilaksanakan. Hasil wawancara dirangkum seperti berikut:

- PT. Pelindo IV bertanggung jawab mengembangkan Pelabuhan Baru Makassar (MNP) dan 10 pelabuhan, salah satunya di Jayapura, diantara 24 pelabuhan utama yang akan dibangun. Permasalahan terkait dengan konektivitas diantara pelabuhan pelabuhan lokal adalah, sebagai misalnya, kenyataan bahwa ekspor dari Makassar atau Papua saat ini memerlukan transportasi lewat Surabaya, yang dari segi biaya tidak kompetitif. Untuk itu, penting meningkatkan pelabuhan kecil/ besar daerah baik segi perangkat keras maupun lunak.
- MNP harus diciptakan di daerah beting yang direklamasi yang terletak di lokasi arah utara dari pelabuhan yang ada. Seluruh daratan dengan total luas 150ha dibagi dalam dua bagian untuk dua tahap pembangunan. (Tahap I untuk sisi daratan 50 ha dan Tahap II untuk sisi laut 100 ha). Tahap I selanjutnya dibagi dalam tiga Blok pembangunan (A, B, C). Pada tahun fiskal 2015, pembangunan Blok A di tahap I akan dimulai. Periode pembangunan secara keseluruhan adalah selama 3-4 tahun dengan total biaya pembangunan 1,8 trilyun Rupiah (setara 150 juta dolar AS). Biaya akan ditutup dengan pembiayaan bank dan modal Negara (PNM: Penyertaan Modal Negara). Pengaturan keuangan setelah 2015 belum bisa dipastikan.

Gambar Skematik Pembangunan Pelabuhan Baru Makassar



Sumber : PT. Pelindo IV

- Untuk pelabuhan Bitung, TEUs tahunan direncanakan ditingkatkan dari 5.000 ke 20.000 dengan reklamasi 5ha lahan dan memperluas pelabuhan yang ada. Pelabuhan ini berada dalam posisi strategis nasional sejak periode pemerintahan sebelumnya, dan diharapkan peningkatan pelabuhan dapat memajukan jalur transportasi dari Papua ke Singapur atau Malaysia lewat Bitung. Untuk pelabuhan Sorong, TEUs tahunan akan ditingkatkan dari 50.000 ke 300.000 dengan reklamasi 10ha lahan (5ha x 2 tahap) dan membangun/ memperluas pelabuhan besar yang ada. Untuk pengembangan pelabuhan tersebut di atas, anggaran negara akan dialokasikan.
- Untuk mewujudkan Tol Laut, perlu memajukan pengembangan ekonomi industri di daerah pedalaman termasuk mengembangkan pelabuhan itu sendiri. Ini berarti bahwa keseimbangan antara penawaran (daya transportasi) dan permintaan perlu dijaga. Dalam hal pelabuhan baru Makassar, adalah penting mengembangkan daerah pedalaman atas inisiatif pemerintah daerah, sebagai contohnya, pembangunan jalan masuk atau jalur kereta api antara kawasan industri baru (KIMA2 di Maros) dan pelabuhan.

Selanjutnya, seperti dinyatakan oleh Direktorat Perhubungan Laut, dan PT. Pelindo IV, sangat penting mengembangkan kegiatan social ekonomi di daerah dimana pelabuhan akan dibangun, agar layanan transportasi laut efektif dan berkesinambungan. Jelasnya, kunci terwujudnya Tol Laut adalah apakah jumlah orang yang berpindah/ bergerak dan jumlah barang yang diangkut bisa ditingkatkan adalah tergantung pada pengembangan industri di pulau pulau tersebut.

Untuk pengembangan industri dan promosi kegiatan sosial ekonomi di pulau pulau tersebut, beberapa program dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang menargetkan pulau pulau terpencil dekat ke perbatasan luar negeri dan desa desa perikanan di seluruh negeri. Program program tersebut terangkum sebagai berikut:

“*Integrated Rural Development for Marine Affairs and Fisheries (PK2PT: Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi)*” menargetkan lima pulau terpencil yang terletak dekat ke perbatasan. Program ini dilaksanakan di tahun 2015⁹ untuk membangun sarana prasarana (pelabuhan perikanan, fasilitas budidaya perikanan, gudang pendinginan, fasilitas pengolahan produk kelautan, dan landas pacu pelabuhan udara, dll.) untuk menghasilkan produk olahan/ perikanan atau meningkatkan efisiensi dalam pengangkutan produk dan juga mengembangkan sarana/ fasilitas pariwisata. Program ini diharapkan berlanjut hingga tahun 2019, sedangkan lima pulau terpencil lainnya akan ditambahkan di tahun 2016.

Pulau-pulau Sasaran PK2PT (2015)



Sumber: Dokumen Direktorat Pulau pulau Pesisir, KKP

⁹ Simeleu (Aceh), Natuna (Riau), Sangihe (Sulawesi utara), Maluku Tenggara Barat (Maluku), and Merauke (Papua). Pada dasarnya, satu pulau (2,000 km² atau lebih kecil) terdiri atas sebuah kabupaten secara menyeluruh.

Program lainnya adalah “*Resilient Coastal Village Development*” untuk desa desa perikanan di seluruh negeri, yang telah dilaksanakan sejak dua tahun silam, dengan sasaran 66 desa dari 22 kabupaten di tahun 2015¹⁰. Program ini terdiri dari lima komponen yaitu 1) pengembangan sumber daya manusia untuk menanggulangi bencana alam seperti *tsunami*, 2) pemanfaatan/ pendayagunaan sumber alam yang ada di lingkungan pesisir, 3) pembangunan prasarana/ infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan lingkungan hidup di desa desa dan daerah sekitar, 4) pencerahan kepada para penduduk dalam mengangulangi bencana dan perubahan iklim, dan 5) kegiatan usaha untuk peningkatan mata pencaharian. Rincian kegiatan program ditetapkan melalui keputusan partisipatif dan dinyatakan dalam RPJMDes dari desa sasaran. Salah satu tujuan program ini adalah pengentasan kemiskinan, akan tetapi gaji tidak dibayarkan ke para penduduk, tidak seperti kasus PNPM. Sebagai contoh, para penduduk menyediakan lahan untuk pembangunan jalan untuk evakuasi bencana, juga menjadi tenaga kerja sukarela untuk pekerjaan konstruksi tanpa kompensasi.

Daerah Sasaran untuk “*Resilient Coastal Village Development*”(2015)



Sumber : Dokumen Direktorat Pulau-pulau Kecil dan Pesisir, KKP

Program program tersebut dilaksanakan oleh KKP yang berperan mempromosikan masyarakat dan ekonomi pulau pulau atau desa desa perikanan di pesisir, mendorong permintaan layanan transportasi laut dan sebagai konsekuensi untuk Tol Laut. Walaupun demikian, menurut KKP, bantuan dari organisasi donor termasuk JICA diharapkan, mengingat fakta bahwa, dalam pelaksanaan program, mereka belum siap secara penuh terkait komponen teknis/ pengetahuan dalam aspek aspek tersebut seperti dijelaskan berikut ini:

- Pengetahuan dan pemahaman rinci untuk kesiapan pekerjaan darurat
- Pengetahuan dan teknik dari fasilitator desa untuk pengelolaan penanggulangan bencana
- Pendekatan teknis terhadap promosi kegiatan *OVOP* (Satu Desa Satu Produk)
- Pengetahuan dan teknik untuk proteksi lingkungan pesisir seperti pencegahan erosi, pembangunan zona hijau, koservasi bakau.

Kemajuan selanjutnya dari program tersebut perlu diperhatikan baik dari aspek pembangunan transportasi laut/ pelabuhan (sisi suplai) maupun promosi kegiatan social ekonomi di daerah pedalaman (sisi permintaan), dalam kaitannya mewujudkan Tol Laut. Secara khusus, permasalahan pokoknya adalah alokasi/ eksekusi anggaran untuk yang terdahulu dan tingkat dampak social ekonomi termasuk kemajuannya untuk yang kemudian.

¹⁰ Sasaran desa perikanan diseleksi berdasarkan jumlah penerima manfaat, dll yang tidak bisa dilakukan di Jawa. Program ini sedang dilaksanakan di 300 kabupaten/kota diantara sekitar 500 kabupaten/kota di seluruh negeri. Pencapaian di tahun fiskal 2014 adalah 48 kabupaten. 22 kabupaten lain ditambahkan di tahun fiskal 2015.

(2) Konsep Science/Techno Park terkait dengan Promosi Ekonomi dan Industri

Kebijakan Industri Indonesia saat ini adalah dipindahkannya dari industri yang bergantung pada konsumsi/ ekspor sumber alam ke industri yang mengarah ke pengolahan sumber daya/ ekspor produk. Dengan memasarkan produk bernilai tambah setelah diolah, sebagai pengganti konsumsi/ ekspor bahan mentah, pendapatan nasional diharapkan naik. Dalam kondisi demikian, NAWACITA No.6 “Peningkatan produktivitas dan daya saing penduduk Indonesia di pasar internasional” telah menyatakan dan kemudian konsep Science/ Techno park (disebut S/TP) dimulai sebagai sebuah program prioritas sejalan dengan agenda pemerintah baru.

Ide yang mirip dengan konsep science/ techno park telah ada modelnya seperti di *Tsukuba Science City* di Jepang atau *College Town* di Jerman, sedangkan di Indonesia (walaupun pernah ada juga yang mirip di Indonesia kira-kira tahun 1985) baru pertama kalinya tertera sebagai program prioritas dalam Rencana Pembangunan Nasional. Menurut informasi dari LIPI dan sebagainya, akan dibangun di tingkat kabupaten dan kota 77 techno park, dan di tingkat propinsi 19 science park, di tingkat nasional 4 science park nasional, sehingga totalnya 100 lokasi yang rencananya akan dikembangkan dalam lima tahun ke depan¹¹. Anggaran totalnya diperkirakan sebesar 1,5trilyun (setara dengan 14 miliar Yen). Di tingkat daerah, pemerintah daerah bakal mengambil kewenangan untuk melibatkan sektor swasta lokal (usaha kecil menengah) dengan memanfaatkan fungsi baik dari universitas maupun lembaga penelitian/ pendidikan dalam penelitian dan pengembangan produk berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah, sehingga tujuan untuk mengaktifkan perekonomian daerah dapat tercapai, dalam kerangka kolaborasi di antara tiga pihak sebagaimana disebut “kerjasama antara industri-pemerintah-akademis”.

Tabel 2-1 Pembagian Penanganan Science/ Techno Park oleh berbagai Instansi Pemerintah Pusat

	Science Park Nasional	Science Park(Propinsi)	Techno Park(Kabupaten)
Kemenristek-Dikti	1	2	4
LIPI	1	-	7
BATAN	1	-	3
BPPT	1	-	8
Kemenperin	-	-	5
KKP	-	-	24
Kementan	-	17	26
Sub Total	4	19	77
Total	100		

Sumber: Berita Acara Rapat: Rapat Koordinasi teknis tentang Kemajuan dan Tindak lanjut program S/TP tanggal 22 Juni 2015

Per bulan Juni 2015, 65 lokasi telah ditetapkan (untuk detailnya lihat Tabel 2-2 dan Gambar 2-1). Untuk tahun 2016, kegiatan dan lokasi 35 S/TP lagi perlu ditetapkan. Beberapa diantara 65 S/TP, sebagai contoh, Puspipstek¹² di bawah RISTEK-DIKTI atau Pusat Ilmu Pengetahuan LIPI Cibinong, menggunakan

¹¹ Menurut informasi dari LIPI, model untuk Science Park Nasional LIPI adalah prototipe dari pusat inkubasi yang beroperasi di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan untuk Science / Techno Park, di Kota Solo, Kota Bandung, Propinsi Bengkulu ada kasus yang sama. Selain itu, di Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Barat ada PUSPITEK yang ada di bawah RISTEK (Departemen Riset dan Teknologi) yang salah satunya akan menjadi Science Park Nasional.

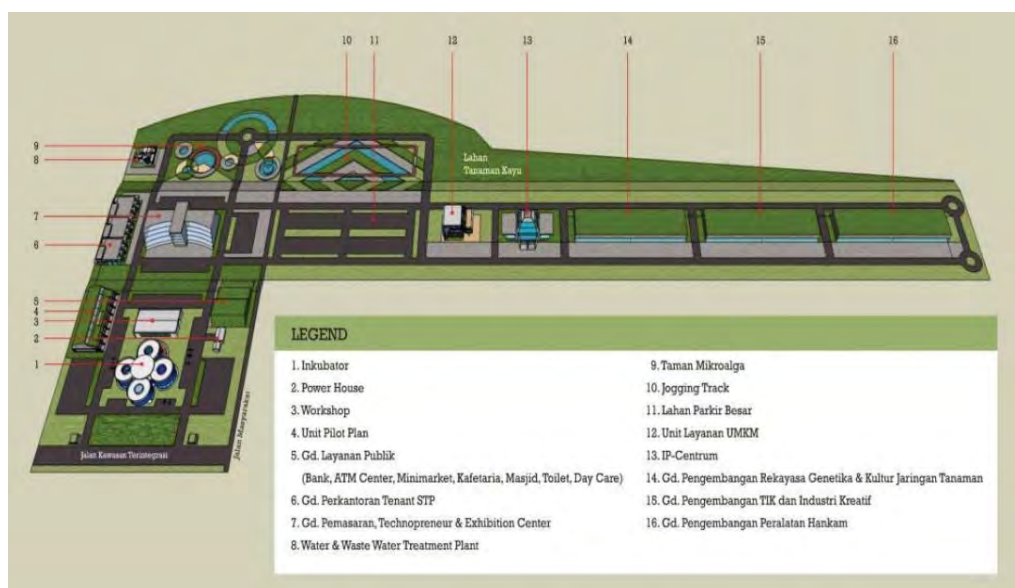
¹² Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

anggaran untuk kegiatan dan fasilitas yang ada. Dengan menggunakan peran koordinasi diantara kementerian di bawah Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, RISTEK-DIKTI saat ini sedang menyiapkan suatu rancangan besar untuk S/TP sementara Keputusan Presiden untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pertimbangan. Lebih dari itu, RISTEK-DIKTI memimpin dalam melakukan rapat reguler dengan badan/ kementerian lain dan sedang merangkum suatu pedoman dan sistim evaluasi/ pemantauan pelaksanaan S/TP, yang akan selesai pada bulan Oktober atau November 2015.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan lahan dan membangun prasarana dasar dan juga memperkuat jejaring daerah, sebagai lembaga pelaksana untuk menjadi pemilik di dalam memimpin keseluruhan kegiatan. Di pihak lain, pemerintah pusat pada prinsipnya bertanggungjawab dalam hal pemberdayaan seperti membantu perencanaan, ahli kemampuan teknis ataupun terkait pengadaan peralatan.

Konsep Pengembangan Science/Techno Park :LIPI

LIPI akan mengembangkan Science Park Nasional dengan memanfaatkan dan memperluas fasilitas yang ada di kecamatan Cibinong, kabupaten Bogor (gambar), kemudian juga terus mengembangkan techno park di 7 kabupaten sesuai dengan pembagian peranan di antara instansi-instansi bersangkutan. Science Park Nasional tersebut akan dibangun di lahan seluas 15-20 ha dimana sudah didirikan gedung pusat inkubasi dan perkantoran. Bagian dari pusat inkubasi akan disewakan kepada perusahaan kecil menengah (untuk 20 perusahaan) dengan biaya relatif murah, dan rencananya fasilitas tersebut akan dilengkapi dengan peralatan penelitian dan mesin pengolahan yang sulit disediakan sendiri oleh perusahaan kecil menengah.



Techno Park akan dibangun di bawah pimpinan dan koordinasi pemerintah daerah, sementara LIPI akan memberikan panduan teknis dari segi teknologi kelautan dan irigasi dll. Nantinya, seiring dengan fokus dukungan pengembangan dan kerjasama pengelolaan untuk 7 techno park, LIPI juga siap memberikan dukungan teknologi bagi science/techno park yang dikelola instansi lainnya, jika memang diperlukan.

Sumber : Strategi Pengembangan Science and Technopark, dan Technopark LIPI

Sebagai hasil dari wawancara dengan tujuh lembaga/ kementerian terkait, Tim Studi mengkonfirmasi bahwa anggaran S/TP untuk tahun fiscal 2015 kurang lebih telah dilaksanakan sesuai rencana. Walaupun terdapat perbedaan dalam kemajuan, seluruh kementerian/ lembaga telah memulai kegiatan mereka.

Tidak ada bantuan khusus diberikan oleh donor selama ini (kecuali bantuan GIZ untuk Technopark di Solo), dan lembaga/ kementerian pelaksana pada dasarnya akan meneruskan mendukung program berdasarkan

anggaran nasional dan teknologi. Beberapa pemangku kepentingan pemerintah yang pernah belajar di Jepang ingin diberikan ilmu/ pengetahuan yang ukil asal Jepang, seperti sistim pengelolaan koperasi pertanian, teknologi untuk budidaya belut, dsb. Atas permintaan tersebut, JICA bisa memberikan pengetahuan tentang promosi UKM di masa mendatang tergantung dari isi tiap S/TP (lingkup industri, jenis produk, teknologi/ ala-alat yang diperlukan, dll).

Konsep Pembangunan Technopark Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan

TP kabupaten Bantaeng diharapkan memberi kontribusi terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan petani wilayah Indonesia bagian timur, sebagai pusat produksi benih/ perbenihan dan pembangunan yang melakukan pengembangan produksi, alih teknologi, dan pemberdayaan petani. Secara khusus, TP menargetkan menghasilkan benih/ perbenihan padi, jagung, *satoimo*, dan rumput laut termasuk budidaya air tawar. Kabupaten saat ini sedang menyusun Rencana Induk untuk TP bersama BPPT, dan berencana melakukan survei pasar dan membuat perencanaan detail untuk mulai membangun prasarana dari tahun depan. Luas lokasi proyek adalah 3ha, dimana fasilitas/ sarana penelitian dan pelatihan, bangunan ramah lingkungan dan area konservasi bakau dll. akan dibangun.

Benih/ perbenihan yang saat ini disalurkan di Indonesia, sebagian besar dihasilkan di Jawa oleh Kementerian Pertanian atau diimpor. Walaupun lingkungan penanaman berbeda tergantung daerahnya, sistem penyeragaman saat ini telah menciptakan masalah yaitu bahwa benih/perbenihan tidak beradaptasi dengan lingkungan/ daerah penanaman. Untuk pembibitan padi, ada persoalan yaitu petani tidak bisa melakukan pembibitan pada saat penanaman, karena benih benih didistribusikan dari Jakarta ke seluruh negeri dalam jumlah yang besar dan pada saat yang bersamaan. Hal demikian kadang menyebabkan para petani memproduksi perbenihan oleh mereka sendiri walaupun kualitas perbenihan tersebut rendah. Atas persoalan ini dan kendala kabupaten tidak bisa memastikan areal yang cukup luas untuk penanaman, hasil benih/ perbenihan setempat menjadi pilihan, atas pertimbangan benih tersebut bisa diproduksi dalam jumlah besar pada areal yang kecil dan juga dengan keunggulan komparatif daerah. Kabupaten akan sementara mengutamakan pemasokan benih/ perbenihan di dalam kabupaten dan bertujuan memasok kelebihanannya ke daerah bagian timur dengan lingkungan yang serupa.

Sebenarnya, para petani sudah berhasil menurunkan ongkos produksi melalui perbaikan proses produksi sendiri dan melakukan potongan harga 50% dari harga pemerintah pusat. Hal demikian telah memungkinkan petani di kabupaten memulai produksi sendiri dan memasarkan benih/ perbenihan tanpa menunggu perwujudan rencana TP. Untuk membangun TP, 11 dinas setempat bekerja bersama. Contohnya, Dinas PU dan Perumahan bertanggungjawab untuk prasarana, Dinas Koperasi untuk pelatihan pertanian, Dinas Pertanian untuk manajemen lapangan, dan Dinas perikanan untuk pengelolaan perikanan, Dinas Pendidikan bertugas dalam pembangunan kapasitas bagi mereka yang akan melakukan pelatihan untuk para pemasar/produsen benih/perbenihan.



Technopark Bantaeng (gambar)

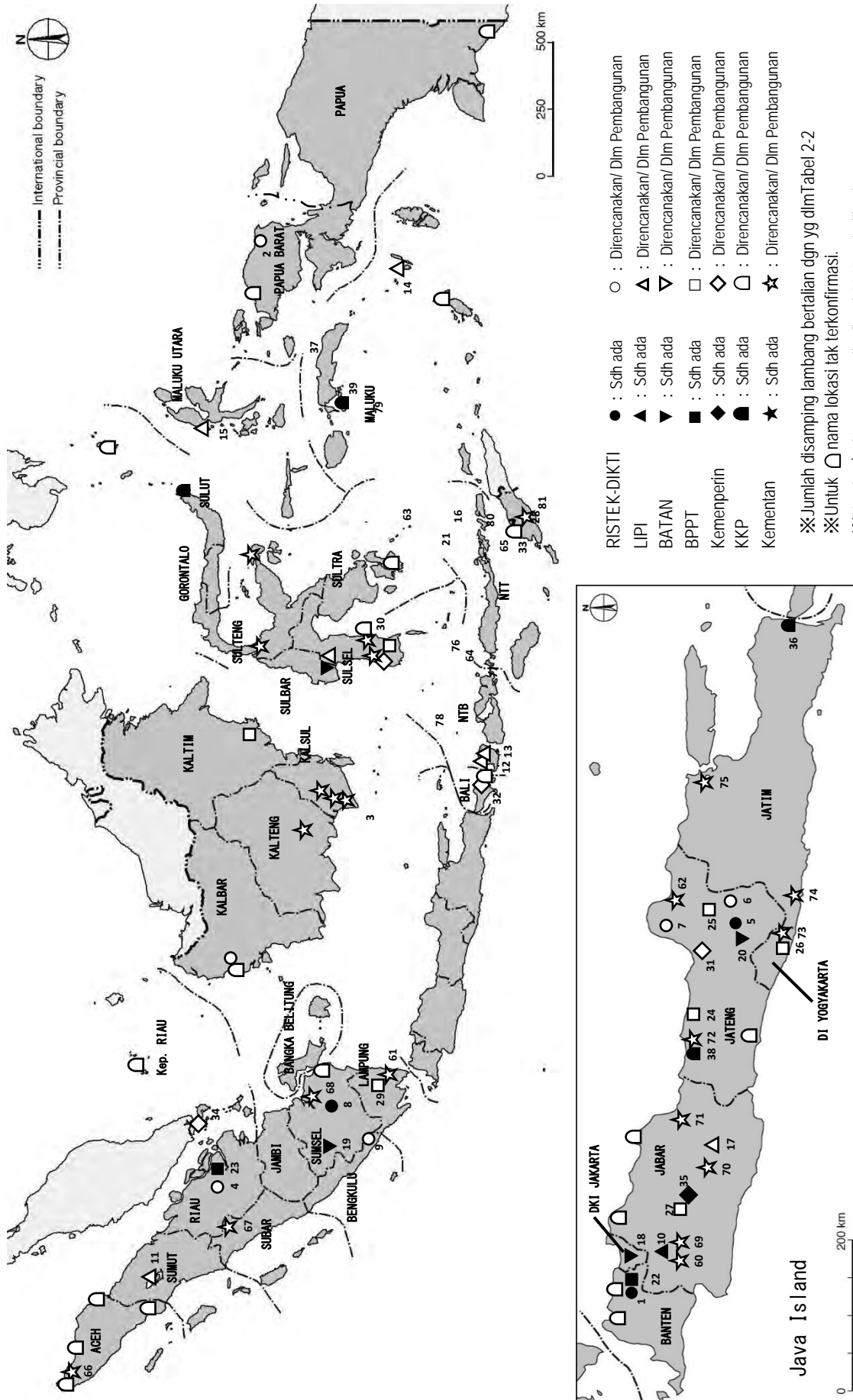
Sumber: Rencana Induk 2015: Technopark Bantaeng (dalam tahap persiapan)

Tabel 2-2 Lokasi dan Kemajuan Science/ Technopark

Kementerian / Lembaga	Lokasi			Status Kemajuan
RISTEK- DIKTI	NSP	1	Prop. Banten, Kota Tangerang Selatan, Serpong	Telah ada
		2	Prop. Papua Barat	Calon
	SP	3	Prop. Kalimantan Barat	Calon
		4	Prop. Riau	Calon
	TP	5	Prop. Jawa Tengah, Kota Solo	Telah ada
		6	Prop. Jawa Tengah, Kab. Sragen	Calon
		7	Prop. Jawa Tengah, Kab. Jepara	Calon
		8	Prop. Sumatera Selatan, Kab. Ogan Ilir	Telah ada
		9	Prop. Bengkulu, Kab. Kaur	Calon
LIPI	NSP	10	Prop. Jawa Barat, Kab. Bogor, Kec. Cibinong	Telah ada
	TP	11	Prop. Sumatra Utara, Pulau Samosir	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		12	Prop. Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		13	Prop. Nusa Tenggara Barat, Kab. Lombok Barat	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		14	Prop. Maluku, Kota Tual	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		15	Prop. Maluku Utara, Kota Ternate	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		16	Prop. Sulawesi Selatan, Kab. Enrekang	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
17	Prop. Jawa Barat, Kab. Tasikmalaya	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)		
BATAN	NSP	18	Kota Jakarta	Telah ada
	TP	19	Prop. Sumatera Selatan, Kab. Musi Rawas	Telah ada
		20	Prop. Jawa Tengah, Kab. Klaten	Telah ada
BPPT	NSP	21	Prop. Sulawesi Barat, Kab. Polewali Mandar	Telah ada
		22	Prop. Banten, Kota Tangerang Selatan, Serpong	Telah ada
	TP	23	Prop. Riau, Kab. Pelalawan	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		24	Prop. Jawa Tengah, Kota Pekalongan	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		25	Prop. Jawa Tengah, Kab. Grobogan	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		26	Daerah Istimewa Yogyakarta, Kab. Gunung Kidul	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		27	Prop. Jawa Barat, Kota Cimahi	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		28	Prop. Sulawesi Selatan, Kab. Bantaeng	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		29	Prop. Lampung, Kab. Lampung	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		30	Prop. Kalimantan Timur, Kab. Penajam Paser Utara	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
Kemenperin	TP	31	Prop. Jawa Tengah, Kota Semarang	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		32	Prop. Bali, Kota Denpasar	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		33	Prop. Sulawesi Selatan, Kota Makassar	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		34	Prop. Riau Islands, Kota Batam	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
KKP	TP	35	Prop. Jawa Barat, Kota Bandung	Telah ada + Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		36	Prop. Jawa Timur, Kab. Banuwangi	Telah ada
		37	Prop. Sulawesi Utara, Kota Bitung, Aertenbaga	Telah ada
		38	Prop. Jawa Tengah, Kota Tegal	Telah ada
		39	Prop. Maluku, Kota Ambon	Telah ada
Kementan	NSP	40~59	Belum teridentifikasi	Akan dibangun (fiscal 2016~2019)
		60	Prop. Jawa Barat, Kota Bogor	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
	SP	61	Prop. Lampung, Kab. Lampung Selatan	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		62	Prop. Jawa Tengah, Kab. Pati	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		63	Prop. Sulawesi Tengah, Kab. Sigi	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		64	Prop. Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		65	Prop. Sulawesi Selatan, Kab. Maros	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
	TP	66	Prop. Aceh, Kab. Aceh Besar	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		67	Prop. Sumatera Barat, Kab. Lima Puluh Kota	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		68	Prop. Sumatera Selatan, Kab. Banyu Asin	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		69	Prop. Jawa Barat, Kab. Bogor	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		70	Prop. Jawa Barat, Kab. Garut	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		71	Prop. Jawa Barat, Kab. Cirebon	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		72	Prop. Jawa Tengah, Kab. Tegal	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
		73	Daerah Istimewa Yogyakarta, Kab. Gunung Kidul	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)
74		Prop. Jawa Timur, Kab. Pacitan	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)	
75		Prop. Jawa Timur, Kab. Lamongan	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)	
76	Prop. Kalimantan Selatan, Kab. Tapin	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)		
77	Prop. Kalimantan Selatan, Kab. Tanah Laut	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)		
78	Prop. Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)		
79	Prop. Sulawesi Tengah, Kab. Banggai	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)		
80	Prop. Sulawesi Selatan, Kab. Bone	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)		
81	Prop. Nusa Tenggara Timur, Kab. Timur Tengah Selatan	Dalam Pembangunan (fiscal 2015~)		
SP/TP	82~102	Pembangunan 34 NSP/SP dan 100 TP telah direncanakan sejak dulu sebelum konsep S/TP diinisiasi. 22 TP sedang dikembangkan pada tahun fiskal 2015.	Akan dibangun (fiscal 2016~2019)	

Sumber : Berdasarkan wawancara dengan lembaga/kementerian pelaksana S/TP

Catatan : Jumlah total S/TP adalah 100 di dalam tabel ini sesuai informasi yang diberikan RISTEK 2 S/TP lagi ditambahkan dari yang jumlah telah disampaikan.



Gambar 2-1 Lokasi Science/ Technopark

Sumber : Berdasarkan wawancara dengan lembaga/ kementerian pelaksana S/TP

2-3 Undang-undang Desa dan Program Dana Desa

(1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terkait

Untuk mengetahui kemajuan pembentukan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Desa tahun 2014 (No.6 tahun 2014), Keputusan Presiden (No.43 tahun 2014) sebagai peraturan untuk pelaksanaannya serta perundang-undangan terkait, survei wawancara dilakukan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi¹³ (selanjutnya disebut Kemendesa) yang didirikan atas Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2015 serta Kementerian Dalam Negeri¹⁴ yang selama ini membawahi penguatan pemerintahan desa/ pengembangan desa sebagai pemangku utama. Dalam kesempatan wawancara tersebut, informasi tentang pelaksanaan Program Dana Desa yang akan dimulai di tahun fiskal 2015 juga dikumpulkan.

Undang-undang Desa melingkupi empat bidang, yaitu i) pemerintahan desa, ii) pembangunan desa, iii) pemberdayaan masyarakat desa, dan iv) pengembangan wilayah pedesaan. Sebelumnya semua bidang tersebut berada dalam kewenangan Kementerian Dalam Negeri, namun bidang ii), iii) dan iv) dialihkan ke Kementerian Desa setelah pendiriannya¹⁵. Tabel 2-3 menunjukkan peraturan menteri yang diumumkan oleh kedua kementerian sesuai dengan berlakunya Undang-undang Desa.

Tabel 2-2 Peraturan Kementerian yang ditetapkan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Dalam Negeri
Permendes No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	Permendagri No.111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
Permendes No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa	Permendagri No.112/2014 tentang Pilkades-Pemilihan Kepala Desa
Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa	Permendagri No.113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Permendagri No.114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
Permendes No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015	

Sumber : Wawancara dengan Pelaksana Tugas Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes

¹³ Dari Keputusan Presiden no.12 tahun 2015

¹⁴ Kementerian Dalam Negeri pula ditambahkan perubahan denganketentuan organisasi atas penerbitan Keputusan Presiden no.11 tahun 2015.

¹⁵ Dengan dialihkannya iii) pemberdayaan masyarakat desa ke Kementerian Desa, sebagian penanggungjawab/ sumberdaya manusia dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, Kementerian Dalam Negeri pindah ke Kementerian Desa. Keppres No. 11 tahun 2015 mengatur organisasi dan tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri untuk organisasinya dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bertanggungjawab atas tatakelola dan lembaga pemerintahan desa.

Disamping pengumuman peraturan menteri oleh kedua kementerian, Menteri Keuangan merevisi peraturannya terkait Dana Desa (revisi undang undang no. 60 tahun 2014 ke undang undang no. 22 tahun 2015). Sejak direvisi, Kementerian Keuangan mengambil tanggungjawab untuk memastikan sumber keuangan dari Dana Desa dan menyalurkan Dana melalui kabupaten sementara Kementerian Desa merupakan lembaga yang bertanggungjawab untuk memantau/ mengevaluasi (dan membimbing/ mengawasi) penggunaan dana.

(2) Program Dana Desa

TA 2015 adalah tahun pertama pengalokasian Dana Desa menurut Undang-undang Desa. Dana tersebut harus disampaikan ke pemerintah desa melalui kabupaten. Walaupun Dana Desa harus dialokasikan hingga 10% dari Dana Perimbangan, hanya 20.8 triliun Rupiah yang sudah dilaksanakan pada tahun pertama, yang setara dengan 3% dari Dana Bagi Hasil. Menurut UU No. 22 tahun 2015, Dana Desa akan berjumlah 6% dari Dana Perimbangan di tahun 2016, dan 10% di tahun 2017. Dana Desa dialokasikan tiga kali dalam setahun dengan proporsi 40% di bulan April, 40% di bulan Agustus dan 20% di bulan Oktober.

Pemerintah kabupaten mengalokasikan 90% dari Dana Desa merata untuk desa desa dan sisanya 10% tidak merata menurut formula yang tersusun atas beberapa faktor seperti penduduk, luas, tingkat kemiskinan, konsisi geografi, sesuai dengan peraturan Bupati yang disampaikan ke Kementerian Keuangan sebelumnya. Tiap Desa menggunakan Dana Desa sesuai dengan rencananya melaksanakan/ mengelola/ memantau program dan menyampaikan laporan keuangan mereka per tiga bulanan ke pemerintah kabupaten. Peraturan menteri di atas mengizinkan sebuah desa menggunakan 70% dari Dana Desa untuk program pengurangan kemiskinan, kesehatan/ pendidikan, prasarana dan pertanian sementara 30% untuk operasi kantor desa mereka, gaji perangkat desa, subsidi/ insentif untuk desa/ organisasi masyarakat. Setelah menerima laporan dari desa desa pemerintah kabupaten menyatukannya untuk melaporkannya ke Kementerian Keuangan. Kepala kecamatan bertanggungjawab memantau/ mengevaluasi penggunaan dana.

Undang undang Desa juga mengatur porsi Alokasi Dana Desa (ADD), yang pernah dialokasikan ke desa desa melalui kabupaten dan Bagi Hasil. Kabupaten diminta memastikan 10% dari anggaran sebagai ADD juga 10% penghasilan pajak sebagai Bagi Hasil yang keduanya untuk dialokasikan ke desa desa. Dengan aturan ini, disamping dana desa, total jumlah anggaran yang dialokasikan ke desa desa akan bertambah secara signifikan dibandingkan sebelumnya.

Hingga awal bulan Juli 2015, telah ada laporan mengenai Dana Desa sebagai berikut¹⁶:

- Sampai dengan tgl 30 Juni, pemerintah pusat telah menyalurkan Dana Desa pertama untuk tahun fiscal 2015 (0,7 Milyar Rupiah secara total) ke 419 kabupaten/ kota (99,8% dari jumlah total). Empat belas kabupaten belum menerima Dana tersebut karena mereka belum menyerahkan peraturan daerah mereka terkait pengalokasian Dana ini. Jumlah alokasi per desa adalah sekitar 300 juta Rupiah saat ini.
- Undang undang No. 5 tahun 2015 mengatur bahwa kabupaten/kota harus mengalokasikan Dana Desa ke desa desa dalam tujuh hari setelah mereka menerimanya dari Kementerian Keuangan. Akan tetapi, banyak desa menyampaikan keluhan ke Kementerian Desa bahwa mereka belum menerima Dana tersebut.
- Desa desa diminta menyerahkan dokumen resmi khusus (RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes) ke Kabupaten sebagai persyaratan penerimaan Dana Desa. Tanpa penyiapan dokumen tersebut, desa

¹⁶ Menurut website Kementerian Desa (www.kemendesa.go.id, News Alert, 3Juli 2015)

tidak bisa menerima Dana. Walau demikian, beberapa desa dikecualikan dari penyerahan ini untuk tahun pertama.

Seperti disebutkan di atas, Kementerian Keuangan perlu memastikan 10% Dana Perimbangan sebagai Dana Desa pada tahun fiskal 2017, yang bernilai sekitar 70 trilyun Rupiah. Akan tetapi, metode pembiayaannya tidak terlalu jelas meskipun Kementerian Keuangan menyatakan bahwa anggaran yang dialokasikan sebelumnya ke berbagai kementerian/ lembaga untuk program pembangunan (dana dekonsentrasi, PNPM, dll.) dapat sebagian dipindahkan ke Dana Desa atau surat obligasi juga dapat dikeluarkan untuk menutup kekurangannya. Bank Dunia memandang bahwa pinjaman diperlukan di masa mendatang tetapi mereka nampak belum memikirkan tindakan kongkretnya.

(3) Pengaruh yang mungkin dari Undang Undang Desa terhadap Pemerintahan Desa

Terdapat pertanyaan tentang bagaimana pemberlakuan undang undang desa bisa mempengaruhi pemerintahan desa saat ini. Pertama, kepala desa harus dipilih diantara penduduk desa secara langsung dengan pemungutan suara yang diikuti dengan penunjukan oleh Bupati/ Walikota. Periodenya adalah enam tahun dan bisa dipilih kembali hingga dua kali meskipun hanya dua periode total sebelumnya yang disahkan. Undang undang desa juga terkait sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagai aparat lembaga pemerintahan desa, dan mengatur bahwa staf yang lain bisa dipekerjakan. Kedudukan sekretaris desa, yang ditugaskan dari kabupaten, dihapuskan tetapi saat ini ditugaskan sekretaris yang bisa meneruskan tugas mereka sampai dengan peraturan kabupaten secara resmi menghapuskan kedudukannya¹⁷. Karena terpisah dari lembaga pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus secara demokratis dipilih untuk masa waktu enam tahun dan bisa dipilih kembali dua kali. Akibat perubahan ini, para kepala desa yang mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada BPD, menjaga hubungan baik dengan BPD. Para kepala desa dan anggota BPD yang periodenya masih tersisa diminta terus melaksanakan tugasnya untuk periode yang tersisa tersebut.

Dari aspek keuangan, akibat pengenalan *Dana Desa* yang berpusat pada Undang-undang Desa, pendapatan desa bisa berubah secara luas. Sumber pendapatan desa awalnya adalah 1) sumber sumber keuangan desa itu sendiri, 2) Bagi Hasil dari kabupaten/ kota, 3) ADD dari kabupaten/ kota, 4) dukungan keuangan dari propinsi, dan kabupaten/ kota, dan 5) Sumbangan dari pihak ketiga, dll. Sekarang, akibat pemberlakuan UU Desa, *Dana Desa* akan disalurkan dari anggaran nasional, disamping dari sumber sumber tersebut. Lebih dari itu, UU mengatur bahwa ADD harus 10% dari seluruh anggaran kabupaten, dan 10% dari pajak penghasilan harus disalurkan ke desa desa sebagai Bagi Hasil. Karena porsi ADD atau Bagi Hasil bervariasi tergantung dari kabupaten, beberapa desa telah menerima hanya sejumlah uang kecil. Setelah pengumuman UU Desa, jumlah uang yang dialokasikan ke desa desa diperkirakan bertambah relatif besar.

Untuk pembangunan desa, penggunaan dana yang dialokasikan ke desa desa akan terdukung terutama sejalan dengan RPJMDes dan RKPDes yang dibuat melalui Musrenbang. UU juga mengatur bahwa pembangunan perlu disetujui oleh BPD dan harus dilaksanakan menurut prioritas sejalan dengan permasalahan yang menjadi prioritas pada setiap tingkatan pemerintahan (pusat, propinsi, kabupaten/ kota).

¹⁷ Di desa 'A' Kab. Takalar, sekretaris sebelumnya telah melanjutkan tugasnya, mungkin dengan pembayaran dari desa.

Tabel 2-4 membandingkan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang Pemerintah Daerah (No. 32 Tahun 2004) dan Undang-Undang Desa (No. 6 Tahun 2014).

Table 2-4 Perbandingan antara UU Pemerintah Daerah (No. 32 Tahun 2004) dan UU Desa (No. 6 Tahun 2014)

	Undang-Undang No. 32 Tahun 2004	Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Penentuan Desa	Komunitas otonom memiliki sumber daya finansial	Posisi penengah antara komunitas otonom dan lembaga administrasi dalam sistem desentralisasi nasional. Memungkinkan desa adat untuk melanjutkan keberadaannya/ otonomi
Pembentukan desa baru	Disetujui oleh kabupaten atas usulan desa	Diusulkan oleh kabupaten berdasarkan kondisi yang jelas (populasi minimum)
Badan Administrasi Desa	Terdiri atas kepala desa dipilih oleh warga desa, sekretariat desa dikirim oleh kabupaten, bendahara atau kepala kampung yang ditunjuk oleh kepala desa, dll	Terdiri atas kepala desa dipilih oleh warga desa, aparatur (sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, Pelaksana Teknis dan staf lainnya) yang ditunjuk oleh kepala desa
BPD	Anggotanya dipilih melalui diskusi desa. Kepala Desa dan BPD bekerja sama sebagai mitra. Diberlakukannya peraturan desa membutuhkan persetujuan BPD.	Anggota yang terpilih secara demokratis sebagai wakil desa berdasarkan zona desa. BPD mengawasi kepala desa. Diberlakukannya peraturan desa memerlukan kesepakatan antara kepala desa dan BPD
Dana pembangunan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber finansial desa itu sendiri 2. Bagi Hasil dari kabupaten/ kota 3. ADD dari kabupaten/ kota 4. Dukungan finansial dari propinsi/ kabupaten/ kota 5. Kontribusi dari pihak ketiga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber finansial desa itu sendiri 2. Bagi Hasil dari kabupaten/kota: setidaknya 10% dari pembagian pendapatan yang disediakan dari pemerintah pusat. untuk kab./ kota 3. ADD dari kabupaten/kota : setidaknya 10% dari uang yang ditransfer ke kabupaten 4. Dukungan finansial dari propinsi/ kabupaten/ kota 5. Kontribusi dari pihak ketiga 6. Dana Desa : 10% dari total uang yang ditransfer ke pemerintah daerah (prop./kab./kota) 7. Lainnya

Sumber: Berdasarkan undang-undang dan peraturan yang relevan

(4) Situasi Desa Saat Ini di Tahap Awal Alokasi Dana Desa

Satu tahun telah berlalu sejak berlakunya UU Desa, dan gelombang pertama dari pengalokasian Dana Desa dilakukan baru-baru ini. Tim Studi kemudian mengunjungi Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, dan Kab. Bantaeng dari Prop. Sulawesi Selatan, untuk mengamati situasi desa saat ini. Informasi yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

Organisasi Desa

UU Desa mengatur bahwa kepala desa dan anggota BPD yang pernah dipilih melalui pemilihan umum bisa menahan posisi mereka untuk periode sisa jangka waktu saat ini. Sejauh ini, aparat desa harus ditunjuk oleh kepala desa. Karena perubahan dalam penataan organisasi atau penempatan personil lama setelah berlakunya UU akan sulit untuk dilakukan secara langsung, struktur organisasi yang ada saat ini akan dapat dipertahankan di banyak lembaga pemerintahan desa hingga pada saat pemilu berikutnya.

Keuangan Desa

Keuangan desa diperkirakan sebagian besar berubah setelah alokasi Dana Desa, sedangkan tingkat perubahan akan berbeda tergantung pada kabupaten.

Pertama, sebagai pendapatan desa, desa 'A' dari Kab. Takalar, misalnya, hanya mendapat 132 juta rupiah yang bersumber dari ADD. Pada tahun 2015, desa akan menerima total 430 juta Rupiah (127 juta Rupiah [ADD] dan 320 juta Rupiah [Dana Desa]), yaitu sekitar 3,3 kali lebih dari 2014. Sementara itu, dalam kasus desa 'B' dari Kab. Jeneponto, desa hanya menerima 150 juta Rupiah dari ADD tahun 2014, sementara pada tahun 2015 akan menerima total 680 juta Rupiah (351 juta Rupiah [ADD], 310 juta Rupiah [Dana Desa] dan 21 juta Rupiah [Bagi Hasil] dari Kabupaten), yaitu sekitar 6,5 kali lebih dari 2014. Di sisi lain di Kab. Bantaeng, masing-masing desa telah menerima 500 ~ 900 juta Rupiah pada tahun 2014 sejak sebelum berlakunya Dana Desa. Jumlah alokasi akan menjadi 750 juta Rupiah ~ satu milyar Rupiah pada tahun 2015, yaitu sekitar 1.2 kali lebih banyak dari tahun sebelumnya tapi jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dua kasus lainnya. Seperti yang terlihat di atas, jumlah alokasi Dana Desa per desa sebagian besar tidak terlalu bervariasi tergantung pada Kabupaten, tetapi jumlah dana yang dialokasikan ke desa berbeda tergantung pada Kabupaten. Lebih sedikit bagian dari ADD dan Bagi Hasil itu, lebih besar pula perubahan yang diharapkan dalam total dana alokasi. Diantara ketiga Kabupaten ini hanya Bantaeng yang benar-benar menerima Dana Desa pada akhir Juni 2015.

Adapun untuk pengeluaran, di sisi lain, dokumen anggaran desa jelas mengatakan bahwa Dana Desa telah membawa peningkatan anggaran untuk pembangunan lembaga administrasi desa. Di desa 'A', misalnya, sebagian besar ADD dihabiskan untuk biaya personil dan juga subsidi untuk lembaga desa, hampir tidak digunakan untuk program-program pembangunan. Namun demikian, pada tahun 2015, perkiraan biaya untuk program pembangunan desa seperti perbaikan fasilitas drainase/ penataan ruang rapat dan pembangunan kapasitas, diharapkan dari Dana Desa. Demikian juga, Desa 'B' meng-estimasi bahwa pengeluaran untuk anggaran tahun 2015 termasuk biaya untuk perbaikan drainase, jalan, kantor desa, dan pelatihan bagi kepala dusun dan anggota BPD, perbaikan infrastruktur higienis, dll.

Rencana pembangunan desa¹⁸ dan kapasitas untuk pelaksanaan

Sejak tahun 2011, di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto sudah ada bantuan dari proyek ACCESS (oleh AusAID yang dulu). Dengan bantuan ini, kedua desa 'A' dan 'B' telah merumuskan RPJMDesa. Program pembangunan berdasarkan Dana Desa akan dilaksanakan sejalan dengan program yang tercantum dalam RPJMDesa. Terkait dengan kenaikan dana dan tanggung jawab untuk pembangunan itu, tampaknya kepala desa dari kedua desa mengakui kurangnya kapasitas pelaksanaan, tetapi tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Sebenarnya, mereka tampak bahagia akan kemampuan mereka melaksanakan program pembangunan perdesaan yang diusulkan oleh penduduk desa melalui Musrenbang tetapi meninggalkan yang belum terealisasi akibat ketidakcukupan dana. Mereka juga melihat bahwa adanya kerjasama dengan Kabupaten, Kecamatan, desa dan lembaga desa, bisa saling melengkapi untuk kurangnya kapasitas dalam pelaksanaan program.

Di sisi lain, kepala Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, yang mengadministrasikan desa 'A', cemas tentang kurangnya kapasitas desa untuk mengoperasikan/ monitor/ evaluasi Dana Desa, dan bersikeras perlunya

¹⁸ Dikatakan bahwa karena Peraturan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2007 dan dengan bimbingan teknis Tahun 2010, RPJMDesa dan RKPDes dirumuskan di 5.000 desa, juga dengan bantuan oleh Program PNPM-Pedesaan, dll.

peningkatan kapasitas. Dia juga menyebutkan perlunya diseminasi/ pelatihan di desa-desa untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintahan desa.

(5) Kebutuhan Peningkatan Kapasitas untuk Pemerintah Daerah

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dari Kementerian Dalam Negeri merencanakan tiga langkah pelatihan untuk pejabat publik otonomi daerah di tengah kekhawatiran tentang kurangnya kapasitas lembaga pemerintahan desa: 1) Pelatihan untuk dosen perguruan tinggi negeri pejabat pemerintah provinsi/ pusat untuk membuka 317 pelatih ahli, 2) TOT untuk petugas Kabupaten/ Kota untuk membentuk 2.165 pelatih, dan 3) Pelatihan untuk kepala desa, sekretaris desa dan bendahara dari 74.093 Desa (total peserta sebanyak 222.279) dan staf petugas kecamatan (total peserta sebanyak 14.100). 1) dan 2) dilaksanakan di Jakarta sementara 3) di masing-masing Kabupaten dibawah tanggung jawab Propinsi. Anggaran untuk tahun 2015 telah dipastikan (596,4 miliar Rupiah). Kurikulum pelatihan mencakup 1) Peraturan desa yang diatur dalam UU Desa, 2) Pembangunan desa, 3) Penganggaran, dan 4) Manajemen, dll. Modul pelatihan untuk tiga langkah pelatihan di atas saat ini sedang dikembangkan dengan bantuan oleh KOMPAK, bantuan dari DFAT/ Australia. KOMPAK juga membantu pelaksanaan 1) di atas. Rangkaian pelatihan diumumkan untuk dimulai segera dengan skala penuh. Namun beberapa orang di Kementerian Dalam Negeri juga bertanya-tanya, sejauh mana pelatihan dapat dilaksanakan dalam tahun 2015.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan dilaporkan menyiapkan kurikulum untuk peningkatan kapasitas aparat desa dan pelaksanaannya, di Kursus Keuangan Daerah (KKD) untuk aparat tingkat propinsi/ kabupaten, yang selama ini telah dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada.

Di tingkat kabupaten, lokakarya untuk menginformasikan tentang UU Desa telah diterapkan di Kab. Takalar, Kab. Jeneponto dan Kab.Bantaeng, dll. Ini diharapkan akan diikuti oleh program peningkatan kapasitas yang akan dilakukan untuk para aparat desa di berbagai lokasi.

BAB 3. Tinjauan Bantuan JICA di Sektor Pengembangan Daerah

Indonesia telah berubah ke sistim desentralisasi sejak tahun 2000. Bab ini selanjutnya merangkum dua program bantuan JICA untuk pengembangan daerah di Indonesia, khususnya, Program Pengembangan Daerah di Sulawesi Selatan dan Program Pengembangan Daerah di Indonesia Bagian Timur Laut (3-1). Proyek proyek JICA yang terkait dengan pelatihan para fasilitator pengembangan daerah (3-2, 3-3) dan proyek pengembangan daerah untuk pengurangan kemiskinan (3-4) juga ditinjau ulang guna memahami situasi terkini dan permasalahan permasalahan beberapa tahun sesudah pelaksanaan proyek/ program tersebut.

3-1 Pengembangan Wilayah Sulawesi Selatan dan Pengembangan Kawasan Timur Laut

(1) Latar Belakang Dukungan Pengembangan Wilayah di Indonesia

Melihat transisi dalam program dukungan JICA di Indonesia (1985-2005), meskipun kecenderungan titik berat ke wilayah Jawa-Bali pada dasarnya tidak berubah, sejak tahun 1990-an titik berat di wilayah Sumatera lalu programnya beralih ke wilayah Sulawesi, sehingga ada saat di mana penekanannya beralih dari wilayah Jawa-Bali ke wilayah Sulawesi atau kawasan timur laut. Di tengah masa desentralisasi di Indonesia, JICA melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah supaya membantu untuk menghubungkan pemerintah provinsi dan kabupaten serta masyarakat, maka hal ini dinilai positif oleh pihak Indonesia. Dalam situasi kebanyakan donor cenderung berfokus pada dukungan untuk reformasi aspek kelembagaan di tingkat pusat atau LSM/ komunitas di tingkat masyarakat¹⁹, Jepang menekankan penguatan kapasitas administrasi pemerintah daerah, melalui mendukung untuk membuat mekanisme yang menghubungkan pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Demikian JICA telah mengambil pendekatan yang tidak sama dengan dukungan donor lainnya, maka bisa diakui bahwa JICA dan donor lainnya saling membantu/ melengkapi demi pengembangan wilayah di Indonesia²⁰.

Masuk abad ke-21, berdasarkan pada kecenderungan internasional seperti DAC yang mengumumkan bahwa harus lebih meningkatkan efektivitas bantuan, JICA mempromosikan pendekatan program dengan mengkombinasi skema dukungan seperti studi *masterplan*, proyek kerjasama teknis dan proyek pinjaman dana, agar memunculkan dampak sinergi melalui pelaksanaan program. Berdasarkan konsep tersebut, dengan menanggapi kebutuhan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah yang sesuai dengan pengurangan kesenjangan ekonomi timur-barat dan penguatan Otonomi Daerah, dalam rangka mewujudkan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan daerah, JICA merancang dan melaksanakan dua program pengembangan wilayah di kawasan timur di Indonesia, yaitu: Program Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (2006-2015) dan Program Pengembangan Kawasan Timur Laut (2007-2015). Kedua program ini merupakan program bantuan negara ke negara dari Jepang untuk Indonesia yang diprioritaskan sebagai pendekatan pada "pembentukan masyarakat yang adil dan demokratis" yang menanggapi "penanggulangan kemiskinan" yang merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan Indonesia²¹.

¹⁹ Pada Evaluasi menurut Tema Penguatan Kapasitas pemerintah daerah, permasalahan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitasnya dibagi empat yaitu i) kerangka dan sistem administrasi daerah, ii) sistem pengelolaan keuangan, iii) memperkuat kapasitas pegawai pemerintah daerah, iv) pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien dari pemerintah daerah, diantaranya berfokus pada iii) dan iv), sementara pendekatan pada sistem i) dan ii) dikatakan hampir tidak terlihat.

²⁰ Laporan evaluasi Kementerian Luar Negeri (2005).

²¹ Laporan evaluasi akhir PRIMA-K (2011).

(2) Program Pengembangan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan

Garis Besar Program

Dalam rangka memajukan pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah pusat ekonomi dan perdagangan di Kawasan Timur Indonesia, Program Pengembangan wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dirancang dengan maksud untuk mendorong pengembangan seluruh wilayah propinsisecara komprehensif²². Program ini terdiri dari tiga sub-program, yaitu: A) Sub-program PembangunanWilayah Perkotaan, (2) Sub-program Promosi Ekonomi yang seimbang di Seluruh Wilayah, dan (3) Sub-program Promosi Pengembangan Sosial.

Di bawah ini ditunjukkan proyek dan studi yang dirumuskan menurut sub-program²³.

A) Sub-program Pembangunan Perkotaan

- Studi Rencana Terpadu PengembanganWilayah Metropolitan Mamminasata di Propinsi Sulawesi Selatan (2005~2006)
- Proyek Pembangunan Metropolitan Mamminasata yang Ramah Lingkungan (proyek kerjasama teknis) (2009~2011)
- Proyek Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Metropolitan Mamminasata (proyek kerjasama teknis) (2012~2014)
- Proyek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah di Metropolitan Mamminasata (proyek kerjasama teknis) (2012~2014)
- Proyek Pengelolaan Sampah diMetropolitan Maminasata (Proyek pinjaman dana) (2010~2014)

B) Sub-program Promosi Ekonomi yang Seimbang di Seluruh Wilayah

- Proyek Pengembangan Industri Lokal di Propinsi Sulawesi Selatan (proyek kerjasama teknis) (2009~2011)

C) Sub-program Promosi Pengembangan Sosial

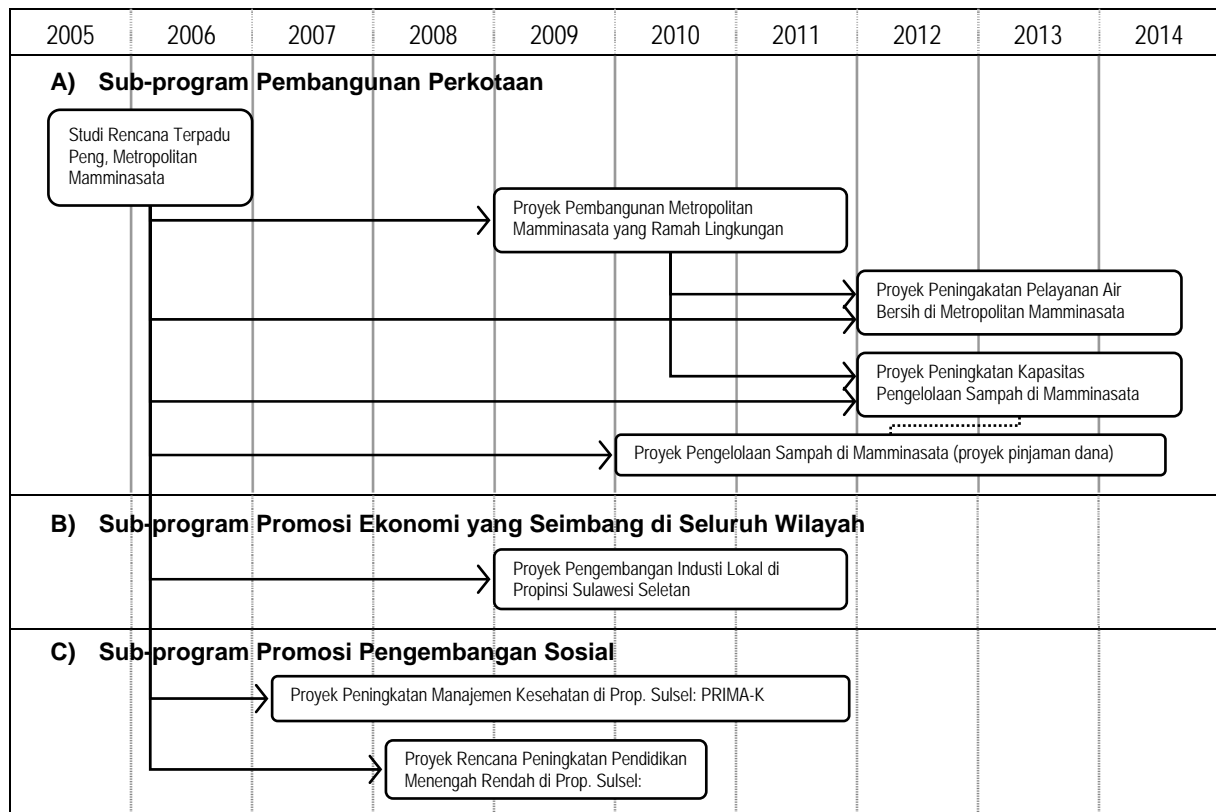
- Proyek Peningkatkan Kapasitas Manajemen Kesehatan di Propinsi Sulawesi Selatan: PRIMA-K (proyek kerjasama teknis) (2007~2011)
- Proyek Rencana PeningkatanPendidikan Menengah Rendah di Propinsi Sulawesi Selatan: PRIMA-P (proyek kerjasama teknis) (2008~2010)

Gambar 3-1 menunjukkan 8 proyek di atas menurut urutan masa pelaksanaan. Dari gambar ini, diakui bahwa Program Pengembangan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan dengan program-program yang dirumuskan berdasarkan hasil dari Studi Rencana Terpadu Pengembangan Wilayah Metropolitan Mamminasata di Propinsi Sulawesi Selatan²⁴. Dengan begitu, melalui Studi Rencana tersebut kondisi dan isu yang berada di wilayah sasaran saat itu dipahami, lalu tantangan dalam pengembangannya ditentukan kemudian proyek/ studi dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk setiap tantangan.

²² Dari tahun 1960-an hingga tahun 2000-an ada 50 proyek yang telah dilaksanakan JICA di Propinsi Sulawesi Selatan.

²³ Periode pelaksanaan setiap proyek merupakan masa yang ditetapkan pada saat pengembangan program,yang kemungkinan berubah pada saat pelaksanaannya.

²⁴ Studi berakhir di September 2006, setelah itu samapai bulan Maret 2007 dilaksanakan pengiriman tenaga ahli untuk menindaklanjuti hasil studi, untuk membentuk proyek pinjaman dana dalam pengelolaan sampah.



Sumber: Tim Studi JICA

Gambar 3-1 Arus Pelaksanaan Proyek-proyek yang dilaksanakan dalam Program Pengembangan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan

Penilaian Program

Untuk Program Pengembangan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, pada waktu tahap awal dimulai tahun 2006 evaluasi program dilakukan oleh bidang evaluasi JICA. Inti dari hasil evaluasi ini dijelaskan seperti berikut.

- Program saat ini dikembangkan sesuai dengan strategi pembangunan propinsi (RENSTRA), yang bertujuan untuk pengembangan daerah yang berkeseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan social. Diakui strategis maka diharapkan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Namun demikian, karena rencana proyek maupun skala proyek yang saat ini terlihat tidak cukup besar/ signifikan, maka tingkat kontribusi dari pelaksanaan Program ini dinilai terbatas.
- (Karena kebanyakan proyek dalam Program ini adalah proyek kerjasama teknis) diharapkan Program ini berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas instansi-instansi pemerintah untuk jangka panjang, seperti misalnya penguatan lembaga pemerintah daerah, dukungan desentralisasi, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sebagainya.

Meskipun Program ini berakhir pada tahun 2012²⁵, di sini, diangkat dua proyek sebagai contoh yang pola/model kegiatannya diakui terus dilakukan/ diterapkan sampai saat ini, yaitu: Proyek Pengembangan Industri Lokal dan PRIMA-K, dimana kondisi masing-masing saat ini bisa dijelaskan sebagai berikut.

²⁵ Kecuali beberapa proyek yang diperpanjang.

- Pembuatan rencana induk pengembangan wilayah metropolitan Mamminasata secara resmi diadopsi sebagai sebuah pembangunan kota metropolitan dengan Keputusan Presiden No. 55 tahun 2011, dimana 11 program prioritas²⁶ diidentifikasi. Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata (BKSPMM) terdiri dari kepala kepala eksekutif dari satu kota dan tiga kabupaten di kawasan yang menjadi target wilayah metropolitan dan wakil Gubernur propinsi Sulawesi Selatan. Unit teknisnya, yang ditempatkan di Direktorat Tata Ruang dan Pemukiman, bertugas memantau program program tersebut dan mengkoordinasikan kepentingan para pemangku kepentingan sebagaimana diperlukan. JICA membantu mendorong penggunaan sistim ini dari tahun 2009 hingga 2012 melalui suatu proyek kerjasama teknis “*Enhancement of Urban Development Management in the Mamminasata Metropolitan Area*”. Akan tetapi, pelaksanaan program prioritas tersebut di atas tertinggal 2~3 tahun dari jadwal. Alasan utama keterlambatan tersebut adalah propinsi atau kabupaten/kota telah terlambat dalam proses perolehan lahan. Di samping itu, terkait rencana pembangunan sebuah pusat pembuangan akhir untuk kawasan tersebut, suatu tempat dimana akan dibangun pusat pembuangan sudah ditetapkan dengan persetujuan Bupati dari kabupaten yang menjadi target. Tetapi, persetujuan tersebut dibatalkan dan ditunjuk suatu tempat lain. Direktorat Cipta Karya, PUPR, yang bertanggungjawab membantu/ mengarahkan rencana itu hampir tidak menerima keadaan ini. JICA juga mengalami kesulitan meneruskan bantuannya walaupun hal itu sudah direncanakan dan setuju untuk membantu dari aspek keuangan termasuk pengeluaran bangunan,
- Proyek Pengembangan Industri Lokal di Propinsi Sulsel, di bawah kerjasama industri-pemerintah-akademisi, telah mendukung pembentukan kelembagaan dan kebijakan untuk mempromosikan strategi merek, penguatan sistem dukungan dan pola kegiatan untuk pengembangan produk ciri khas daerah (mis. sirup markisa bebas aditif, coklat yang menggunakan 100% kakao dari Sulawesi, produk sutra dengan pewarna alami, dll.) dan menghasilkan prestasi seperti pembukaan toko antena untuk tujuan promosi penjualan produk (sebagai proyek bersama antara pemerintah pusat dan propinsi). Proyek ini berakhir awal 2012, dan satu tahun kemudian melalui masa persiapan, dengan berdasarkan model aktivitas proyek di propinsi tersebut, memulai melaksanakan sebuah proyek baru pada tahun 2014 untuk memperkuat pelayanan bagi IKM. Proyek ini sedang berjalan dengan melibat beberapa kabupaten sebagai daerah percontohan dimana kerjasama stakeholder untuk pengembangan serta pemasaran produk ciri khas daerah didukung untuk meningkat,
- PRIMA-K dikembangkan di tiga kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan pada tahap I. Di Kabupaten Bulukumba yang dikunjungi selama studi lapangan tahap pertama, pada saat itu meskipun sistem dan metode kegiatan diubah bentuknya tetap dilaksanakan dan bisa dilihat bahwa pemerintah kabupaten tetap terus menyediakan anggaran dalam bentuk ADD untuk kegiatan peningkatan kesehatan. Di daerah lainnya tidak diketahui bagaimana keadaannya sehingga meskipun perlu diadakan peninjauan, amun Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa “tergantung kepada sikap dan pandangan masing-masing pemerintah daerah”. Kementerian Kesehatan sejak tahun 2006 melaksanakan Program Desa Siaga di seluruh Indonesia yang model kegiatan dibuat dalam PRIMA-K bisa diterapkan atas keinginan/ prakarsa masing-masing daerah. Demikian, PRIMA-K diperkenalkan dalam kegiatan yang dilaksanakan Desa Siaga, tetapi PRIMA-K sendiri tidak dilaksanakan atas inisiatif Kemenkes.

²⁶ *Center Point of Indonesia*, Pembangunan Kawasan Industri, Pembangunan Kota Baru, Peningkatan Jaringan Jalan, Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Air Limbah, Kosnervasi Pantai di Takalar, Pembangunan Perkotaan Kampus Gowa, Pembangunan TPA Regional, Peningkatan Penyuplaian Air Minum, Peningkatan Jaringan Drainase, Promosi Penghijauan.

(3) Program Pengembangan Kawasan Timut Laut

Garis Besar Program

Program Pengembangan Kawasan Timur Laut dilaksanakan di 8 propinsi yaitu 6 propinsi ada di pulau Sulawesi ditambah Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mempromosikan pengembangan atas inisiatif masing-masing daerah yang telah ditargetkan dalam kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, melalui melatih tenaga administrasi yang bertanggung jawab pada pengembangan daerah dari target 8 propinsi, berdasarkan prestasi dan pengalaman yang berkaitan dengan pengembangan daerah dan pembangunan perdesaan yang telah dijalankan oleh JICA. Program ini terdiri dari empat sub-program, yaitu: A) Sub-program Peningkatan Kemampuan Pengembangan Daerah, B) Sub-program Pembangunan Jaringan Infrastruktur Ekonomi, C) Sub-program Pengembangan Daerah berdasarkan Karakteristik Daerah, dan D) Sub-program Dukungan Pengembangan Daerah Lain²⁷. Proyek-proyek menurut sub-program adalah sebagai berikut.

A) Sub-Program Peningkatan Kemampuan Pengembangan Daerah

- Proyek Peningkatan Kapasitas Pengembangan Wilayah Sulawesi: CDP (2007~2012)
- Proyek Pembangunan Fakultas Teknik Universitas Hasanudin (2007~2013)
- Proyek Penguatan Fakultas Teknik Universitas Hasanudin (2008~2017)

B) Sub-Program Pembangunan Jaringan Infrastruktur Ekonomi

- Studi Pengembangan Jalan Raya di Pulau Sulawesi (2006~2008)
- Studi Pengembangan Daya Listrik Optimal di Pulau Sulawesi (2007~2008)
- Rencana Rehabilitasi Jembatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (2008~2011)

C) Sub-Program Pengembangan Daerah berdasarkan Karakteristik Daerah

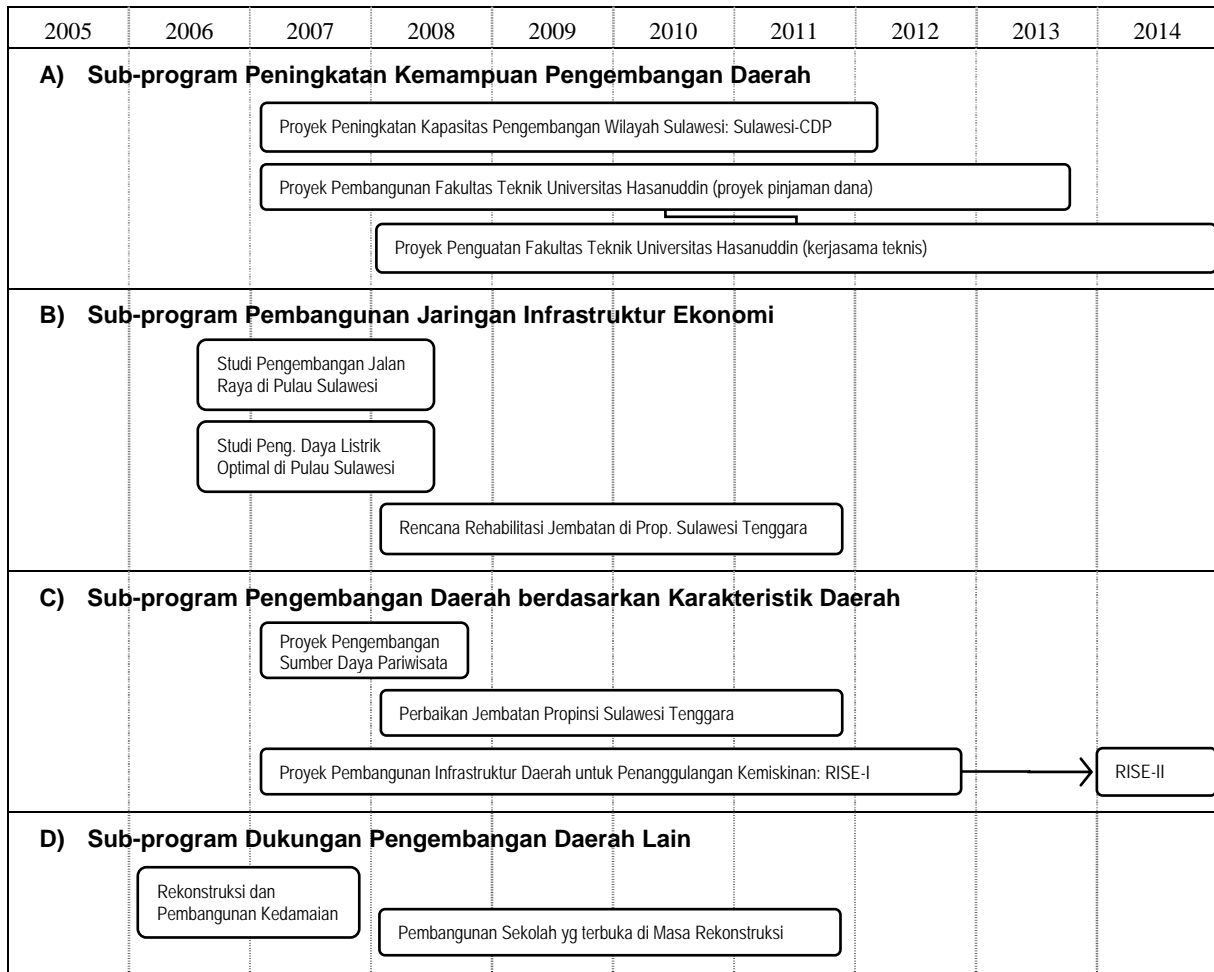
- Proyek Pengembangan Sumber Daya Pariwisata (2007~2008)
- Proyek Perbaikan Jembatan Propinsi Sulawesi Tenggara (2008~2011)
- Proyek Pembangunan Infrastruktur Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan: RISE-I (2007~2012)
- Proyek Pembangunan Infrastruktur Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan: RISE-II (2014~2016)

D) Sub-Program Dukungan Pengembangan Daerah Lain

- Proyek Bantuan Rekonstruksi dan Pembangunan Kedamaian Maluku (2006~2007)
- Proyek Pembangunan Sekolah yang terbuka untuk Daerah di Masa Rekonstruksi (2008~2011)

Gambar 3-2 dengan cara yang sama dengan yang dilakukan pada Program Pengembangan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan 10 proyek di atas menurut urutan masa pelaksanaan.

²⁷ Periode pelaksanaan setiap proyek yang dicatat di setiap proyek ditentukan pada tahap perancangan program, yang dalam kenyataannya berbeda. Sementara itu, proyek pembangunan infrastruktur daerah untuk penanggulangan kemiskinan (RISE I, II) pada awalnya tidak termasuk di Program Pengembangan Kawasan Timur Laut dan ditambahkan kemudian.



Sumber: Tim Studi JICA

Gambar 3-2 Arus Pelaksanaan Proyek-proyek yang dilaksanakan dalam Program Pengembangan Kawasan Timur Laut

Program Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan atas studi tentang Mamminasata, sebagai titik awal, yang mengembangkan baik proyek kerjasama teknis maupun proyek pinjaman dan secara sistematis untuk mengatasi persoalan/ tantangan yang telah diidentifikasi di dalam studi tersebut. Sementara itu, Program Pengembangan Kawasan Timur Laut tidak terlihat sistematis di antara sub-program maupun di antara proyek lunaknya, kecuali kaitan antara Proyek Pembangunan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan Proyek Kerjasama Teknis untuk Penguatan Fakultas Teknis tersebut²⁸.

Penilaian Program

Evaluasi terkait Program Pengembangan Kawasan Timur Laut tidak diadakan. Dengan melihat hasil evaluasi yang diadakan di setiap akhir proyek, dicoba menelaah hasil serta kelanjutannya. Di sini di antara proyek-proyek yang telah dilaksanakan, Proyek Peningkatan Kemampuan Pengembangan Daerah (CDP) dan Proyek Penguatan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin menjadi fokus utama dan keadaan terkini diringkaskan sebagai berikut.

²⁸ Pada saat pelaksanaan RISE-I ada kenyataan bahwa fasilitator CDP pernah mengikuti pelatihan fasilitator RISE. Namun begitu, ini bukan pelaksanaan di bawah sistem program pengembangan daerah Indonesia timur laut tetapi diakui sebuah kerjasama antara masing-masing proyek.

- Proyek Peningkatan Kemampuan Pengembangan Daerah dilaksanakan selama 3 tahun sejak tahun 2007 dan lalu diperpanjang 2 tahun hingga tahun 2012. Setelah masa pelaksanaannya diperpanjang, pada tahun 2012 didirikan sebuah lembaga yang disebut COMMIT (singkatan dari *Community Initiatives for Transformation*) yaitu suatu lembaga persatuan yang anggotanya telah ikutserta dalam proyek JICA. Lembaga tersebut mengadakan rapat satuan tugas secara rutin dan melakukan pertemuan tukar pendapat dengan instansi pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) atau melalui kerjasama dengan BaKTI (Bursa Kawasan Timur Indonesia) meneliti tentang penyebaran teknik fasilitasi pembangunan partisipatif yang dikembangkan dalam proyek tersebut. Selain itu, secara aktif menerima kunjungan studi atau kelompok siswa pelatihan yang datang baik dari luar negeri (mis. Afghanistan, Bhutan, Myanmar) maupun dari daerah lain (Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Timur dan Maluku). Pada akhir masa pelaksanaan proyek, menjawab permintaan dari RISE yang juga berjalan sebagai salah satu proyek dari Program Pengembangan Kawasan Timur Laut, COMMIT juga memberikan pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator yang bertugas di RISE (pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator dari Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan kegiatan percontohan, pelatihan peningkatan kemampuan pejabat pemerintah daerah dan pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator di tiga kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan, dan pelaksanaan lokakarya evaluasi bersama).
- Pada Proyek Penguatan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Tahap I, bantuan teknis diberikan untuk meningkatkan kemampuan penelitian dengan laboratorium, agar arah pendidikan universitas berubah dari kecenderungan mendapat pengetahuan ke berpusat pada penelitian. Kemudian, menanggapi bahwa telah dilakukan relokasi kampus dan dibangun fasilitas fakultas teknik baru dengan proyek pinjaman dana, Proyek Penguatan Fakultas Tahap II dimulai di Maret 2015 dengan tujuan untuk memperkuat kolaborasi dengan industri lokal melalui memanfaatkan Center of Technology yang tersedia sebagai fasilitas baru yang diinginkan menjadi pusat kolaborasi industri daerah.

3-2 Pembangunan Desa dan Pelatihan Fasilitator

(1) Pembangunan Desa dan Peran Fasilitator

Di Indonesia ada dua macam desa yaitu desa alami (Desa Adat) dan desa pemerintahan (Desa). Definisinya yang pertama adalah desa yang lahir secara alami dan tata kelola komunitasnya secara tradisional dari kebiasaan, sedangkan yang kedua adalah komunitas yang tata kelolanya di bawah sistem pemerintahan daerah yang ditentukan pemerintahan negara.

Merujuk ke Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diberlakukan pada tahun 2004, di tingkat desa juga dibentuk dewan (Muslembang). Hal ini bisa dipahami sebagai upaya untuk menyamakan tata kelola tradisional dari kebiasaan dengan tata kelola yang melembaga secara modern. Sementara itu Undang-undang Desa yang dilaksanakan sejak tahun 2014 nampak dimaksudkan untuk memajukan desentralisasi yang telah dimulai tahun 1999 melalui penguatan dan peningkatan kapasitas otonomi di tingkat desa. Untuk mewujudkan tujuan dari kedua undang-undang tersebut, fasilitator (pendamping desa) diharapkan bertugas mengatur di lapangan di desa dengan memainkan peranan yang besar^{29,30}.

²⁹ Keadaan administrasi desa/ desa adat di Indonesia dijelaskan dengan rinci dalam laporan penelitian “Mekanisme pembentukan organisasi masyarakat di wilayah pedesaan di Asia” (Pusat Penelitian Ekonomi Asia: JETRO), tentunya di “Bab 4. Sistem masyarakat wilayah dan perilaku organisasi warga di Indonesia”.

Selama ini di banyak pembangunan desa, untuk melancarkan berbagai proyek yang dilaksanakan pemerintah, ada fasilitator yang dipekerjakan di setiap proyek. Para fasilitator yang memahami kebutuhan penduduk dan mendukung dalam meningkatkan kapasitas atau menanggulangi permasalahan yang dihadapi daerah, lebih cenderung ditempatkan untuk tujuan melancarkan proyek yang dilaksanakan oleh lembaga yang mengirimnya, sehingga banyak yang tidak berhubungan langsung dengan masalah substansial. Oleh karena itu penduduk desa lebih banyak melihat fasilitator sebagai “orang yang membawa bantuan dari pihak luar”.

Di sisi lain, fasilitator pengembangan desa partisipatif, seperti dukungan JICA, mendukung kebijakan rencana kegiatan berbasis masyarakat. Mereka mendukung penduduk untuk mengerjakan sendiri serangkaian proses yaitu penggalan masalah → kebijakan perencanaan → pendanaan → pelaksanaan → monitoring dan evaluasi → modifikasi rencana/ rencana berikutnya³¹.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Desa, keberadaan fasilitator yang mendukung desa dalam penguatan pemerintahan dan peningkatan kapasitas otonomi tidak bisa dilepaskan karena kemampuan fasilitasi partisipatif sangat dibutuhkan.

(2) Silsilah Pelatihan Fasilitator JICA

Pelatihan fasilitator binaan JICA, dimulai dari *Project for Strengthening Sulawesi Rural Community Development to Support Poverty Alleviation* (Februari 1977- Februari 2002). Proyek ini memberikan pelatihan fasilitator pembangunan desa berdasarkan metode PLSD (*Participatory Local Social Development*)³². Sistem dukungan pembangunan masyarakat (SISDUK) di mana fasilitator tingkat desa berperan dikembangkan di Kabupaten Takalar melalui pelaksanaan pelatihan.

Kemudian, BAPPENAS, sebagai *counterpart* pelaksanaan Proyek Pengembangan Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) (Desember 2003~Desember 2006) mengadakan pelatihan fasilitator berskala nasional. Pelatihan ini menargetkan ke ikutsertakan sekitar 300 orang baik dari LSM maupun instansi pemerintah daerah di 10 propinsi di kawasan Timur Laut, dengan tujuan agar pesertanya bisa mendapatkan metode pendukung untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (pemberdayaan masyarakat). Materi pelatihan yang semakin sulit dilakukan secara bertahap (lihat indikator di bawah) dan pada akhirnya 7 orang menerima sertifikat sebagai *master fasilitator*.

³⁰ Dari wawancara dengan profesor Darmawan Universitas Negeri Hasanuddin.

³¹ Menurut profesor Darmawan, dari bidang fungsionalnya fasilitator dibagi antara fasilitator masyarakat (CF: *Community facilitator*) dan fasilitator program (PF: *Program facilitator*). CF menitik beratkan pada fasilitasi partisipatif yang menggali kebutuhan masyarakat dari dalam (menentukan masalah, mempertimbangkan solusinya, melaksanakan usulan rencana pembangunan). Sedangkan PF melaksanakan fasilitasi dan pemantauan guna melancarkan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pihak luar, yaitu instansi pemerintah dll. di tingkat pedesaan. Menurut profesor fasilitator yang dilatih oleh JICA melalui PKPM maupun CDP didefinisi sebagai CF yang punya kekuatan dalam fasilitasi partisipatif tetapi kemampuan manajemen relatif lemah dibandingkan dengan PF.

³² Teknik PLSD dikembangkan di Pusat Pengembangan Wilayah PBB di Nagoya. *Project for Strengthening Sulawesi Rural Community Development to Support Poverty Alleviation* mendapat bimbingan dari dosen (Mr. Ohama) dari *Nihon Fukushi University*.

Indikator Pemberdayaan Masyarakat dalam Proyek PKPM

- 1) Masyarakat bisa menjelaskan sumberdaya yang ada di wilayah sendiri dan cara penggunaannya
- 2) Masyarakat mengetahui kegiatan apa yang dijalankan dan bagaimana solusinya.
- 3) Masyarakat memahami visi, masalah, analisa tantangan dan apa yang diperlukan dalam menanggulangnya.
- 4) Masyarakat bisa memikirkan tujuan, target, hasil yang harus dicapai, kegiatan, anggaran dan periode yang diperlukan.
- 5) Masyarakat mempunyai rencana pemeliharaan dan pengelolaan berkaitan dengan kegiatan yang dijalankan sendiri.
- 6) Masyarakat mengetahui apa yang bisa dikerjakan sendiri dan apa yang harus dibantu oleh pihak luar.
- 7) Masyarakat memahami peran orang terkait yang bekerjasama.
- 8) Masyarakat bisa menggunakan teknologi dan pengetahuanyang baru melalui bekerja sama dengan stakeholder.

Sumber: Materi Proyek PKPM

Sejajar dengan PKPM, dilaksanakan *Project for Human Resource Development for Local Governance* (Phase-II) (April 2005~Maret 2007). Proyek ini terdiri dari tiga komponen pelatihan yang diberikan untuk pegawai kabupaten, yaitu: i) Pelatihan peningkatkan kapasitas kepala kecamatan (pelatihan praktek: pegawai pemerintah propinsi yang telah mengikuti pelatihan pada tahap pertama menjadi pelatih yang memberikan pelatihan kepada camat), ii) Pelatihan reformasi kepala kecamatan (memperlancar transfer kewenangan dari pemerintah kabupaten ke camat), dan iii) Pelatihan *Good Governance* (pelatihan praktek: pegawai pemerintah kabupaten merumuskan rencana aksi dan melaksanakan kegiatan percontohan).

CDP yang dilaksanakan di Sulawesi berdasarkan metode dan hasil dari ketiga proyek tersebut, yaitu: i) Filosofi pengembangan daerah (PLSD) dan sistem (SISDUK), ii) Metode pelatihan (secara bertahap, sesuai dengan pengalaman dari PKPM), iii) Cara praktek (pelatihan untuk kepala kecamatan di Sumatera = penyusunan rencana aksi dan kegiatan praktek). Berdasarkan hal tersebut, pelatihan untuk pegawai BAPPEDA propinsi/ kabupaten maupun LSM diadakan. Promosi pembangunan daerah diadakan dengan mengikutsertakan masyarakat dengan menggalang peningkatan kemampuan dari fasilitator masyarakat (kebanyakan anggota LSM), petugas perencana (pegawai pemerintah), pejabat perancang kebijakan yang merupakan *stakeholder* pengembangan daerah. Pelatihan ini bertujuan membangun daerah yang berkesinambungan dengan partisipasi masyarakat bukan bertujuan untuk mendekati sektor tertentu maupun untuk mencari penyelesaian masalah pembangunan tertentu.

Berlawanan dengan arus tersebut di atas, pelatihan bagi fasilitator yang sifatnya untuk mendekati sektor tertentu maupun untuk mencari penyelesaian masalah pembangunan juga diadakan. Pelatihan ini dilaksanakan pada proyek peningkatan kapasitas manajemen kesehatan daerah (disebut PRIMA-K) yang merupakan bagian dari Program Pengembangan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. PRIMA-K, dilaksanakan dengan pendirian tim yang terdiri dari pusat kesehatan desa dan pegawai administrasi desa. Timber sama masyarakat kecamatan dan kelurahan membentuk tim kesehatan yang mempromosikan rencana perbaikan lingkungan dan kesehatan desa dengan partisipasi masyarakat, dan dilaksanakan dengan tujuan memperbaiki indikator kesehatan.

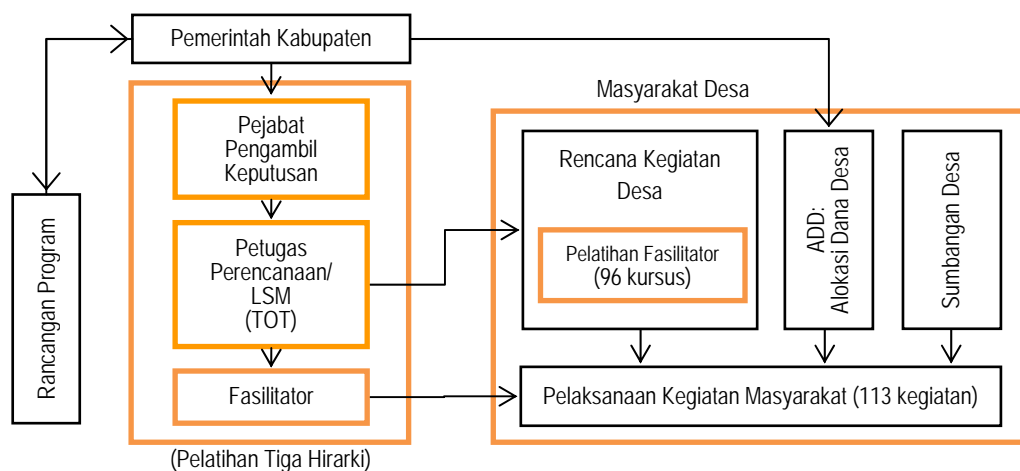
Pelatihan fasilitator pertama kali diadakan adalah untuk pelatih fasilitator (TOT) dalam bentuk proyek JICA. Kemudian, siswa pelatihan ini menjadi guru yang melatih fasilitator dengan metode kaskade. Pelatihan TOT dan pelatihan fasilitator ditargetkan untuk pegawai pemerintah seperti petugas perencanaan propinsi dan kabupaten BAPPEDA atau perawat di pusat kesehatan dan LSM serta pimpinan dari komunitas desa. Pelatih pelatihan TOT banyak yang berasal dari anggota proyek (ahli JICA) dan ahli profesional lokal yang bekerja di proyek (dosen dsb.) atau pejabat pemerintah propinsi. Buku pelajaran

untuk pelatihan pada prinsipnya menggunakan buku yang dibuat untuk proyek sehingga mendapatkan pelatihan melalui kegiatan yang sebenarnya, sambil mempergunakannya bisa merevisi isinya. Buku ini ada yang dalam bentuk manual dan adayang menampilkan kasus dari kumpulan contoh kasus. Karena bukunya terlalu tebal dengan banyak halaman tidak mudah dipahami, makaperlu waktu yang cukup untuk mempelajarinya, dilakukan bertahap dengan cara yang sesuai. Masa pelatihan biasanya 3 sampai 7 hari, namun pelatihan di CDP untuk melatih *pelatih* membutuhkan masa pelatihan relatif lebih panjang selama 22 sampai 35 hari dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan secara bertahap, mengikuti kursus dari beberapa kali kelasceramah termasuk diantaranya kegiatan praktek.

(3) Mekanisme CDP dan Peran Fasilitator

CDP bertujuan meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan supaya dapat membangun mekanisme kerjasama³³ dengan para pihak yang terlibat pengembangan daerah. Di propinsi di Sulawesi, pelatihan mengenai pembangunan secara partisipatif dilaksanakan untuk pemangku kepentingan baik dari propinsi maupun kabupaten dalam tiga tingkatan, yaitu: i) Pejabat pengambil keputusan, ii) Petugas perencanaan, dan iii) Fasilitator pemberdayaan masyarakat (anggota LSM, dll.), sehingga pengalaman yang sama dapat dibagi di antara pemangku kepentingan melalui pelaksanaan kegiatan percontohan (pilot).

Gambar 3-3 menunjukkan hubungan antara tiga hirarki pelatihan, pelatihan fasilitator dan kegiatan masyarakat. Pejabat pengambil keputusan mempunyai pengaruh besar dalam penyediaan anggaran yang diperlukan dalam pembuatan proyek atau kegiatan masyarakat. Maka akan sangat berarti dari segi keberlanjutan kegiatan di masa yang akan datang apabila mereka diikutsertakan dalam pelatihan sejenisnya walaupun masa pelatihannya terbatas. Pelatihan petugas perencana merupakan acara inti, yang sasaran utamanya adalah pegawai BAPPEDA (propinsi dan kabupaten), pegawai dinas kabupaten dan anggota LSM yang terkait. Pelatihan TOT menghasilkan sekitar 75 orang *trainer* yang menjadi pendukung dalam pembuatan rencana kegiatan dan pelatihan fasilitator di tingkat perdesaan. Mengenai fasilitator desa, CDP memberikan pelatihan baik secara langsung (melalui tiga hirarki) maupun tidak langsung (melalui TOT) yang masing-masing menghasilkan 300 orang dan 1.500 orang³⁴.



Sumber: Dibuat Tim Studi, berdasarkan laporan penilaian akhir mengenai CDP (2012).

Gambar 3-3 Mekanisme CDP dan Kedudukan Fasilitator

³³ Proses menentukan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya lokal (manusia dan alam) dalam rangka membangun daerah berdasarkan diskusi dan koordinasi antara pemangku berkepentingan.

³⁴ Pelatihan fasilitator di tingkat desa dilaksanakan terutama di Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan.

Pelatihan fasilitator di CDP terdiri dari 5 kursus (pembentukan jaringan manusia, penemuan masalah komunitas, kegiatan praktek, monitoring dan evaluasi). Bahan pelajarannya dibuat oleh Tim JICA (pada akhirnya dikembangkan sampai ke 21 macam) yang digunakan pada masa pelaksanaan pelatihan relatif panjang selama 22 hingga 35 hari terbagi dua masa pelatihan di antaranya dimasukkan kegiatan praktek.

(4) Mekanisme PRIMA-K dan Peran Fasilitator

Tahap I dilaksanakan di 3 kabupaten dengan melibatkan 11 kecamatan dan 124 desa, kemudian Tahap II juga diadakan di 3 kabupaten yang sama dengan Tahap I namun jumlah sasaran kecamatan dan desa diperluas hingga 33 kecamatan dan 366 desa. Tahap I diketahui ada hasil dan tantangan seperti tertulis di bawah ini, maka diikuti dengan Tahap II yang mengupayakan untuk mengalokasikan anggaran daerah yang cukup untuk melanjutkan model kegiatan proyek.

Hasil dan Tantangan PRIMA-K tahap I

Tahap I memberikan dukungan kepada kelompok kerja kesehatan (HWG) yang bertindak demi peningkatan kesehatan primer desa melalui pelayanan publik. Diakui, berdasarkan hasil evaluasi proyek, sebagai sebuah model efektif untuk peningkatan kesehatan primer yang menunjukkan hubungan antara komunitas yang bertindak secara partisipatif dan pemerintah yang membantu komunitas beraktif.

Namun demikian, perlu memperhatikan pada aspek anggaran dari segi keberlanjutan model tindakan bahwa dana bantuan (*block fund*) yang diberikan dari Proyek JICA sebaiknya digantikan dengan anggaran pemerintah daerah. Untuk itu, model tindakan Proyek JICA diharapkan agar disesuaikan/ dilemabagikan baik pada sistem anggaran pemerintah daerah maupun proses perencanaan pengembangan daerah yang berlaku di Indonesia.

(dikutip dari draf laporan evaluasi akhir PRIMA-K (2013))

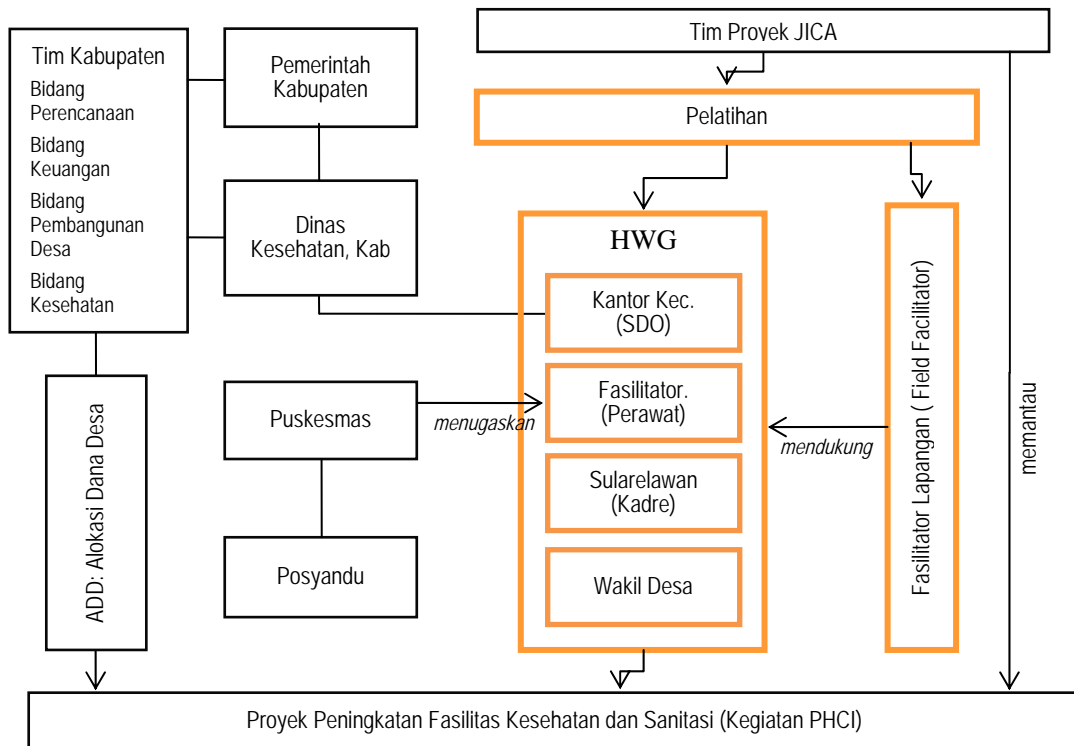
Tahap II dilaksanakan dengan menggunakan anggaran desa masing-masing tanpa memberikan dana bantuan dari Proyek. Kabupaten sasaran tetap tiga samaseperti tahap I namun jumlah desanya diperluas sampai semua desa yang berada di tiga kabupaten, maka jumlah fasilitator lapangan juga diperbanyakkan ke 33 orang supaya di setiap kecamatan ditempatkan satu orang fasilitator.

Sesudah Tahap II, bantuan tindak lanjut dilaksanakan selama setengah tahun dari Juni 2014, sehingga dapat didirikan sekretariat penerapan sistem PRIMA-K di tingkat Provinsi Sulsel. Dengan adanya sekretariat tersebut, direncanakan menerapkan sistem PRIMA-K di empat kabupaten tambahan selain tiga kabupaten yang telah diikuti terlibat. Namun demikian, penerapannya tidak berjalan sesuai dengan rencananya dikarenakan rendahnya kepemilikan/ tindakan di Dinase Kesehatan Pemprov Sulsel.

Mekanisme PRIMA-K dan kedudukan fasilitator lapangan ditunjukkan pada Gambar 3-4.

Pada pelaksanaan Proyek, di setiap desa dan kelurahan di kabupaten sasaran dibentuk kelompok kerja kesehatan (HWG: *health working group*) yang anggotanya mengikuti pelatihan untuk mendapatkan siklus kegiatan PHCI (*public health management capacity improvement*). HWG terorganisasi dari i) perawat puskesmas, ii) sukarelawan posyandu, iii) bidan desa (kadre) dan iv) wakil masyarakat, yang anggotanya menjalankan rencana kegiatan menurut siklus kegiatan PHCI. Pegawai bertugas baik di puskesmas (HC) maupun di kantor desa (SDO) yang mendapat tugas sebagai fasilitator, dan fasilitator lapangan yang direkrut oleh Proyek memberikan dukungan kepada HWG dalam pelaksanaan pelatihan di lapangan. Melalui kegiatan PHCI dibuat sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan masyarakat, seperti pasokan air ledeng, pengolahan limbah air secara sederhana, penggalian sumur, pemasangan tempat sampah, toilet umum, posyandu, dsb.

PRIMA-K melaksanakan juga pelatihan TOT untuk staf dinas kesehatan dan fasilitator lapangan. Kemudian siswa pelatihan TOT menjadi *trainer* dan memberikan pelatihan fasilitator bagi anggota HWG. Pelatihan fasilitator ini menggunakan materi pelajaran yang dibuat dalam Tahap I (petunjuk teknis, pedoman pelaksanaan proyek, pedoman lainnya, modul pelatihan perencanaan, manual pembuatan usulan PHCI, pedoman ADD) untuk mempelajari metode fasilitasi dan manajemen proyek (manajemen keuangan) selama tiga sampailima hari. Peserta lokakarya pembuatan usulan di Tahap II sebanyak 3.531 orang, dan peserta pelatihan fasilitator HWG berjumlah 447 orang.



Sumber: Dibuat Tim Studi, berdasarkan dokumen terkait dengan proyek

Gambar 3-4 Mekanisme PRIMA-K (Tahap-II) dan Kedudukan Fasilitator

3-3 Keadaan Saat Ini dan Tantangan Fasilitator yang dilatih oleh JICA

(1) Situasi dan Tantangan Fasilitator CDP

Setelah CDP berakhir, dalam rangka melanjutkan layanan fasilitasi demi perkembangan kegiatan partisipatif secara terus menerus, sebuah yayasan disebut COMMIT didirikan atas prakarsa dari *master facilitator* yang menjadi pengurusnya. Yayasan ini, memiliki anggota terdaftar 75 orang (fasilitator), hingga saat ini tetap melaksanakan pelatihan bagi pegawai pemerintah daerah (Propinsi Gorontalo, Kabupaten Wakatobi, Kota Baubau, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Sulawesi Tengah, dsb.) dan memberikan layanan fasilitasi kegiatan partisipatif yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah (Kabupaten Wakatobi, Kota Baubau, Kabupaten Konawe Utara, dsb.), dan jugamelayani proyek JICA lainnya melalui pelaksanaan pelatihan di negara ketiga (mis. Afghanistan, Bhutan, Myanmar).

Selain tersebut di atas, COMMIT pernah mendapat pengalaman dengan melaksanakan program pelatihan fasilitator pada tahun 2012 dalam kaitan dengan Proyek Pembangunan Infrastruktur Penanggulangan Kemiskinan (RISE) yang merupakan Sub-program dari Program JICA untuk Pembangunan Kawasan Timur Laut. Garis besar pelatihan fasilitator yang diberikan kepada RISE-I sebagai berikut:

Garis Besar Pelatihan Fasilitator RISE-I oleh COMMIT

Judul Pelatihan	: Pelatihan Tambahan untuk Fasilitator RISE
Masa Pelaksanaan	: Ronde Pertama; 10 hari, Ronde Kedua; 7 hari
Menu Pelatihan	: Pengumpulan Informasi, Wawancara, Teknik Fasilitasi, Manajemen Proyek
Peserta	: 40-45 orang Fasilitator dari Kab. Sinjai, Kab. Jeneponto, Kab. Enrekang, Tim Teknis Desa
Pelatih (<i>Trainer</i>)	: Fasilitator dari COMMIT (<i>Master Facilitator</i> berasal dari CDP)

Sumber: COMMIT

Sebagaimana tersebut di atas, fasilitator CDP melanjutkan kegiatan pelayanan fasilitasi sampai saat ini di bawah organisasi yang disebut COMMIT. Salah satu dari tujuh (7) fasilitator master yang telah berperan sebagai ahli di PKPM menjadi Sekretaris Jenderal COMMIT. Berkaitan dengan Program Dana Desa yang dijadwalkan mulai tahun fiskal 2015 di mana standar kualifikasi fasilitator akan diterapkan, diakui ada permasalahan terkait COMMIT dari sisi kedudukan publik dan tingkat keterampilan dari anggota terdaftar sebagai berikut:

- Diperkirakan bahwa SKKNI-FPM (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia - Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat: terdapat 18 kriteria terkait kualifikasi fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditentukan pada tahun 2012 atas SK Kemennakertrans) akan diterapkan pada perekrutan fasilitator dalam rangka pelaksanaan Program Dana Desa. Sehubungan dengan hal ini, ada kekhawatiran apakah fasilitator yang selama ini dilatih COMMIT/ JICA bisa memenuhi kriterianya sehingga mendapat kesempatan untuk bekerja di bidang pembangunan perdesaan,
- Terkait dengan hal tersebut, fasilitator COMMIT diakui masih kurang dalam kompetensi kerja administrasi/ rutin yang ditetapkan dalam SKKNI-FPM, termasuk kemampuan pengelolaan keuangan ataupun pembuatan laporan. Dalam hal ini dikatakan fasilitator COMMIT tidak lebih mampu daripada fasilitator yang telah aktif di PNPM. Oleh karena itu, fasilitator COMMIT perlu melengkapi kapasitas tersebut dengan ikutserta dalam pelatihan tambahan tentang pengelolaan keuangan maupun administrasi rutin supaya tidak kehilangan kesempatan untuk bekerja di proyek-proyek pembangunan perdesaan sebagai fasilitator yang dibutuhkan negara (Kemendesa)³⁵,
- Standar SKKNI-FPM pada dasarnya menitikberatkan pada pengalaman kerja, latar belakang pendidikan (lulusan perguruan tinggi) dan keahlian. Di antara fasilitator yang dilatih JICA ada yang mempunyai cukup pengalaman kerja dan prestasi sebagai fasilitator unggul tetapi juga ada yang tidak memiliki ijazah perguruan tinggi. Maka diharapkan ada pertimbangan untuk menambah peraturan khusus seperti pengecualian ataupun perlakuan istimewa. Mengenai hal ini ada gagasan bahwa fasilitator yang pernah berpengalaman mengikuti proyek pembangunan partisipatif yang diadakan instansi pemerintah Indonesia (termasuk CDP) dan memiliki sertifikat resmi yang membuktikan prestasinya boleh dibebaskan dari sebagian ketentuan standar seperti latar belakang pendidikan. Di dalam kondisi peraturan perundangan terkait sedang disusun, COMMIT siap berbicara dengan pihak bersangkutan untuk mencari jalan keluar.
- Memikirkan masa yang akan datang, COMMIT berharap bisa menjadi lembaga pembinaan fasilitator (lembaga pelatihan) yang ditunjuk secara resmi oleh LSP-FPM yang merupakan satu-satunya badan akreditasi fasilitator (dengan bantuan Bank Dunia: saat ini ada 1.800 orang terdaftar). Dalam hal ini, meskipun LSP-FPM sendiri masih ada masalah kelembagaan yang belum memadai, COMMIT telah

³⁵ Menurut Sekretaris Jenderal COMMIT, Bapak Ashar Karateng, diperkirakan akan diberi masa tenggang selama dua tahun di awal permulaan Program Dana Desa, maka diharapkan setiap anggota COMMIT berupaya untuk memenuhi persyaratan kualifikasi. Sehubungan dengan ini, diinginkan juga JICA memberikan pelatihan tambahan.

berusaha melobi LSP-FPM dari 2 tahun yang lalu namun belum terealisasi hingga sekarang. Terkaitsoal ini, dukungan JICA diharapkan atau suatu pendekatan politis yang tepat dirasakan perlu.

(2) Situasi dan Tantangan Fasilitator PRIMA-K

Pada kunjungan studi lapangan tahap pertama Tim Studi sempat berkunjung ke Kabupaten Bulukumba, dan mengkonfirmasikan terbentuknya tim perbaikan pengelolaan kesehatan di tingkat kabupaten (yang terdiri atas Dinas Kesehatan (DINKES), Dinas Pengelolaan Keuangan (DPKD), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) dan BAPPEDA). Setelah PRIMA-K berakhir pun sistem pelaksanaannya tetap dijalankan dengan anggaran pemerintah kabupaten (ADD: Alokasi Dana Desa). Diyakini di Kabupaten Bulukumba mekanisme kegiatan PRIMA-K juga diterapkan pada program nasional yang ada di bawah tanggungjawab Kementerian Kesehatan, yaitu “Desa dan Kelurahan Siaga Aktif”.

Menurut laporan evaluasi PRIMA-K, pihak Indonesia, menilai bahwa tim yang dibentuk di tingkat kabupaten efektif dalam rangka memperkuat antara empat bidang yang bersangkutan. Karena Tim tersebut berfungsi secara optimal maka kelanjutan keuangan selama ini dijamin meskipun pasca PRIMA-K. Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan peningkatan pengelolaan kesehatan tetap dimasukkan ke dalam anggaran Dinas Kesehatan kabupaten, sehingga tersedia anggaran tepat yang diberikan sesuai tujuannya.

Mengenai dana kegiatan, dicoba untuk membandingkannya dengan CDP. CDP dilaksanakan dengan persyaratan bahwa kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat perlu dilaksanakan dengan dana desa atau sumbangan warga desa, tanpa memberikan dana bantuan dari Proyek. Sedangkan, PRIMA-K menyediakan anggaran kegiatan pada Tahap I, atas nama *block fund*, dengan tujuan untuk membuat model kegiatan, lalu kemudian diikuti dengan Tahap II di mana penyaluran dananya diubah menjadi alokasi anggaran desa (ADD) sehingga keberlanjutannya meningkat tanpa harus dibiayai oleh proyek.

Dalam pelaksanaan PRIMA-K, perawat puskesmas dan pegawai kantor camat yang ikutserta pada pelatihan fasilitator berperan dalam memberdayakan masyarakat di tingkat desa, sedangkan *field facilitator* (FF) yang dikontrakkan Tim Proyek PRIMA-K memainkan peranan untuk koordinasi dengan HWG. Atas penyelesaian PRIMA-K tugas-tugas yang ditangani oleh pegawai kantor camat dan FF diidentifikasi, dan orang-orang yang mampu untuk ambil alihnya ditentukan dari pihak berkepentingan (kabupaten, kecamatan masyarakat desa) agar tugas terkait fasilitasi dapat dipindahtanggankan hingga PRIMA-K berakhir.

3-4 Pembangunan Infrastruktur Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan

(1) Garis Besar Proyek JICA

Setelah Otonomi Daerah, di saat Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diberlakukan pada tahun 2004, pemerintah Indonesia memprioritaskan padabeberapa tujuan, yaitu: i) mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 8,2 persen sampai dengan tahun 2009, ii) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan iii) menciptakan peluang kerja bagi masyarakat kelas miskin, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN: tahun 2004~2009) dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional (PRSP). Pada saat itu, menanggapi harga minyak melonjak, pemerintah secara darurat mengenalkan program kompensasi untuk mengurangi dampak pada tingkat kemiskinan karena pengurangan subsidi BBM, melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar di daerah tertinggal, pembangunan infrastruktur skala kecil, pemberian bantuan uang tunai kepada masyarakat yang tidak mampu, dsb.

Dalam keadaan tersebut, dalam rangka menjalankan proyek-proyek terkait dengan pengentasan kemiskinan secara komprehensif di tingkat nasional, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dirumuskan dan dilakukan dari tahun 2008. Proyek Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah³⁶ (selanjutnya, RISE atau PNPM-PISEW) dilaksanakan sebagai salah satu program dari PNPM, atas bantuan pinjaman dana dari JICA, khusus berperan untuk pembangunan infrastruktur skala kecil di daerah tertinggal. RISE dilaksanakan dengan tujuan untuk revitalisasi ekonomi masyarakat kemiskinan dan meningkatkan akses ke pelayanan sosial di daerah sasaran sehingga target nasional dapat terwujud, yakni: penanggulangan kemiskinan negara ini, pengembangan perekonomian daerah yang mandiri, peningkatan kapasitas kemandirian masyarakat lokal, maupun berkontribusi penguatan kapasitas administrasi pemerintah daerah. Komponen dari Proyek adalah i) fasilitas transportasi, ii) fasilitas air bersih dan sanitasi, iii) fasilitas yang berkaitan dengan produksi, iv) fasilitas pasar, v) fasilitas kesehatan, vi) fasilitas pendidikan dasar, serta vii) kredit mikro³⁷ sebagai percobaan, berdasarkan kebutuhan masyarakat yang tidak mampu berada di daerah tertinggal ditargetkan.

Tabel 3-1 Garis Besar Proyek Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wolayah (RISE-I, II)

	RISE-I	RISE-II
Periode Proyek	Maret 2007~Juli 2014	Februari 2014~Oktober 2016
Daerah Target	9 propinsi, 35 kabupaten, 237 kecamatan Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Jambi, Propinsi Bengkulu, Propinsi Bangka-Belitung, Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Selatan. Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat	
Biaya Proyek Total	31 ^{.56} miliar yen	13 ^{.94} miliar yen
Nilai Pinjaman Dana	23 ^{.52} miliar yen	10 ^{.00} miliaryen
Instansi Pemerintah yang bersangkutan	Badan Pelaksana: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR Badan Koordinasi: Bappenas Lembaga Terkait: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan	
Komponen Proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Pasokan Air dan Sanitasi • Fasilitas Irigasi Skala Kecil • Fasilitas Pasar • Fasilitas Kesehatan Primer • Fasilitas Sekolah SD dan SMP 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Transportasi • Fasilitas Pasokan Air dan Sanitasi • Fasilitas Irigasi Skala Kecil • Fasilitas Pasar • Fasilitas Kesehatan Primer • Fasilitas Sekolah Dasar

Sumber: Materi dari Tim Konsultan Proyek RISE

Sampai November 2014, RISE dilaksanakan di 9 propinsi, 35 kabupaten dan 237 kecamatan, dan diakui RISE berkontribusi untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (selanjutnya disebut KSK) yang merupakan bagian dari Rencana Pengembangan Tata Ruang di masing-masing kabupaten³⁸. KSK dimaksudkan untuk mempromosikan produksi dan pemasaran komoditi inti daerah yang ditentukan di masing-masing kabupaten dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, yang aspek peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan didukung oleh RISE.

Tabel 3-2 menunjukkan ringkasan dari kinerja KSK yang dilaksanakan di dua propinsi di wilayah Sulawesi. Jumlah daerah pelaksanaan tingkat kecamatan ada 17, jumlah desa ada 158, dengan jumlah populasi

³⁶ Dalam bahasa Inggris disingkat RISE (*Regional Infrastructure for Social and Economic Development*), Dalam bahasa Indonesia disingkat PNPI-PSEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).

³⁷ Komponen kredit mikro dibatalkan karena kesulitan sistem pelaksanaan, dll.

³⁸ Informasi dari PU-net (HP Kementerian Pekerjaan Umum) tertanggal 20, November 2014.

penerima manfaatnya 416.445 orang. Dalam hal komoditi inti daerah, beras (1KSK), jagung (4KSK), sapi (2KSK), kakao (6KSK), untuk pisang, kelapa, rumput laut, kepiting bakau, ikan laut masing-masing 1KSK.

Table 3-2 Komoditi Inti Daerah dan Kecamatan Target dalam KSK

Prop.	Kabupaten	KSK	Kecamatan Target	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk	Komoditi Inti Daerah
Prop. Sulawesi Selatan	Kab. Bone	KSK Bone	Awangpone Palakka Barebbo	18	78,493	Kakao Sapi Kepiting Bakau
	Kab. Sinjai	KSK Sinjai	Sinjai-Sulatan, Tellulimpoc	22	68,695	Beras Jagung Kakao
	Kab. Enrekang	KSK Mansenrempulu	Enrekang, Gendana, Maiwa,	47	64,341	Sapi Jagung Kakao
	Kab. Jeneponto	KSK Jeneponto	Arungkeke, Binamu, Batang	26	92,047	Rumput Laut Jagung
Prop. Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	KSK Mamuju	Simboro	8	25,724	Kakao Ikan Laut
	Kab. Mamuju Tengah	KSK Mamuju Tengah	Tobadak, Topoyo	23	52,769	Kakao Jagung Pisang
	Kab. Mamuju Utara	KSK Bambarasa	Bambara Bambalamotu Sarjo	14	34,376	Kakao Kelapa
Jumlah		7-KSK	117 Kecamatan	158	416,445	---

Sumber: Materi dari Tim Konsultan Proyek RISE

(2) Pelaksanaan RISE dan Pelatihan Fasilitator

Rencana proyek RISE dibuat berbarengan dengan prosedur Musrenbang di tingkat kabupaten. Kelompok Diskusi Sektor (KDS) dibantu fasilitator desa, menyiapkan daftar proyek, sementara itu sebuah Pokja di tingkat kecamatan mengkompilasi rencana kecamatan berdasarkan daftar tersebut. Pokja tersebut, yang terdiri dari perwakilan dari tiap sektor dan fasilitator/ teknisi, ditugaskan di tingkat kecamatan. Sebuah rencana kecamatan yang disatukan dengan rencana rencana dari kecamatan kecamatan yang lain selanjutnya, dengan memperhatikan kebijakan KSK, dibicarakan di Musrenbang di tingkat kabupaten. Terkait pelaksanaan proyek, fasilitator kecamatan dan teknisi mendesain setiap proyek sedangkan Lembaga Masyarakat Desa (LMD), yang dibentuk atas persetujuan kepala Desa, melaksanakan proyek tersebut setelah mendapatkan surat kuasa perwakilan dari kepala kecamatan. LMD menagih pengeluaran untuk pelaksanaan proyek ke kantor proyek kecamatan dan biro keuangan wilayah membayar tagihan ke LMD. Setiap proyek menyediakan seorang fasilitator masing masing untuk setiap kecamatan dan setiap kabupaten.

Pelatihan untuk fasilitator di RISE dilaksanakan secara struktural dalam tahapan menurut tingkatan pemerintahan dari propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Mereka yang mengikuti TOT di suatu propinsi melaksanakan pelatihan di tingkat kabupaten sebagai pelatih dan mereka yang menghadiri TOT di kabupaten memberikan pelatihan ke kecamatan. Selanjutnya, mereka yang menghadiri pelatihan di kecamatan melakukan pelatihan kepada penduduk dan fasilitator untuk membantu membuat perencanaan program partisipatif dan melaksanakannya. RISE telah melaksanakan pelatihan berjenjang tersebut untuk para fasilitator untuk pelatihan selama delapan hari untuk propinsi, kabupaten dan kecamatan dan pelatihan dua hari untuk desa.

Materi pelatihan disiapkan RISE. PMD dari Kemendag kemudian memberikan dana dan melakukan pelatihan untuk propinsi dan kabupaten sedangkan Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan menyediakan dana untuk kecamatan dan desa. Karena proyek proyek tersebut dilaksanakan secara luas di seluruh negeri, materi pelatihan beragam tergantung pada karakteristik setempat. Walaupun RISE merupakan salah satu komponen PNPM, penyesuaian atau penyatuan dengan komponen PNPM yang lain dalam hal metode/ isi pelatihan tidak dilakukan. Tidak ada persyaratan khusus dari organisasi internasional/ negara donor lainnya dalam hal berbagi informasi/ pengetahuan. Pada tahap pelaksanaan RISE-II, pelatihan teknis disediakan sebagai tambahan untuk pemberdayaan di tingkat kecamatan, selaras dengan strategi KSK (contohnya metode untuk mengembangkan nilai tambah produk/ komoditi).

(3) Contoh Kasus Proyek RISE

Di bawah ini, diperkenalkan kasus contoh dari RISE yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulbar, dan Kabupaten Enrekang di Propinsi Sulsel.

Kasus 1: Promosi Perikanan di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju

Pada akhir tahun 2012, dibangun sarana tambat kapal nelayan (dermaga sederhana) dan pasar ikan, dengan begitu, lebih banyak kapal penangkap ikan dapat berlabuh di pelabuhan. Hal ini membuat eksportir perikanan menjadi lebih mudah membeli ikan dari nelayan, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. Di sarana tambat kapal dan pasar ikan tidak hanya pedagang pemasok ikan saja yang mengunjunginya tetapi pedagang pemasok seperti toko-toko makanan dan toko-toko sayur juga datang. Karena sarana logistik dan pemasaran telah ditingkatkan, terlihat banyak orang yang mulai berbisnis baru (toko makanan, toko buah dan sayuran, penjual kacang, penjual bensin dan solar eceran, pelayan ojek (taksi sepeda motor) di sekitarnya. Menurut data kantor kelautan dan perikanan Kecamatan Simboro, hasil tangkapan ikan kecamatan jumlahnya 5,188.23 ton pada tahun 2012, dan meningkat menjadi 5,965.88 ton pada tahun 2013.

Kasus 2: Promosi Kelapa (kopra) di Kabupaten Mamuju Utara

Komoditi inti di KSK Bambarasa (KSK yang terdiri dari Kecamatan Bambara, Kecamatan Bambalamotu dan Kecamatan Sarjo di Kabupaten Mamuju Utara) adalah kakao dan kelapa. Perkebunan kelapa dikelola oleh masyarakat. Dalam proyek RISE, dibangun sarana pengukusan kelapa untuk dijadikan kopra³⁹. Selama ini cara untuk mengeringkan kopra biasanya dijemur matahari di tanah di sekitar kebun atau di halaman belakang rumah sehingga produksi kopra dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti cuaca. Saat ini, petani dapat menggunakan sarana pengukusan kelapa yang dikelola kelompok pemeliharaan dan pemanfaatan (KPP) tanpa dipengaruhi oleh cuaca, dan dapat menghasilkan kopra yang stabil. KPP mendapatkan biaya dari petani yang menggunakan sarana pengukusan kelapa, dan biaya pengangkutan kelapa⁴⁰ dan keuntungannya digunakan untuk pemeliharaan sarana pengukusan kelapa.

Kasus 3: Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Lunjen Kec. Buntu Batu, Kabupaten Enrekang

Komoditi inti di desa Lunjen adalah kakao dan sayuran. Karena kondisi topografi yang kompleks, akses jalan dari lahan pertanian (2.000ha) ke pusat desa keadaannya sangat buruk, maka hal ini menjadi beban besar bagi petani. Berkat proyek RISE, dibangun jembatan gantung dengan panjangnya 25-m dan

³⁹ Kopra adalah bahan kering dari daging buah kelapa, yang minyaknya digunakan sebagai bahan untuk memproduksi makanan olahan seperti margarine atau produk industri sehari-hari seperti sabun, lilin, dsb.

⁴⁰ Setiap pemakaian sarana pengukusan oleh petani (bisa mengukus sekitar 4.000 buah kelapa dengan satu kali pengukusan), KPP menerima biaya pemakaian sebesar 50 ribu rupiah. Pengangkutan untuk membawa kelapa dari perkebunan sampai ke tempat pengukusan dengan gerobak sapi dikenakan biaya service sebanyak Rp. 10.000~20.000 per satu kali angkutan.

lebarnya 1.5-m yang meningkatkan efisiensi transportasi. Pembangunan jembatan gantung ini membuat transportasi produk yang diangkut gerobak dan sepeda motor lebih efisien sehingga waktu pengangkutan dapat dipersingkat secara signifikan. Lagipula, bagi petani waktu bisa lebih leluasa.

(4) Hasil dari Proyek

Menurut konsultan proyek RISE⁴¹, lebih dari 95% dari desa-desa yang melaksanakan proyek merasa puas dengan hasil proyek. Diakui juga efek/ dampak positif yaitu bahwa perbaikan pasokan air dan pembuatan toilet umum dapat meningkatkan lingkungan sanitasi dan mengurangi penyakit menular, atau memperpendek waktu perjalanan ke sekolah melalui peningkatan kondisi jalan, dll. Sedangkan, di daerah KSK, dilaporkan bahwa produksi dan produktivitas komoditi inti secara keseluruhan meningkat. Kemudian, solidaritas dan kemandirian masyarakat dinilai meningkat, melalui pengalaman baik seperti kelompok diskusi mengenai tantangan sektoral (KDS: Kelompok Diskusi Sektor) yang mengidentifikasi masalah pengembangan dan penyusunan rencana maupun pelaksanaan proyek oleh lembaga desa mandiri (LDK: Lembaga Keswadayaan Desa)

Sebagai hasil proyek, dapat dicantumkan hal-hal yang diamati sebagai berikut:

- ✓ Pemasaran komoditi inti yang dilakukan oleh petani (kelompok) cenderung meningkat.
- ✓ Broker/ pedagang masih tetap bermain secara dominan di proses pemasaran produk pertanian, namun bisa dikatakan bahwa kemampuan tawar menawar petani telah meningkat karena broker menjadi lebih sering datang di desa dibandingkan dengan dulu.
- ✓ Sosialisasi atau pelatihan yang diberikan dari kecamatan ke desa meningkat.
- ✓ Keikutsertaan wanita pada program pelatihan yang diadakan kecamatan meningkat.
- ✓ Melalui pembuatan rencana jangka menengah daerah (Rencana Kecamatan) dan perencanaan investasi tahunan (PIK), dapat ditingkatkan kapasitas perencanaan di tingkat kecamatan.
- ✓ Di tingkat kabupaten, kapasitas kelembagaan telah meningkat juga melalui pelaksanaan proyek.

Sementara hasil seperti yang dijelaskan di atas telah diakui, ada juga isu/ permasalahan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- ✓ Perlu peningkatan konsistensi diantara kebijakan/ program pembangunan yang direncanakan dilaksanakan di tingkat kabupaten (RPJMD), strategi pembangunan sektoral (Renstra), rencana proyek (Rencana Kerja) dan strategi pembangunan kecamatan (Renstra Kecamatan).
- ✓ Perlu penguatan kemampuan manajemen KPP termasuk aspek pengelolaan keuangan, agar bisa meningkatkan kinerja pemeliharaan sarana yang dikembangkan RISE.

RISE merupakan bagian dari PNPM yang dilaksanakan dalam jurisdiksi Direktorat Jenderal Lingkungan dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum, dengan didukung oleh Bank Dunia sebagai sekertariat pendukungnya. Setelah PNPM berakhir pada tahun 2014, sesuai dengan kebijakan pembangunan ekonomi daerah di bawah pemerintahan baru, RISE tetap terus menekankan perlunya mengembangkan komoditi inti yang ditargetkan untuk KSK, mempromosikan bisnis komunitas, membangun infrastruktur, mendukung aspek keuangan (demi pengembangan produk dan bisnis komunitas), dsb., seraya memberi perhatian pada masalah sistem operasi dan pemeliharaan sarana.

⁴¹ Berdasarkan jawaban dari tim konsultan RISE yang diajukan dalam bentuk buku dengan judul “*List of Research Questions: Ministry of Public Works and Public Housing, March 2015, JICA Study Team*”.

BAB 4. Tinjauan Bantuan Negara-negara Donor dan Organisasi Internasional di Sektor Pengembangan Daerah

Dalam Bab ini, negara-negara donor dan organisasi Internasional yang mendukung Indonesia akan ditinjau dengan merangkum hasil studi mengenai upaya dan dukungan yang dilaksanakan sektor pengembangan daerah (4-1), dan menganalisa karakteristik usaha mereka di wilayah Indonesia bagian timur (4-2). Selain itu, dari pengalaman mendukung sektor pengembangan daerah (khususnya, peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang terkait dengan pembangunan perdesaan) di negara-negara lain, nampak bahwa pendekatan teknis dipandang cocok atau berguna bagi pengembangan daerah di Indonesia (4-3).

4-1 Garis Besar Program Bantuan masing-masing Lembaga

Dalam studi lapangan tahap pertama, kunjungan wawancara dilakukan terhadap dua lembaga internasional (Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia) dan empat lembaga dari negara-negara donor (Australia: DFAT, USA: USAID, Jerman: GIZ, Kanada: DFATD), terkait program/ proyek dukungan yang telah dilaksanakan untuk Indonesia selama ini dan pendekatan untuk RPJMN baru. Hasil wawancara dan informasi terkait yang dikumpulkan dari masing-masing lembaga dirangkum sebagai berikut.

(1) Bank Dunia

Garis Besar Pelaksanaan Program Bantuan

Bank Dunia adalah donor paling besar bagi Indonesia. Dalam jumlah bantuan untuk mendukung upaya agenda pembangunan pemerintah Indonesia pada tahun 2015 (berdasar komitmen) sebesar 1 miliar dolar (sekitar 119 milyar yen) yang saat ini dilaksanakan di 42 proyek/program⁴².

Fokus dari dukungan yang ditunjukkan *Country Partnership Strategy* tahun 2013~2015 ada 4 bidang seperti di bawah ini, yaitu:

- 1) Pertumbuhan ekonomi: peningkatan konektivitas dan logistik, peningkatan lingkungan peraturan bisnis untuk kompetisi dan inovasi, stabilisasi sektor keuangan, peningkatan kualitas dan efisiensi investasi infrastruktur, dukungan sesuai dengan peningkatan manajemen keuangan publik.
- 2) Penciptaan lapangan kerja: Peningkatan manajemen pendidikan dan pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia bidang pengembangan teknologi, bantuan sesuai dengan reformasi organisasi yang diperlukan untuk pelaksanaan reformasi asuransi sosial.
- 3) Pengurangan kemiskinan; Peningkatan desain dan kinerja program-program pemerintah untuk pengembangan masyarakat dengan target rumah tangga miskin dan rentan, mengaktifkan sektor pertanian, peningkatan kesehatan dan gizi dengan meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas (terutama kesehatan ibu dan anak, bidang pengujian HIV/ AIDS), mendukung ke peningkatan akses ke air bersih dan lingkungan sanitasi.
- 4) Konservasi lingkungan: Pelaksanaan strategi REDD+ di Indonesia, perlindungan karang dan sumber daya laut, mendukung pengurangan perubahan iklim dan bencana serta perluasan pendekatan penanggulangannya.

⁴² Dari <http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/projects> (1 dolar = 119 yen).

Di bidang pembangunan perdesaan dan pembangunan berbasis masyarakat, Bank Dunia sebagai donor terkemuka mendukung PNPM yang merupakan program penanggulangan kemiskinan penting pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 hingga 2014. Selain memberi bantuan dana untuk PNPM-Mandiri (PNPM-Rural dan PNPM-Urban) yang merupakan komponen utamadari PNPM dan PNPM-Generasi, memainkan peran penting dalam mengelola dan mengoperasikan *trust fund* (yang bentuknya modal terkumpul dari negara-negara donor bilateral) melalui memimpin di PNPM Support Facility (PSF) di tahap pelaksanaannya.

PNPM berakhir pada tahun 2014, dan dilaporkan bahwa sampai saat ini mayoritas dana program telah disampaikan langsung kepada masyarakat tanpa ditemukan pemakaian tidak jelas seperti korupsi, dll. Namun di sisi lain, dipandang dampak pada pengurangan kemiskinan di masyarakat berhenti pada batas tertentu. Dilaporkan juga bahwa PNPM tidak cukup karena hanya memberi dana untuk mengatasi seluruh kebutuhan besar, tetap sangat diperlukan untuk peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah daerah (kabupaten dan kota)⁴³.

Selain itu, sebagai program utama yang saat ini sedang dilaksanakan *Local Government and Decentralization Project II* (LGDP-II), *Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities* (PAMSIMAS-II) dll. LGDP-II mendukung program pemerintah menyalurkan dana infrastruktur kepada kabupaten dan kota dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus) yang merupakan salah satu dana keseimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Melalui implementasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur, dalam rangka mencapai peningkatan kapasitas pemerintah daerah (monitoring, pelaporan, dll.), membantu menggabungkan komponen yang mengadakan reformasi kebijakan untuk pemerintah pusat (BAPPENAS) dengan tujuan meningkatkan pemerintahan secara komprehensif.

PAMSIMAS-II, memberikan bantuan dana sesuai dengan program pemerintah pusat dalam rangka menyediakan air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan dimana pemerintah daerah berkewajiban menyediakannya untuk masyarakat miskin, dengan mendorong partisipasi masyarakat agar akuntabilitas dan kualitas pelayanannya dapat meningkat sesuai dengan tujuan Pembangunan Milenium (MDG) ataupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Semua proyek pada dasarnya dilaksanakan dengan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Arahan Bantuan sesuai dengan RPJMN (2015~2019)

Sejalan dengan RPJMN (2015~2019) saat ini Bank Dunia sedang mempersiapkan *Country Partnership Strategy* baru. Mengenai peningkatan penyediaan layanan bidang pengembangan daerah dan pemerintah daerah, dipertimbangkan isu-isu sebagai berikut: 1) untuk mempromosikan Otonomi Daerah yang efektif, perlu ditetapkan tata kelola yang tepat di tingkat pemerintah pusat agar pemerintah daerah menerapkannya dengan pasti, 2) alokasi dana ke pemerintah daerah perlu dipastikan untuk membawa hasil dengan baik, 3) perlu menyediakan paket dukungan yang memberi insentif sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing daerah.

⁴³ Dari Senior Manager Perwakilan Bank Dunia di Indonesia.

Berdasarkan kesadaran pada hal-hal pertimbangan di atas, Bank Dunia sebagai pendukung dari sektor pembangunan daerah, telah mengusulkan empat komponen sebagai berikut, kepada pemerintah Indonesia.

- 1) Dukungan bagi Kementerian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri terhadap desentralisasi, khusus untuk reformasi sistem transfer dana dan DAK, supaya dipastikan membawa hasil.
- 2) Bantuan teknis dan bantuan dana untuk semua sektor secara komprehensif yang diperlihatkan di DKI Jakarta dan kota Surabaya, supaya menjadi perkotaan secara global.
- 3) Bantuan teknis dan bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur di 30~40 kota-kota skala besar dan menengah, untuk mengatasi urbanisasi (Dana Pembangunan Infrastruktur Regional (RIDF) saat ini sedang dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan untuk dibentuk).
- 4) Di daerah, dukungan peningkatan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tingkat daerah (pendidikan, kesehatan, air bersih, dll) (khususnya, perluasan PAMSIMAS, D&D (versi upgrade dari PNPM-urban), dll.)

Untuk bantuan terait dengan undang undang Desa pemerintah Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan Bank Dunia bahwa 290 juta dollar AS yang tersisa dari dana PNPM dapat digunakan untuk mempekerjakan 12.000 fasilitator yang dibutuhkan demi pengelolaan Dana Desa. Bank Dunia mungkin tidak akan mempertimbangkan pinjaman baru untuk Dana Desa (meskipun mereka tidak menyangkal kemungkinan menyediakannya di masa mendatang) hingga pemerintah RI menjamin bahwa Dana Desa digunakan oleh pemerintah desa dengan benar. Lebih dari itu, pemerintah mungkin tidak menganggap tepat untuk mengadakan dana dengan cara meminjam dari pendonor luar negeri, karena gagasan Dana Desa berasal dari janji pemilu Presiden Jokowi (menghapuskan subsidi minyak dan mengalihkannya untuk membantu rakyat miskin). Diakui sangat penting memberikan dukungan yang diperlukan dalam aspek regulasi dan pengendalian sehingga dana desa dipergunakan sesuai yang diinginkan. Ditunjukkan pendapat bahwa pada masa transisi dari PNPM ke Program Dana Desa, peran pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola dan mengawasinya menjadi lebih penting daripada sebelumnya⁴⁴.

(2) Bank Pembangunan Asia

Garis Besar Pelaksanaan Program Bantuan

Bank Pembangunan Asia (selanjutnya disebut, ADB) mendukung pemerintah Indonesia menggunakan dua skema dukungan yaitu bantuan dana (pinjaman) dan bantuan teknis (TA). Pada April 2015 ini, sedang dilaksanakan 19 proyek bantuan dana dan 44 TA, dengan nilai dana dukungan pada periode tahun 2013~2014 (berdasar pencairan) sebesar 1 miliar 66 juta dolar (sekitar 126,8 miliar yen) sebagai bantuan dana, dan 86 juta dolar (sekitar 1 miliar dua juta yen) untuk TA⁴⁵. Nilai bantuan proporsi TA jauh lebih kecil dibandingkan dengan bantuan dana kerjasama tetapi TA telah diakui sebagai kerja sama yang sangat penting dan efektif.

Di bidang pembangunan daerah, telah dilaksanakan banyak TA bagi pemerintah daerah untuk sektor manajemen keuangan, seperti audit, obligasi daerah, pemerintahan keuangan publik, dll. dan kecendurengan ini diperkirakan akan terus berlanjut ke depan. Di sisi lain, dalam bantuan dana sedang dilaksanakan

⁴⁴ Dari Program Leader Perwakilan Bank Dunia di Indonesia.

⁴⁵ Dari *ADB & Indonesia Fact Sheet*.

berbagai proyek seperti pembangunan politeknik, pembangunan jalan daerah, pengembangan energi daur ulang, pembangunan irigasi, konservasi karang, pembangunan infrastruktur perdesaan, dll.

Sementara itu, bagi masyarakat miskin perkotaan telah dilaksanakan *Neighborhood Upgrading and Shelter Project* dan *Water Sanitation Program*. Untuk yang berbasis masyarakat, dukungan difokuskan ke sekitar kota (*Peri-urban*) dari pada ke wilayah perdesaan.

ADB juga merupakan salah satu donor yang telah mendukung PNPM. RIS-PNPM I dan II, yang dilaksanakan pada tahun 2008~2013 dan ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur perdesaan, telah diposisikan sebagai salah satu komponen dari PNPM-Mandiri. Program RIS-PNPM dilaporkan menghasilkan pengurangan biaya *overhead* secara drastis dengan berupaya masuk ke dalam sistem administrasi yang sedang berlaku sehingga dapat memberikan bantuan pemerintah ke setiap lapisan masyarakat.

Arahan Bantuan sesuai dengan RPJMN (2015~2019)

ADB dalam rangka menyesuaikan RPJMN (2015~2019) saat ini sedang mengembangkan *Country Partnership Strategy* (CPS: 2015 - 2019), yang diperkirakan akan diumumkan pada awal tahun 2016. Terhadap tema "Peningkatan konektivitas" dan "Pengurangan kesenjangan" yang ditentukan dalam RPJMN, ADB siap untuk mengusulkan dukungan dengan sikap penguatan konektivitas dan daya saing (*Competitiveness*).

Untuk memperkuat konektivitas, akan didukung peningkatan konektivitas listrik antar wilayah seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Bali⁴⁶. Selain itu, sebagai pembangunan infrastruktur yang terkait dengan inisiatif pengembangan kelautan (Tol Laut), bukan pelabuhan itu sendiri, tetapi mendukung peningkatan jaringan jalan yang total panjangnya 4.900 km yang memanjang dari pelabuhan ke pedalaman (*Regional Road Development Project*), yang diharapkan untuk memberikan kontribusi kepada Tol Laut. Di sisi lain, untuk memperkuat daya saing, ADB mendukung rehabilitasi irigasi nasional dan program peningkatan produktivitas pertanian (anggaran sebesar 3 miliar dolar) bekerjasama dengan IFAD. IFAD menangani komponen penyuluhan pertanian, sementara itu ADB akan memberikan bantuan dana untuk rehabilitasi fasilitas irigasi. Program desentralisasi Indonesia dijalankan tanpa banyak memperhatikan pembangunan kapasitas pemerintah daerah, dengan demikian beberapa bagian dari sistem di tingkat pemerintahan daerah tidak berfungsi dengan baik. Ada tanggapan terdengar dari organisasi mitra pembangun yang lain bahwa para donor perlu memahami realitas di masyarakat bawah dan melaksanakan program bantuan dengan cermat.

(3) DFAT: *Departement of Foreign Affairs and Trade, Australia* (sebelumnya bernama AusAID)

Garis Besar Pelaksanaan Program Bantuan

Bantuan Australia (seterusnya disebut, DFAT) untuk Indonesia pada tahun 2013~2014 (berdasarkan pencairan) adalah bertotal 508 juta dolar Australia (sekitar 47,5 miliar yen)⁴⁷. Nilai bantuan Jepang pada tahun 2013 adalah 89 miliar 246 juta yen⁴⁸ (berbasis pencairan), sehingga bantuan dari DFAT sebesar separuh dari Jepang. Dengan demikian DFAT adalah negara donor bilateral utama dengan bantuan terbesar setelah Jepang.

⁴⁶ West Kalimantan Power Grid Strengthening Project, Java-Bali 500-Kilovolt Power Transmission Crossing Project

⁴⁷ <http://dfat.gov.au/geo/indonesia/development-assistance/Pages/development-assistance-in-indonesia.aspx>. Rate: 1dolar Australia = 93.5 yen.

⁴⁸ Dari www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000072225.pdf

Program bantuan DFAT difokuskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tata pemerintahan yang baik dan stabil. Sedangkan, DFAT mengupayakan untuk menciptakan lingkungan untuk promosi perdagangan dan investasi melalui penguatan kelembagaan serta pembangunan infrastruktur, dan membangun sumber daya manusia untuk mendukungnya, khususnya difokuskan pada peningkatan kapasitas perempuan. Sejak tahun 2013, DFAT berubah dalam metode penyusunan program bantuan. Sebelumnya metode rancangan program yang difokuskan pada isu-isu menurut sektor digunakan, namun sekarang diterapkan metode rancangan program dengan pendekatan multi-sektor untuk meningkatkan penyediaan layanan dasar secara komprehensif dalam rangka memajukan Otonomi Daerah di Indonesia.

Proyek dukungan dari DFAT ke sektor pengembangan daerah adalah seperti *Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)*, *Promoting Rural Incomes through Strengthening Markets in Agriculture (PRISMA)*, *Tertiary Irrigation Technical Assistance (TIRTA)*, *Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH)*, dll. Selain itu, ada juga dukungan finansial bagi pemerintah yang khusus untuk pengembangan infrastruktur daerah, yaitu *Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)* dan *Water and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS)*.

Di antara proyek-proyek tersebut terdapat kesamaan (karakteristik yang umum) yaitu bahwa sebagian besar proyek di atas mencakup daerah dari Kawasan Timur Laut, termasuk Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat sebagai target dukungan. Di antara negara donor bilateral, dapat dikatakan bahwa DFAT yang paling aktif dalam dukungan pengembangan Kawasan Timur Laut.

Program AusAID “ACCESS (*The Australian Community Development and Civil Strengthening Scheme*) I dan II” telah dilaksanakan mulai dari tahun 2002 hingga 2013 di 1.127 desa di 20 kabupaten di empat propinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Program tersebut melatih 17.238 fasilitator dan membantu desa-desa merumuskan rencana jangka menengah desa mereka (RPJMDes: 2009~2014) serta rencana pembangunan tahunan bekerjasama dengan CSO setempat. Empat desa di propinsi Sulawesi Selatan yang dikunjungi Tim Studi saat ini telah melaksanakan RPJMDes baru (2015~2019), yang memasukkan program desa untuk dilaksanakan dengan menggunakan baik Dana Desa maupun ADD. Setelah menyelesaikan proyek ACCESS, DFAT memulai proyek KOMPAK di awal tahun 2015 untuk mendukung pengembangan komunitas Indonesia.

Dengan ditambah proyek-proyek seperti yang dijelaskan di atas, DFAT juga telah memberikan dukungan untuk PNPM. 215 juta dolar Australia pada tahun 2009, ditambah 99 juta dolar Australia pada tahun 2012 sehingga total menjadi 314 juta dolar Australia (sekitar 29 miliar 350 juta yen), yang 90% nya dilaksanakan melalui PSF untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan PNPM-Mandiri.

Arahan Bantuan sesuai dengan RPJMN (2015~2019)

Pemerintah Australia pada tahun 2014 telah menetapkan strategi kemitraan baru sejalan dengan RPJMN (2015~2019), yang dilaksanakan dari tahun 2015. Fokus dari strategi baru adalah empat hal berikut.

- 1) Menghilangkan kemacetan infrastruktur.
- 2) Meningkatkan pemerintahan untuk ekonomi dan sosial dan membentuk kebijakan dalam rangka membangun fondasi yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan perdagangan yang lebih maju.
- 3) Peningkatan penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

4) Pembangunan sumber daya manusia melalui program beasiswa.

Sektor yang difokuskan adalah, pemerintahan untuk ekonomi dan demokratisasi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, pembangunan perdesaan, dan pengurangan kerusakan bencana.

Berkenaan dengan Undang-undang Desa, DFAT telah mulai mengumpulkan informasi dan menganalisis, dan berkonsultasi dengan pemerintah hingga saat ini untuk mengupayakan i) pencerahan dari para pemangku kepentingan dalam masa transisi dari PNPM ke Undang-undang Desa, ii) dukungan pembentukan kebijakan dan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-undang Desa (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan), dan iii) dukungan penyusunan peraturan terkait fasilitator desa (dukungan untuk LSP-FPM).

Sejak Januari 2015, dilaksanakan “Kolaborasi Masyarakat untuk Pelayanan Dan Kesejahteraan KOMPAK” sebagai dukungan langsung untuk Undang-undang Desa dan Program Dana Desa. KOMPAK diposisikan sebagai pendukung untuk bidang pembangunan berbasis masyarakat setelah PNPM, dengan tujuan untuk mempromosikan kegiatan ekonomi dan peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Bantuan hibah bagi masyarakat seperti yang telah diberikan PNPM tidak diadakan, tetapi diberikan nasehat kebijakan dan bantuan teknis untuk tiga bidang, yaitu: penguatan peran masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintah daerah (kabupaten, desa), dan penguatan fasilitator. Untuk Undang-undang Desa, meskipun akan membutuhkan waktu, diasumsikan bahwa akan berfungsi dalam 4~5 tahun. Kegiatan-kegiatan spesifiknya akan diteliti lebih lanjut.

Per bulan Juli 2015, KOMPAK membantu Kementerian Dalam Negeri melalui pelatihan untuk pelatih ahli, juga mengembangkan modul pelatihan untuk semua tingkatan untuk program pelatihan pengembangan kapasitas pemerintah daerah (dirujuk ke BAB III). DFAT memperkirakan bahwa akan diperlukan empat atau lima tahun bagi Undang-undang Desa untuk berfungsi dengan benar. Kementerian Dalam Negeri akan membuat program pelatihan sebagaimana kemajuannya. Tim Studi memiliki kesan bahwa KOMPAK dan Kementerian Dalam Negeri telah bekerja secara erat untuk melaksanakan UU Desa.

(4) USAID, Amerika Serikat

Garis Besar Pelaksanaan Program Bantuan

Amerika Serikat (selanjutnya disebut, USAID) memberikan dukungan untuk Indonesia sejak tahun 1950. Total nilai dukungan untuk Indonesia pada tahun 2013 adalah 117,1 juta dolar (sekitar 13 miliar 934 juta yen)⁴⁹, sehingga skala bantuannya di antara negara donor bilateral diakui nomor ke 3 atau 4.

Dukungan yang sedang dilaksanakan saat ini sesuai *Country Development Cooperation Strategy* (CDCS: 2014~2018). Pilar dukungan utama ada empat yaitu: 1) penguatan pemerintahan yang demokratis, 2) peningkatan layanan yang sangat diperlukan untuk lapisan miskin maupun rentan, 3) promosi upaya untuk prioritas agenda pembangunan global, 4) kerjasama untuk promosi ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi. Dari tahun 2014, wilayah target dikurangi menjadi 14 propinsi⁵⁰, dengan berkonsentrasi pada

⁴⁹ Dari Website USAID (<http://results.usaid.gov/indonesia#fy2013>)

⁵⁰ Dilaksanakan di 14 Propinsi yaitu di Propinsi Aceh, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Maluku Utara, Propinsi Maluku, Propinsi Papua Barat dan Propinsi Papua. Ditambah Propinsi Riau hanya untuk proyek kesehatan.

pemasukan dukungan, supaya dapat memberikan hasil dengan pasti sesuai dengan yang direncanakan. Wilayah sasarannya telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebutuhan dan masalah prioritas pembangunan, kemauan politik dari para pemangku kepentingan, dan kemungkinan tumpang tindih dengan donor lain, dan kebetulan lebih dari separuhnya berada di Kawasan Timur Laut.

USAID mengambil pendekatan dalam pelaksanaan program untuk penguatan masyarakat melalui pembuatan kontrak pelaksanaan program dengan LSM (di AS atau Indonesia), konsultan swasta atau perguruan tinggi atas dasar program/ proyek, lalu LSM dan CSO setempat yang dikonsinyasikan kembali di lapangan langsung menjangkau ke masyarakat sipil.

Sebagai dukungan ke sektor pengembangan daerah, terutama diadakan proyek KINERJA yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dasar dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan. KINERJA ditargetkan di lima propinsi dan 20 kabupaten⁵¹ dan memberikan *block grant* kepada kelompok yang terdiri dari masyarakat, LSM, asosiasi, sekolah, dsb. Kelompok tersebut menjadi pemberi layanan publik, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mendukung kelompok-kelompok tersebut. Dalam penyediaan *block grant* diperkenalkan prinsip persaingan di mana terlihat hal yang unik bahwa “pengembangan ekonomi” ditetapkan sebagai salah satu bidang sasaran dengan ditambah tujuan pengurangan kemiskinan. Proyek ini diarahkan untuk pengembangan ekonomi melalui dukungan sektor swasta. KINERJA akan berakhir pada tahun 2015, dan dinilai telah memberikan suatu hasil yang baik.

Di sisi lain, USAID juga telah berinvestasi di PNPM yang dilaksanakan melalui PSF. Karena kantor perwakilan USAID di Indonesia keterlibatannya kecil, maka tidak memadai untuk memberikan pendapat/ penilaian terhadap pelaksanaan PNPM.

Arahan Bantuan sesuai dengan RPJMN (2015~2019)

CDCS (2014~2018) yang berlaku sejak tahun 2014 dikembangkan dari tahun 2012. Oleh karena itu, isinya tidak mencerminkan RPJMN (2015~2019). Namun, seperti disebutkan di atas, karena strategi bantuan USAID sampai saat ini fokusnya ditekankan di Kawasan Timur Laut, sehingga tidak perlu ada perubahan dengan arahan untuk melanjutkan bantuan berdasarkan CDCS saat ini.

Terkait Undang-undang Desa dan Program Dana Desa, sedang dipertimbangkan bagaimana supaya tercermin pada proyek-proyek yang sedang berjalan, khususnya yang mempunyai hubungan erat seperti proyek kesehatan ibu dan anak dan proyek kehutanan dll, namun langkah konkritnya belum ditentukan. Di Indonesia, meskipun di tingkat kabupaten ada dana pembangunan yang cukup, tetapi belum bisa menyediakan pelayanan ke tingkat masyarakat desa dengan pasti. Hal itu diakui sebagai kunci penting maka perlu mendukung dan mengintervensi ke bagian kunci tersebut dengan hati-hati⁵².

⁵¹ Propinsi Aceh, Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Sukawesi Selatan dan Propinsi Maluku.

⁵² Wakil Kepala Perwakilan USAID di Indonesia.

(5) GIZ, Jerman

Garis Besar Pelaksanaan Program Bantuan

Indonesia adalah salah satu negara mitra prioritas kerjasama internasional bagi Jerman (selanjutnya disebut GIZ), maka GIZ telah mendukung secara aktif pembangunan Indonesia sejak tahun 1975. Pada November 2013 dalam perundingan antar pemerintah, dibuatlah kesepakatan untuk memfokuskan diri pada tiga bidang, yaitu: energi dan perubahan iklim, pengembangan pertumbuhan komprehensif, dan tata pemerintahan yang baik dan jaringan global. Pada bulan Juli 2015, sedang dilaksanakan 35 proyek⁵³ dengan total biaya 127 juta euro (setara dengan sekitar 165 miliar 60 juta yen⁵⁴). Proyek yang berkaitan dengan perubahan iklim dan proyek yang terkait dengan kerjasama ASEAN merupakan keistimewaannya dibandingkan dengan donor lainnya.

Di sektor pengembangan daerah telah dilaksanakan *Local and Regional Economic Development* (LRED) sejak tahun 2004. LRED, yang merupakan proyek unggulan dimana GIZ menyebarkannya ke seluruh dunia, telah dilaksanakan untuk tujuan mendukung pembangunan industri lokal dengan target usaha kecil dan menengah. LRED dilaksanakan dengan isi/ komponen yang disesuaikan untuk masing-masing negara. Dalam kasus Indonesia, bekerjasama dengan mitra dari kabupaten dan kota, analisa dan penguatan rantai nilai produk, pengembangan klaster, pelatihan kewirausahaan, analisa dan peningkatan lingkungan bisnis, dsb. Sebagai komponen dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, perusahaan swasta, universitas, asosiasi bisnis, koperasi dsb. Untuk mempromosikan industri lokal. Dengan target di tiga daerah percontohan, yaitu: Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Kalimantan Barat, dan Propinsi Nusa Tenggara Barat kegiatan kerjasama yang berkelanjutan telah dilaksanakan lebih dari 10 tahun. Proyek ini telah berakhir pada tahun 2014, kemudiandari tahun 2015 dilaksanakan *Sustainable Regional Economic Growth and Investment Programme* (SREGIP) yang meneruskan memberi dukungan yang serupa.

Berkenaan dengan bidang desentralisasi dan pemerintahan, GIZ terus mendukung Otonomi Daerah selama lebih dari 20 tahun dalam berbagai bidang terkait, terus mendukung pembentukan kerangka hukum, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, dsb. GIZ dengan kerjasamanya selama ini dipandang dan dinilai telah memainkan peran tertentu, maka 2~3 tahun yang lalu telah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama langsung untuk desentralisasi dan pemerintah daerah. Setelah itu, fokus bantuan telah beralih ke reformasi tata kelola pemerintah pusat.

Pelaksanaan "*Transforming Administration-Strengthening Innovation*" (TRANSFORMASI), memperkuat kapasitas pemerintah daerah secara tidak langsung melalui mendukung pemerintah pusat yang memperkuat pemerintah daerah, atau mempromosikan agar masyarakat sipil mendorong pemerintah daerah supaya dapat diberikan layanan publik yang lebih baik.

GIZ adalah satu-satunya negara donor utama yang tidak melakukan dukungan untuk PNPM. Pada waktu pelaksanaan PNPM, kebijakan GIZ memprioritaskan pada dukungan terhadap pemerintah daerah di tingkat kabupaten/ kota, sehingga PNPM yang langsung mengalirkan dana pembangunan ke masyarakat desa tidak konsisten dengan kebijakan tersebut⁵⁵, hal ini menjadi alasannya.

⁵³ https://www.giz.de/projektdate/index.action?request_locale=en_EN#?region=2&countries=ID.

⁵⁴ Dihitung 1 euro = 130 yen.

⁵⁵ Dari wawancara dengan GIZ.

Arahan Bantuan sesuai dengan RPJMN (2015~2019)

Menurut petugas proyek GIZ, konsultasi dengan pemerintah Indonesia dijadwalkan untuk diadakan pada Oktober 2015, baru kemudian akan ditetapkan kemungkinan kebijakan dukungannya, dll. Pada saat ini, ada proyek yang sedang berjalan. Menurut GIZ salah satu kegiatan dari proyek LRED yang telah dilaksanakan di wilayah kota Solo, Jawa Tengah, yang memasukkan komponen pelatihan kejuruan, mempunyai kemiripan dengan konsep *Science/ Techno Park* yang merupakan inisiatif Presiden Jokowi⁵⁶. Namun hal ini masih perlu dianalisa sesuai dengan lingkungan dari setiap daerah sasaran (seperti misalnya: produk dan industri yang menjadi target dan kemampuan para pemangku kepentingan) dan dipikirkan dengan baik untuk mendekati *Science/ Techno Park*.

Mengenai Undang-undang Desa, GIZ tidak merespon secara konkrit tetapi secara informal melakukan pertukaran informasi dengan BAPPENAS. Dengan penerapan Undang-undang Desa dan Program Dana Desa, sejumlah besar dana pembangunan akan mengalir ke desa, tetapi dikarenakan akuntabilitas pemerintahan desa belum mencukupi, ada kekhawatiran ditinjau dari segi pelaksanaannya.

(6) DFATD: *Department of Foreign Affairs and Trade and Development, Kanada (dulunya CIDA)*

Garis Besar Pelaksanaan Program Bantuan

Jumlah dukungan Kanada (selanjutnya disebut DFATD) terhadap Indonesia pada tahun 2012~2013 adalah 29,3 juta dolar Kanada (2 miliar 840 juta yen)⁵⁷, yang di antara negara donor bilateral tidak tergolong besar. Skala proyek-proyeknya pun tidak begitu besar. Walau DFATD melaksanakan kerjasama berdasar kebijakan “seleksi dan konsentrasi” namun di Sulawesi, sebagai daerah prioritas secara berkelanjutan, masa pelaksanaannya relatif panjang.

Dengan melakukan proyek percontohan, DFATD cenderung mengambil pendekatan dengan mengembangkan dan menerapkan model kesuksesannya ke daerah lain. Saat ini ada 14 proyek yang sedang dalam pelaksanaan dengan sektor kerjasama pembangunan sumber daya manusia, dukungan pengembangan ekonomi, pengembangan wilayah aliran sungai, dan pelestarian lingkungan. Pada tahun 2014, Indonesia merupakan salah satu negara fokus bagi kerjasama pembangunan internasional Kanada, melalui penguatan investasi manusia yang merupakan fondasi ekonomi dan untuk memperkuat pemerintahan yang demokratis, bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi terwujudnya kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin (perempuan dan laki-laki). Mereka juga melakukan pendekatan yang sangat pro-aktif untuk memasukkan hasil hasil dari program bantuan ke dalam Kebijakan Indonesia. Seperti contohnya, Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, yang dipromosikan oleh BAPPENAS, yang aslinya berasal dari program kerjasama DFATD.

DFATD bertanggung jawab pada dana investasi untuk organisasi internasional dan dana kerjasama bilateral, dengan keunikannya mempunyai fleksibilitas dalam pengaturan skema kerjasama. Misalnya, bisa menggunakan dana kerjasama bilateral untuk melaksanakan proyek di bawah organisasi internasional seperti Bank Dunia dan ADB⁵⁸, atau memberikan dana atau Bantuan Teknis untuk proyek-proyek tertentu yang

⁵⁶ Pada waktu itu Presiden Jokowi adalah walikota kota Solo.

⁵⁷ Dari <http://www.international.gc.ca/development-developpement/countries-pays/indonesia-indonesie.aspx?lang=eng>. 1 dolar Kanada = 97 yen.

⁵⁸ *Skills for Employment in Indonesia (ADB)*, *Indonesia Agribusiness Development (IFC)*, dll.

dilaksanakan oleh negara yang menerima manfaat atau organisasi internasional⁵⁹. Ada juga proyek yang menandatangani kontrak dengan LSM, lembaga penelitian, universitas dll. asalkan Kanada kemudian juga melibatkan LSM atau CSO setempat sebagai pelaku proyek di lapangan⁶⁰.

Selain hal-hal tersebut, DFATD memberikan bantuan sebesar 16 juta 50 ribu dolar Kanada (sekitar 1,6 miliar yen) untuk PNPM-Green, yang dilakukan melalui PSF. PNPM-Green telah selesai dalam dua tahun, dan itu dinilai berprestasi besar dalam menanamkan peraturan yang diwajibkan dalam rangka *environmental assessment* yang diterapkan di seluruh proyek PNPM.

Arahan Bantuan sesuai dengan RPJMN (2015~2019)

DFATD masih dalam proses mencermati jalannya RPJMN: 2015-2019 dan Nawacita presiden Jokowi. Jika ada permintaan dari pemerintah Indonesia, DFATD siap memperluas dukungannya ke arah timur lagi dari Sulawesi yang merupakan daerah fokus kerjasama selama ini. Sektor pengembangan sumber daya manusia dan bidang pelatihan kejuruan, adalah pilar dukungan DFATD dan sektor yang paling menarik adalah "keterampilan kerja dan investasi pada manusia", sehingga bagaimana merancang program dukungannya itu merupakan tantangan tersendiri.

Terkait dengan Undang-undang Desa, pada tahap ini cara dukungannya belum dipertimbangkan. Meskipun dana desa merupakan skema yang memiliki tujuan yang mirip dengan PNPM, kapasitas pemerintah desa dinilai rendah untuk bisa membuat penggunaan dana desa efektif, maka diperkirakan ketergantungan terhadap keberadaan fasilitator masih akan terus terjadi. Yang dianggap ideal adalah keadaan di mana penguatan kapasitas pemerintah desa sudah tercapai dan fasilitator tidak diperlukannya lagi.

4-2 Karakteristik Pelaksanaan Program di Kawasan Timur Laut

Masing-masing lembaga donor telah mencakup wilayah timur Indonesia sebagai daerah target bantuan, tetapi dalam tingkat keterlibatannya ada perbedaan. Bank Dunia dan ADB banyak menerapkan pendanaan untuk proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk seluruh negeri, maka dipahami juga akan memasukkan daerah dari Kawasan Timur Laut sebagai wilayah target dukungan. Bahkan, menurut ADB, sekitar 60 persen dari bantuan untuk pelaksanaan program telah diarahkan ke Kawasan Timur Laut.

Sementara itu, DFAT sejak dari awal telah menerapkan kerjasama dengan berfokus Kawasan Timur Laut, khususnya Propinsi Papua dan Papua Barat dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini terjadi karena baik pemerintah maupun CSO-nya masih belum mencukupi baik dalam sistem administrasi maupun kapasitasnya dalam memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Untuk itu, pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan peraturan menjadi fokus. Perlu dicatat bahwa, dalam mendukung Kawasan Timur Laut, DFAT telah bekerjasama dengan BaKTI.

BaKTI berbasis di Kota Makassar. Sejak didirikan pada tahun 2004 sebagai kantor pendukung program Bank Dunia, BaKTI telah terus beroperasi dengan dukungan dari negara-negara donor dan sebagai organisasi Bursa Pengetahuan wilayah Indonesia Timur. Kantor lapangan JICA Makassar juga pernah melakukan pertukaran informasi dengan BaKTI secara teratur. BaKTI sejak berdirinya adalah sebuah yayasan, yang bertanggung jawab atas fungsinya sebagai bank informasi di bagian timur terhadap pembangunan Indonesia, dan juga aktif sebagai organisasi yang ditugaskan melaksanakan proyek-proyek DFAT dan DFATD.

⁵⁹ PNPM dll.

⁶⁰ *Sulawesi Economic Development Strategy Project, Restoring Coastal Livelihoods in South Sulawesi Project*, dll.

Sebagaimana DFAT, USAID juga memfokuskan dukungannya di Kawasan Timur Laut namun tidak melaksanakannya dalam bentuk sebuah proyek khusus untuk wilayah tersebut, tetapi mengambil pendekatan sebagai salah satu daerah sasaran untuk sebagian wilayah Indonesia. Proyek tersebut dirancang, disesuaikan dengan kondisi daerah, dengan cara merubah komponen dan struktur pelaksanaannya. Misalnya, proyek KINERJA di Propinsi Papua, sebelumnya, telah difokuskan hanya untuk komponen kesehatan⁶¹. Di Propinsi Papua, dengan partner yang berkemampuan rendah, proyek tidak bisa berjalan dengan baik jika hanya bersama CSO lokal, untuk itu ditangani dengan menambahkan tenaga ahli dari luar propinsi. Personil dari Jakarta juga perlu sering didatangkan untuk melakukan penyesuaian terkait pelaksanaannya. Selain itu, karena tingkat biaya di Propinsi Papua relatif tinggi, pengeluaran biaya proyek di Propinsi Papua menjadi lebih besar daripada di daerah lainnya sehingga *cost efficiency* yang memadai tidak bisa diharapkan. Meski demikian, karena kebutuhan pembangunan daerah tinggi, keberadaan USAID sebagai pendonor aktif di Propinsi Papua dipandang penting untuk ditunjukkan guna melanjutkan dukungan.

Mesti skala dukungan dan kerjasama dirasakan kecil, DFATD juga telah melaksanakan kerjasama untuk Kawasan Timur Laut selama bertahun-tahun. DFATD telah secara konsisten memperluas dukungan di 6 propinsi di Sulawesi. Beberapa dekade lalu DFATD pernah mengadakan proyek yang dilaksanakan di Propinsi Papua. Dari latar belakang tersebut, adanya kemungkinan untuk memperluas dukungan untuk Kawasan Timur Laut tergantung dari permintaan pemerintah Indonesia. Kerjasama di Sulawesi atau bagian lebih timur selain membutuhkan biaya yang besar juga memerlukan pembangunan sumberdaya manusia secara signifikan, untuk itu kerjasama dengan BaKTI tetap dianggap efektif dan efisien apabila program bantuan memang akan dilaksanakan di wilayah tersebut.

GIZ sejauh ini mengatakan memasukkan bagian Kawasan Timur Laut ke dalam proyek yang bertarget wilayah nasional. Bantuan ke kawasan tersebut menghadapi banyak kesulitan, seperti tingkat efisiensi logistiknya buruk, kesadaran dan kapasitas pemangku kepentingan kurang, dan perlunya mengatur supaya tidak tumpang tindih dengan donor lain. Oleh karena itu, walaupun memiliki jaringan baik itu dengan pemerintah Propinsi Papua maupun universitas setempat, selama ini GIZ belum merencanakan untuk memberikan dukungan secara aktif.

Seperti dijelaskan di atas, lembaga-lembaga yang telah melaksanakan dukungan di Kawasan Timur Laut menunjuk perlunya upaya-upaya untuk menanggapi keunikan wilayah tersebut (geografis, sosial-ekonomi, etnis) dan juga kapasitas para pemangku kepentingannya, dengan cara mengatur komponen proyek dan sistem implementasi secara fleksibel.

Khusus untuk Propinsi Papua, yang dirasa sulit untuk sekedar melihatnya sebagai perpanjangan dari daerah lain di Indonesia, perlu dirancang suatu pendekatan yang tepat/ efisien dan efektif dengan bekerjasama dengan LSM lokal yang berpengalaman⁶². Sehubungan dengan hal itu, seperti telah dijelaskan di atas bahwa BaKTI telah mengakumulasi informasi di Kawasan Timur Laut dan dari fakta tersebut untuk pelaksanaan proyek ada sumber daya yang dibutuhkan. Untuk itu BaKTI bisa menjadi calon mitra yang kuat sekiranya kegiatan dukungan dan kerjasama di Kawasan Timur Laut khususnya di wilayah Sulawesi atau lebih timur akan dilaksanakan.

⁶¹ Di Propinsi target yang lain dilaksanakan 4 komponen, pendidikan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi dan kesehatan.

⁶² Dari pendapat COMMIT, USAID, DFAT.

4-3 Contoh dari Negara Lain dalam Mendukung Sektor Pengembangan Daerah

Di sini, berdasarkan pengalaman dalam mendukung sektor pengembangan daerah (khususnya peningkatan kapasitas pemerintah daerah terkait dengan pengembangan daerah) di negara-negara lain, akan dipaparkan pendekatan teknis yang dianggap cocok atau berguna bagi pengembangan daerah di Indonesia.

(1) Pendayagunaan Dewan Kerjasama dengan cara Mempertalikan Desa untuk Penyediaan Layanan Publik yang Lebih Baik: Contoh dari Palestina

Secara umum penguatan pertalian ke arah vertikal, seperti antara pemerintah pusat dan badan/ lembaga pemerintah daerah dan atau lembaga pemerintah daerah dengan komunitas-komunitas, merupakan salah satu permasalahan penting dalam pengembangan perdesaan. Di Indonesia, JICA juga menganggap desa sebagai salah satu wilayah strategis untuk kerjasama setelah tahun 2002 ketika pertalian antara lembaga lembaga pemerintah pusat dan daerah melemah sebagai konsekuensi dari desentralisasi. Sebagai contohnya, CDP menekankan pentingnya pendirian “Mekanisme Kerjasama (Mekanisme *Kyodo*)” untuk memperkuat pertalian antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam komunitas-komunitas. Di samping pertalian vertikal, pertalian horisontal juga penting. Pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah seperti desa dengan sumber daya dan kapasitas yang terbatas, memperkuat pertalian horisontal diantara desa desa bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.

Di Palestina, terdapat lebih dari 480 unit pemerintah daerah (UPD) yang terbentuk dari suku suku. Masing masing unit diperuntukkan memberikan layanan ke masyarakat, selanjutnya unit diperkenalkan di berbagai wilayah. JSC (*Joint Service Council*) juga melakukan pembangunan wilayah dan menyediakan layanan masyarakat yang seharusnya menjadi tanggungjawab UPD. Peran JSC mencakup terutama dalam tiga area berikut:

- Mempromosikan dan mengatur kegiatan komunitas : mempromosikan pemanfaatan peluang kegiatan ekonomi secara efektif untuk para penghuninya dengan mendorong pertukaran dan berbagi informasi serta kerjasama diantara para penghuni,
- Penyediaan Layanan (Langsung) : menyediakan layanan masyarakat sebagai lembaga pemerintah setempat,
- Penyediaan Layanan (Tidak Langsung): memantau, mengkoordinasikan dan mempromosikan penyediaan layanan lembaga lembaga pemerintah pusat, dan mengadministrasikan beberapa dari hal hal tersebut atas namanya.

UPD bisa secara efektif menggunakan sumber daya dan kapasitas mereka yang terbatas dengan saling melengkapi satu sama lain melalui melakukan kerjasama sebagai sebuah JSCs. Manfaatnya adalah, sebagai hasil dari suatu skala ekonomi, mereka akan mampu menyediakan layanan tertentu dimana sebuah UPD sendirian tidak akan mampu menyediakannya. Dengan memanfaatkan mekanisme ini, sebuah proyek JICA membantu banyak UPD menyediakan layanan kepada warganya di Wilayah West Bank, termasuk di dalam layanan tersebut adalah pengelolaan sampah (sebuah JSC terdiri dari 17 UPD), pembangunan dan pengoperasian sebuah taman kanak kanak (sebuah JSC terdiri dari 4 UPD), pengoperasian bis umum (sebuah JSC terdiri dari 4 UPD), pemasangan peralatan distribusi sumber tenaga dan pengumpulan tagihan listrik (sebuah JSC terdiri dari 3 UPD), dan juga pendirian dan pengoperasian pusat kegiatan kaum muda (sebuah JSC terdiri dari 6 UPD), dan sebagainya.

Dengan pemanfaatan Dana Desa, desa desa di Indonesia saat ini akan menanggungjawab lebih berat di dalam menyediakan layanan kepada warganya. Namun, mesti menjadi perhatian bahwa layanan mungkin tidak disediakan secara efektif dan efisien karena pengalaman dan kapasitas mereka kurang. Walaupun telah ditetapkan oleh undang undang bahwa pemerintah kabupaten bertanggungjawab melaksanakan proyek proyek pembangunan dan menyediakan layanan untuk daerah yang mencakup banyak desa, undang undang Desa juga mengizinkan desa desa bekerjasama dan melaksanakan beberapa kegiatan bersama dengan memanfaatkan dana desa. Hingga saat ini, mayoritas kegiatan pembangunan yang dilakukan di tingkatan desa adalah proyek proyek pembangunan prasarana skala kecil sehingga orang orang desa sendiri menyediakan tenaga kerjanya, tetapi Dana Desa akan memberi peluang desa desa untuk melaksanakan proyek proyek berskala lebih besar. Lebih dari itu, andai kata beberapa desa bekerjasama dan menggabungkan sumber dayanya, bahkan proyek yang lebih besarpun, yang memberikan manfaat berskala ekonomi, dapat dipertimbangkan dengan bantuan dan arahan dari pemerintah kabupaten dan atau setempat.

(2) Penerapan Sistem Alokasi berbasis Kinerja dalam Pentransferan Dana Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah: Contoh dari Bangladesh, Indonesia

Beberapa orang mengatakan alasan mengapa lembaga pemerintah daerah tidak menyediakan layanan yang baik kepada para penduduknya adalah bukan karena kurangnya kapasitas atau otoritas, tetapi disebabkan oleh kurangnya insentif. Berikut adalah contoh penerapan insentif untuk meningkatkan tatakelola pemerintah daerah berdasarkan sistem insentif⁶³.

Bangladesh mempertimbangkan penggunaan pendekatan alokasi berbasis kinerja (ABK) untuk memutuskan jumlah dana intern pemerintah (*block grant*) untuk ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (*Upazilas*), yang digunakan terutama untuk pembangunan prasarana⁶⁴. Ini merupakan mekanisme pemberian dana hibah untuk *Upazilas* yang mendapatkan nilai paling tinggi dengan menggunakan indikator tatakelola yang telah dibuat sebelumnya untuk mengevaluasi dan membuat peringkat tatakelola para pemerintah *Upazila*. Mekanisme ini berfungsi sebagai insentif untuk lembaga pemerintah *Upazila* untuk meningkatkan tatakelola dan melaksanakan proyek proyek mereka yang menjawab kebutuhan komunitas dengan memanfaatkan dana hibah ini. Indikator tatakelola yang digunakan di sini diseleksi dari antara tatakelola-tatakelola yang ditetapkan dalam undang undang *Upazilas* sebagai tanggungjawab mereka.

Serupa dengan ini, Bank Dunia dengan memakai mekanisme PBA (*Performance-based Allocation*), memberikan *block grant* kepada Desa Desa (Gabungan Desa). Jumlah rata rata *block grant* yang disediakan untuk desa adalah sekitar satu Juta hingga 1,7 juta yen. 25% dari jumlah total dibagi rata dan dibagikan ke seluruh desa, dan sisanya (75%) dibagikan memakai mekanisme PBA, berdasarkan jumlah penduduk, wilayah dan kinerja pemerintah desa seperti pencapaian perencanaan partisipatif, penyerahan laporan kemajuan setengah tahun atau tahunan, anggaran terbuka, penyampaian laporan keuangan, pemeriksaan, dll.

Korupsi di Bangladesh dikatakan sangat parah dan banyak dari hibah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walau demikian, Bank Dunia percaya bahwa transparansi di dalam mekanisme PBA akan menjadi insentif yang efektif bagi pemerintah Unions.

Terdapat beragam pendapat mengenai apakah pendekatan PBA, dimana sejumlah pendanaan pembangunan yang lebih besar akan disediakan kepada unit unit pemerintahan yang menunjukkan kinerja lebih baik

⁶³ *Village and Sub-district Functions in Decentralized Indonesia*. Hans Antlov and Sutoro Eko, 2012

⁶⁴ Dari Proyek JICA untuk *Study for Integrated Development Upazilas of Bangladesh*.

berdasarkan prinsip persaingan, cocok untuk Indonesia. Desa/ komunitas yang dianugerahi keadaan yang lebih baik, seperti kedekatan dengan wilayah perkotaan yang darinya secara relatif sumberdaya keuangan dan manusia yang tinggi mudah didapatkan, dimungkinkan mendapat dana pembangunan yang lebih jika dibandingkan dengan komunitas/ desa yang kurang beruntung dan oleh karenanya kesenjangan diantara mereka semakin melebar. Kecuali itu ada resiko, hal demikian akan mendorong rasa ketidakadilan diantara para penduduk wilayah yang pembangunannya tertinggal. Untuk itu pertimbangan harus diberikan akan bagaimana menerapkan pendekatan mekanisme PBA untuk kasus Indonesia, yang memiliki kebijakan pembangunan nasional untuk menghapuskan ketidakseimbangan antara wilayah.

Berkaitan dengan hal ini, mekanisme PBA yang dimasukkan dalam PNPM-Generasi yang dilaksanakan hingga tahun 2014 akan membantu. PNPM-Generasi adalah program dimana suatu *block grant* diberikan kepada desa/ komunitas yang pencapaian MDGs di sektor kesehatan dan pendidikannya telah tertinggal, untuk mendorong desa/ komunitas tersebut meningkatkan indikatornya. Dalam program ini, Bank Dunia memperkenalkan sistem alokasi PBA kepada 2.100 desa di 264 daerah dan mencoba menganalisa apakah PBA berhasil sebagai sistem insentif di sektor pendidikan dan kesehatan ibu dan anak.

Sebagai hasil dari pengalokasian 20% dari total jumlah hibah *block grant*, efek PBA sebagai insentif diakui hingga 18 bulan setelah mulai, secara khusus di sektor kesehatan, berdasarkan 12 indikator. Setelah sekitar 30 bulan, perbedaan antara wilayah dengan dan tanpa pendekatan PBA tidak nampak lagi, walaupun hal ini bukan karena efek insentif yang telah luntur, tetapi bahwa efek *block grant* itu sendiri mulai menjadi bukti, meski kinerja desa desa tersebut rendah dan oleh karenanya menerima jumlah lebih rendah pula. Pada akhirnya, studi menyimpulkan bahwa PBA berhasil sebagai insentif yang efektif dan mempercepat menumbuhkan hasil pada tahap awal program⁶⁵.

Terlihat ada tendensi kuat di Indonesia bahwa memberi pengakuan atas karya/ prestasi bagus atau memberikan sertifikat atau penghargaan atas upaya khusus merupakan bentuk insentif bagi pejabat pemerintah daerah. Namun demikian, PBA, yang berdasar atas prinsip persaingan, juga dipandang efektif sebagai salah satu insentif untuk mendorong upaya-upaya pemerintah daerah. Untuk menghindari praktek tidak-adil, beberapa mekanisme inovatif mungkin perlu digunakan seperti memulai PBA dengan proporsi yang relatif kecil dari jumlah total dan secara bertahap menambah proporsinya dengan cara mengamati bagaimana hal itu bekerja, atau memberikan hibah khusus secara terpisah bagi komunitas/ desa yang tidak beruntung.

PBA dapat diperkenalkan pada proyek proyek pinjaman yang untuk pembangunan yang berbasis komunitas perdesaan. Terkait hal ini bantuan untuk pembangunan kapasitas bagi para pejabat pemerintah daerah, yang terkait dengan tatakelola yang baik dan ketentuan akan layanan jasa masyarakat yang berkualitas tinggi, perlu disediakan.

(3) Program Pelatihan untuk Memperkuat Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah: Contoh dari Bangladesh

Pemerintah daerah di Bangladesh terdiri 64 kabupaten, 488 daerah (*Upazilas*) dan 4.550 desa (*Unions*). Di Pemerintahan daerah, seperti kabupaten dan *Upazila*, terdapat petugas elit administrasi yang dipekerjakan secara langsung dan dikirim dari pemerintah pusat dan terdapat juga seorang kepala *Upazila* dan para

⁶⁵ *Should aid reward performance? Evidence from a field experiment on health and education in Indonesia*, American Economic Journal: Applied Economics 2014, 6 (4): 1-34, Benjamin A. Olken, Junko Onishi, and Susan Wong.

anggota dewan lokal yang dipilih oleh warga negara setempat melalui pemilihan. Pada tingkat desa, terdapat petugas-petugas yang dikirim dari tingkat lebih atas (seorang sekretaris dari kabupaten dan beberapa petugas sektor dari pemerintah *Upazila*) yang ditempatkan, dan terdapat juga seorang kepala terpilih dan anggota-anggota dewan. Yang bertanggungjawab untuk pembangunan komunitas adalah *Upazilas* dan *Unions*, dan meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas penyediaan layanan publik dari dua tingkatan pemerintahan ini adalah hal yang sangat penting.

Berdasarkan hal tersebut, UNDP/ UNCDF dan JICA secara terpisah membantu pelatihan pemerintah *Upazila*, sementara itu Bank Dunia melakukan yang sama untuk tingkat Union. Program pelatihan ini memiliki tiga karakteristik berikut:

Poin pertama adalah bahwa pada pelatihan perberdayaan untuk *Upazilas* yang menyangkut struktur dan peran pemerintah *Upazilas* dan juga peranan hibah lokal, kepala, pejabat pemerintah dan anggota dewan disatukan untuk menerima pelatihan dengan isi yang terbagikan. Hal ini merupakan cerminan dari gagasan bahwa sangatlah penting memahami posisi dan peran satu dengan yang lain, disatukan untuk memajukan pembangunan wilayah, sementara terdapat peran yang berbeda bagi pejabat pemerintah dan anggota dewan dan mereka masing-masing mesti memiliki pengembangan kapasitas, berdasarkan peraturan.

Poin kedua adalah memanfaatkan pusat-pusat pelatihan di seluruh negeri, dan pelatihan jangka pendek dilaksanakan dalam satu wadah terpusat yang menargetkan seluruh *Upazilas*. Melalui pelatihan ini, para pejabat pemerintah dan anggota dewan dari seluruh *Upazilas* paling tidak bisa berbagi pengetahuan dasar, karena mereka diandaikan berada dalam lapangan permainan yang sama.

Poin ketiga adalah membangun dan menggunakan "Tim Sumber Daya *Upazila*," yang terdiri dari para petugas *Upazila* yang bisa berperan sebagai nara sumber untuk memberikan pelatihan atau layanan konsultasi bagi pemerintah *Union*. Tim Sumber Daya *Upazila* memberi dukungan ke *Union*, berperan sebagai nara sumber bukan hanya untuk sekali pelatihan tetapi lebih pada yang sedang berjalan dan bersifat rutin.

Di Indonesia, menjawab pemberlakuan Undang-undang Desa, pelatihan secara "Berjenjang" bagi pejabat administratif dari pusat ke propinsi dan atau kabupaten ke desa-desa sedang direncanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk memastikan akuntabilitas ke arah horisontal dan ke arah bawah, memperkuat kapasitas dan kesadaran tidak hanya pejabat administratif tetapi anggota dewan sangatlah perlu. Di Indonesia, sebagaimana di Bangladesh, ada kebutuhan untuk melibatkan anggota dewan desa dalam pelatihan. Di samping itu, untuk memastikan daerah berperan terkait dengan pelaksanaan penggunaan dana (melakukan pemantauan dan evaluasi), sangatlah berguna mempertimbangkan untuk membentuk tim sumberdaya di tingkat daerah dengan dukungan dari Kabupaten.

BAB 5. Arahan Bantuan JICA untuk Sektor Pengembangan Daerah

Bab ini akan membahas bantuan JICA yang mungkin untuk sektor pengembangan daerah berdasarkan kebijakan pengembangan daerah/lembaga lembaga di bawah pemerintah RI saat ini (Bab 2), memanfaatkan aset JICA yang terkait dengan sektor ini (Bab 3). Pembahasan juga akan memasukkan pertimbangan pertimbangan atas hubungan yang bersifat melengkapi atau untuk berbagi peran ketertarikan di antara Negara Negara/ Institusi Institusi Internasional lainnya, atas dasar pencapaian mereka di sektor ini dan tanggapannya atas PNPM (Bab 4).

5-1 Pemikiran Dasar dalam Pertimbangan Arahan Bantuan

Bab 2 meninjau ulang isi janji kampanye Presiden baru (NAWACITA) dan PNPM, dimana empat butir ditekankan sebagai kebijakan pengembangan daerah: pengembangan industri di daerah daerah di luar Jawa, peningkatan konektivitas, pembangunan sumber daya manusia untuk industri daerah, dan peningkatan lingkungan investasi/ bisnis daerah. Di sini, dapat diakui dua tema utama yang diprioritaskan, yaitu **pengembangan industri daerah** dan **peningkatan konektivitas**. Di samping dua tema tersebut, **peningkatan desentralisasi** sampai di tingkat desa yang diarah oleh pemerintah saat ini bisa dilihat sebagai permasalahan penting juga. Demikian, Bab ini pada hakikatnya membahas bagaimana JICA bisa atau seharusnya melakukan intervensi baik dalam kerjasama teknis maupun bantuan keuangan kepada program/ tindakan nyata yang sedang direncanakan/ dilaksanakan (Dana Desa, Sains/ Teknopark, dan Poros Maritim (atau Tol Laut)) untuk mendekati tiga permasalahan penting tersebut (Gambar 5-1).



Gambar 5-1 Permasalahan dan Program Program di Sektor Pengembangan Daerah di Indonesia

Dalam proses pembahasan bantuan JICA di masa mendatang, kelima butir berikut harus menjadi catatan setelah mempertimbangkan pendapat/ masukan yang diperoleh dari pertemuan para narasumber intelektual di Jepang dan dari pertemuan para pemangku kepentingan di Indonesia (lihat bagian 5-2);

- ① Kesenjangan yang kian melebar walaupun ekonomi nasional Indonesia sedang dalam tahap pertumbuhan. Dalam pengembangan daerah, peningkatan pendapatan, pengembangan industri dan pengentasan kemiskinan masih merupakan permasalahan penting. Dalam pengembangan daerah di Indonesia, pengembangan industri/ ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan harus ditekankan dengan memanfaatkan pengalaman/ pengetahuan negara Jepang yang sebelumnya mengalami pengembangan lahan nasional dan juga pembangunan ekonomi daerah secara holistik/ jangka panjang.
- ② Apabila pendekatan tersebut di atas diambil, memberi dukungan terhadap serangkaian proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan secara benar adalah hal penting. Karakteristik/ keunggulan Jepang (studi dan perencanaan ditinjau dalam jangka panjang dan komprehensif) dapat digunakan dalam rangka mempromosikan pengembangan daerah secara terencana dan konsisten.

- ③ Mekanisme koordinasi/ kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah tetap diperlukan pada tahap pelaksanaan pengembangan daerah terkait desentralisasi. Agar supaya mekanisme tersebut berfungsi dengan benar, pemerintah harus memainkan perannya untuk setiap posisi yang diperlukan. Secara khusus, bantuan bagi peningkatan kapasitas para aparat pemerintahan daerah perlu ditingkatkan.
- ④ Masa depan program/ tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan Pemerintah RI saat ini tidak cukup jelas, sementara itu beberapa negara donor/ lembaga internasional telah mulai memberikan bantuan terhadap program program tersebut. Dengan memahami sikap mereka dan menyesuaikan dengan permintaan dari pihak Pemerintah RI, negara Jepang/ JICA diharapkan juga sesegera mungkin mulai memberikan bantuan yang tepat.
- ⑤ Nilai lebih/ atau keunggulan dimiliki negara Jepang/ JICA harus dimasukkan dalam bantuan untuk menarik keminatan dari pihak Indonesia. Bantuan jangka menengah dan panjang terhadap proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan harus diakomodasi, sambil memperkenalkan unsur-unsur teknis unggul seperti pembangunan SDM, pencegahan/ mitigasi bencana alam, pendekatan energi terbarukan, konservasi lingkungan, gerakan OVOP atau *Michi-no-eki*, dan sebagainya.

Lebih dari itu, hasil yang ditinjau ulang di Bab 3 menyarankan penggunaan pencapaian JICA sebagai aset dalam pengembangan daerah di Indonesia. Aset JICA termasuk aparat pemerintahan dan fasilitator pembangunan yang dilatih melalui bantuan peningkatan kapasitas pemerintahan untuk sistem desentralisasi, dan COMMIT yang dibentuk oleh para peserta pelatihan JICA sebelumnya. Selain itu, pengetahuan/ pengalaman nyata JICA telah disatukan di dalam pencapaian dari studi mengenai promosi UKM/ industri daerah yang dilaksanakan bersama pemerintah pusat/ daerah sebagai mitra kerja. Bantuan teknis yang saat ini dilaksanakan di bidang tersebut adalah penguatan pertalian kerjasama antar pemerintah-swasta atau industry-perguruan tinggi-daerah (proyek promosi IKM melalui peningkatan layanan dukungan (Kemenperin) dan proyek C-BEST (Universitas Hasanuddin)) dikenal sebagai aset hidup.

Sedangkan, program pengembangan wilayah dan berbagai proyek dana pinjaman terlaksana di Indonesia Bagian Timur mewariskan aset-aset seperti layanan jasa yang meningkat di wilayah perdesaan/ perkotaan, pengembangan industry/ ekonomi dan peningkatan prasarana/ sistim terkait transportasi (Gambar 5-2).



Gambar 5-2 Pencapaian/ Aset JICA yang terbentuk terkait dengan Agenda Pembangunan Indonesia

Dengan pemanfaatan aset-aset di atas, JICA bisa memaksimalkan keunggulan kompetitifnya atas negara-negara donor/ lembaga internasional lainnya untuk suatu bantuan yang efektif/ efisien.

5-2 Pendapat dan Nasehat dari Para Intelektual dan Pemangku Kepentingan

Tim Studi mengadakan rapat para Intelektual⁶⁶ di Jepang pada akhir bulan Mei, di tahap pertengahan Studi, yang diikuti dengan rapat para pemangku kepentingan⁶⁷ di Indonesia pada pertengahan bulan Juni. Dalam kedua rapat tersebut, tim melaporkan perkembangan studi dan menerima pendapat dan nasehat dari para peserta yang memberikan komentar dari sudut pandang tiga prioritas di atas dan “keunikan bantuan Jepang”. Hasil utama dari masing masing rapat terangkum di Tabel 5-1 dan 5-2, secara terpisah.

Tabel 5-1 Pendapat dan Nasehat yang diterima dari para Intelektual Jepang

Area/ Program	Pendapat dan Nasehat Pokok
Dana desa	<ul style="list-style-type: none"> – Desa yang muncul di tengah panggung desentralisasi yang digantikan oleh kabupaten/ kota, bisa menimbulkan kebingungan. JICA lalu akan mempertimbangkan untuk intervensi pada “tataran yang di lebih atas dari tataran desa”. – Untuk pengembangan wilayah, baik pendekatan dari atas (perencanaan dan pelaksanaan dikendalikan oleh pemerintah daerah) maupun pendekatan dari bawah ke atas (perencanaan dan pelaksanaan oleh masyarakat) diperlukan. Demi pendekatan dari bawah ke atas, keberadaan fasilitator diperlukan. – Terkait penyaluran dana desa, persoalan mungkin terjadi seperti bertambahnya jumlah desa atau pecahnya konflik perbatasan antar desa. Pengelolaan batas air atau perencanaan khusus mencakup berapa desa akan menjadi persoalan penting. Fasilitator yang dikembangkan JICA dapat berperan menyelesaikan persoalan tersebut di tingkat kecamatan atau kabupaten. Mereka perlu memiliki teknik dan ketrampilan menanggulangi permasalahan terkait termasuk juga kemampuan berkoordinasi sekaligus perlu belajar bagaimana memobilisasi sumber daya dari luar secara tepat.
Konsep Science/ Technopark	<ul style="list-style-type: none"> – Untuk promosi S/TP, kerjasama dengan universitas setempat menjadi kunci. S/TP bisa menjadi alat untuk menghubungkan pengembangan perkotaan dan perdesaan. – Pembangunan dan komersialisasi produk, atau penguatan hubungan pemerintah-perguruan tinggi-industri local dapat memanfaatkan pencapaian/ hasil dari bantuan JICA di sektor UKM (studi pengembangan, kerjasama teknis, program pengembangan konsultan UKM (= <i>shindanshi</i>))
Tol Laut	<ul style="list-style-type: none"> – Pengembangan daerah pedalaman harus ditekankan termasuk pengembangan infrastruktur seperti peningkatan pelabuhan dan transportasi laut. Pembangunan desa perikanan atau sumberdaya kelautan dapat nampak mirip seperti Jepang, dan intervensi Jepang akan signifikan dengan validitas tinggi. Menargetkan pengembangan pelabuhan setempat di atas melalui “Proyek Pembangunan Pelabuhan Kecil di Indonesia bagian timur” (1998-2005), pengembangan yang mungkin dapat direncanakan/ dilaksanakan untuk desa perikanan atau kota berbasis perikanan.
Pengembangan Daerah secara umum	<ul style="list-style-type: none"> – Yang menjadi perhatian kemudian adalah percepatan perpindahan penduduk di seluruh negeri dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan dan pemusatan penduduk di kota. Pembangunan sarana/ parasarana di kota kota di wilayah dan promosikan industri di tingkat kabupaten/ kecamatan, mengembangkan kota yang menarik pemuda dan orang tua menjadi fokus mungkin. – Areal sasaran untuk pengembangan wilayah adalah areal dimana JICA telah mengumpulkan banyak pengalaman. Secara khusus, wilayah timur termasuk Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Barat/ Timur, direkomendasikan. Dicatat bahwa khususnya Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua memiliki karakteristik etnis/ budaya yang lebih signifikan dibanding hal yang sama di Sulawesi, dan mengandung benih konflik. – Dalam hal intervensi berupa pembangunan kota kota daerah, program mencakup banyak sektor harus dirancang untuk menghasilkan karya karya terbaik berdasarkan pengelolaan yang tepat. Untuk menukung keaslian Jepang, apa yang bisa difokuskan adalah “pengembangan sumberdaya manusia” dan “ahli teknik/ pengetahuan dimana Jepang sebagai negara maju sedang menghadapi persoalan persoalan baru (lingkungan/ energi, pengendalian bencana, masyarakat berusia tua)”.

Sumber : Dirangkum dari berita acara rapat yang dikumpulkan oleh Tim Sudi

⁶⁶ Dr. Masaaki Okamoto (*Associate Professor, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto Univ.*), Mr. Hajime Koizumi (*Director, Institute of Development Policy Research*), dan Dr. Yuri Sato (*Chief Senior Researcher, Area Studies Center, Institute of Developing Economies-JETRO*) menghadir.

⁶⁷ Perwakilan dan Kementerian PUPR, LIPI, Kemendagri, Kemenperin, Kemenkeu, dan Kemenkes menghadir.

Tabel 5-2 Pendapat dan Nasehat yang diterima dari para Pemangku Kepentingan Indonesia

Area/Program	Pendapat dan Nasehat Pokok
Dana Desa	– Kabupaten atau propinsi mempunyai tanggung jawab utama terhadap pengembangan kapasitas (pemberdayaan) aparat desa. Dengan pemahan tersebut, Kementerian Dalam Negri telah melaksanakan pelatihan berjenjang bagi aparat desa utamanya di pusat pelatihan yang terletak di 3 kota Lampung, Yogyakarta, dan Malang. Kerjasama tekins JICA dengan demikian diharapkan meningkatkan isi/ materi pelatihan.
Science/ Technopark	– Untuk promosi S/TP, sangat perlu membuat model rantai nilai untuk dikembangkan secara berkelanjutan, melalui kerjasama diantara industri, perguruan tinggi dan pemerintah. Kunci yang lain adalah memikirkan jenis nilai yang mana bisa ditambahkan ke industry lokal. Dari perspektif perguruan tinggi, adalah penting menerapkan teknik yang secara universal/ konvensional sesuai dengan kebutuhan setempat, daripada teknologi tinggi.
Tol Laut	– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan mempromosikan pengembangan prasarana dan klaster industry terutama di 35 kota utama di seluruh Indonesia sebagai wilayah pengembangan strategis. Dalam konteks pengembangan wilayah dan Tol Laut, terdapat pengembangan daerah pedalaman yang masuk klaster industri. Lebih dari itu, agropolitan (kota kota berbasis pertanian) atau minapolitan (kota kota berbasis perikanan) harus dikembangkan dengan sasaran kota kota lokal/ setempat.
Lain Lain	– Terkait dengan Proyek Pengembangan Wilayah untuk Pengurangan Kemiskinan (RISE), kapasitas pemerintah daerah dan komunitas belum memadai meskipun diadakan beberapa pelatihan selama periode pelaksanaan program. Kurangnya koordinasi vertikal/ horisontal memperlemah konsistensi dalam program/ anggaran diantara propinsi/ kabupaten (kecamatan). Juga, akan sulit bagi komunitas untuk bertanggungjawab terhadap operasi & pemeliharaan atas fasilitas yang terpasang yang memerlukan bantuan pemerintah kabupaten – Dari pertimbangan bantuan unik Jepang, gagasan yang fasilitas/ fungsinya menyerupai " <i>Michi-no-eki</i> ", adalah menarik. Fasilitas tersebut dapat mendukung promosi pariwisata daerah setempat.. – Konsultan UKM (<i>shindanshi</i>) yang bertugas di bidang industri/ usaha bisa dianggap sebagai asset JICA, namun sumber daya manusia tersebut tersebar diantara direktorat direktorat dan bagian bagian lain karena terdesentralisasi.

Sumber : Dirangkum dari berita acara rapat yang dikumpulkan oleh Tim Sudi

Untuk dana desa, ditunjukkan bahwa pemberdayaan dan penambahan jumlah fasilitator penting meskipun begitu pemberdayaan staf pemerintahan desa juga penting, khususnya tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dari desa yaitu kecamatan dan kabupaten perlu diprioritaskan. Untuk Science/ Technopark, penting dipertimbangkan bagaimana melibatkan universitas dan lembaga litbang setempat. Pada saat yang sama, harus dipertimbangkan bagaimana mengembangkan dan menyediakan teknik pengolahan produk untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan setempat di sektor industri.

Terkait Tol Laut, banyak yang memberikan pendapat dan saran bahwa tidak hanya peningkatan pasokan layanan seperti pengembangan pelabuhan dan penguatan transportasi laut yang menjadi tujuan tetapi juga penguatan sisi permintaannya yaitu promosi kegiatan sosial ekonomi daerah pedalaman. Mereka menunjukkan bahwa pengembangan desa perikanan dan sumberdaya kelautan atau "*Michi-no-eki*" akan nampak sangat Jepang dan mempercepat pengembangan ekonomi daerah pedalaman.

Di samping poin poin tersebut di atas, pendapat dan nasehat/ saran dari para intelektual dan pemangku kepentingan menjadi kata kunci yang penting seperti pengembangan kota kota besar dan kecil di wilayah timur untuk menarik kaum muda dan menanggulangi masyarakat berusia tua, pengembangan sumberdaya manusia, pengenalan teknologi unik Jepang (penanggulangan lingkungan/energi, pengendalian bencana, dll.), serta konsultasi UKM. Pada bagian 5-3 berikut, bantuan JICA yang mungkin akan dibahas dan diusulkan dengan gagasan ini sebagai pertimbangan.

5-3 Program Bantuan yang Mungkin

(1) Kerangka yang diusulkan untuk bantuan JICA

Bagian ini akan memaparkan program bantuan yang mungkin sejalan dengan tiga tema pengembangan daerah di Indonesia, berdasarkan pembahasan di 5-1 mengacu pada pendapat/ saran di 5-2 (Gambar 5-3).

Terkait dengan peningkatan desentralisasi, bantuan berikut bisa diusulkan: dua bantuan teknis (Pembangunan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Pelatihan Fasilitator Desa) dan bantuan finansial (Proyek Pembangunan Prasarana Perdesaan: versi berikut dari RISE-II yang saat ini berlangsung).

Terkait pengembangan industri daerah, bantuan bagi industri-akademisi-masyarakat dalam kaitannya dengan pengembangan industri daerah, pengumpulan informasi tentang Science/ Technoparks melalui proyek proyek bantuan teknis JICA yang saat ini berada di tahap pelaksanaan. dilaksanakan untuk tujuan yang sama juga.

Terkait peningkatan konektivitas, bantuan strategis dan jangka menengah/ panjang dapat dilaksanakan sesuai dengan pencapaian/ pengalaman JICA di Wilayah Indonesia Timur. Untuk hal ini, suatu pendekatan yang konsisten harus dilakukan mulai dari studi dan perencanaan dengan mana suatu bantuan teknis bisa mengikutinya, lalu akan disusul dengan suatu bantuan finansial untuk pembangunan prasarana/ infrastruktur.

Skema Bantuan Bidang Sasaran	Bantuan Teknis	Bantuan Finansial
Peningkatan Desentralisasi <small>* terkait dgn Dana Desa</small>	<i>Bantuan untuk Pembangunan Kapasitas Pemerintah Daerah</i> ● Pembangunan Kapasitas Pemerintahan Desa ● Pelatihan Fasilitator Desa	● Pembangunan Prasarana Perdesaan (tahap lanjutan dari RISE-II)
Pengembangan Industri Daerah <small>* terkait dgn Sains/Tekno Park</small>	<i>Bantuan untuk Promosi IKM/ Industri Daerah</i> ● Penguatan Pertalian antar Industri, Akademisi dan Masyarakat dalam Promosi Industri Daerah	
Peningkatan Konektivitas <small>* Terkait dgn Poros Maritim</small>	<i>Bantuan untuk Pembangunan Wilayah Indonesia Timur</i> ● Studi Pembangunan Wilayah Indonesia Timur ● Pembangunan Kota Maritim Kecil/ Menengah ● Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan dalam rangka Promosi Permodalan	○ Pemb. Infrastruktur (akan disusun) ○ Pemb. Infrastruktur (akan disusun)

Catatan) ● diharapkan akan mulai dalam TA2015, ● diharapkan akan dilaksanakan pada TA2016 atau TA2017 paling lambat

Gambar 5-3 Usulan Kerangka Bantuan JICA

(2) Isi program bantuan

Berdasarkan kerangka yang diusul di atas, isi dari bantuan dijelaskan secara berurutan sebagai berikut;

A) Bantuan untuk Pembangunan Kapasitas Pemerintahan Dearah

Bantuan terkait Program Dana Desa

Program Dana Desa sekarang ini telah mulai distribusikan. Bisa dikatakan bahwa pemerintah desa harus berkonsentrasi dalam menggunakan dana pembangunan desa secara efektif/ efisien untuk mencegah keterlambatan pembangunan masyarakat perdesaan dengan mana pemerintah pusat dan negara donor sebaiknya memberikan dukungan. Selama beberapa tahun pertama, pemerintah tingkat desa akan kekurangan kapasitas dan para fasilitator yang ditugaskan oleh pemerintah pusat akan memainkan peranan penting dalam perencanaan, penyiapan dokumen anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengelolaan dana, dll., sebagaimana mereka telah melaksanakan dalam PNPM.

Kementerian Desa sedang berencana mempekerjakan para fasilitator desa untuk sementara waktu dengan anggaran mereka, mengirim mereka ke wilayah perdesaan. Anggaran tersebut tersedia untuk tahun fiskal 2015, terkait hal itu sejumlah pinjaman Bank Dunia yang tersisa akan digunakan. Desa desa yang memiliki program dari donor yang lain atau dengan bantuan LSM lokal pada masa lampau, sudah membuat PRJMDes dengan bantuan mereka. Oleh karena itu, desa desa itu sementara waktu akan mampu melaksanakan program pembangunan selaras dengan rencana kerja atau daftar proyek.

Terkait pembangunan kapasitas pemerintahan desa, Kementerian Dalam Negeri telah merumuskan rencana pelatihan dengan bantuan DFAT, Australia. Pelatihan itu tidak akan memadai untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan kapasitas karena isinya hanya sebatas peninjauan menyeluruh atas peraturan desa, pembangunan desa, penyusunan anggaran, dan pengelolaannya, dll., dan dengan menargetkan tiga pejabat pemerintahan desa saja (kepala desa, sekretaris dan bendahara). Walau demikian, karena pelatihan direncanakan untuk diadakan di seluruh desa secara nasional (74.039 desa), dimana memerlukan penyelenggaraan yang sungguh sungguh, Ditjen Pembinaan Pemberdayaan Desa, Kemendagri tunjukkan niat bahwa tenaga ahli JICA membantu sebagian pelaksanaan pelatihan di desa desa dari beberapa propinsi di wilayah Indonesia Bagian Timur, sebagai contohnya juga memanfaatkan aset JICA seperti COMMIT dan pelatihan yang bernilai tambah dapat dilaksanakan (penambahan modul pelatihan untuk pembangunan partisipatif, peningkatan jumlah peserta pelatihan di setiap desa, termasuk anggota BPD, dll).

Di pihak lain, pemerintahan desa tidak hanya berfokus pada penggunaan dana desa yang efektif tetapi juga harus menargetkan “pembuatan tatakelola untuk memberikan layanan yang sama dan membangun desa dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban“. JICA diharapkan memberikan bantuan dalam pemaknaan yang demikian. Proyek proyek yang efektif adalah proyek seperti pembangunan kapasitas para aparat pemerintahan desa untuk merumuskan rencana rencana pembangunan desa jangka menengah dan panjang dan menyediakan layanan yang menjawab kebutuhan masyarakat, mengalokasikan uang dan melaksanakan rencana serta meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban ke atas/ sejajar dalam prosesnya⁶⁸.

Dana desa sejumlah 20,8 trilyun Rupiah akan dikucurkan untuk tahun fiskal 2015. Pemerintah RI ingin meningkatkan anggaran hingga 40 trilyun Rupiah untuk tahun fiskal 2016, hingga 70 atau 90 trilyun Rupiah untuk tahun fiskal 2017 dan 100 trilyun Rupiah untuk tahun fiskal 2018⁶⁹. Di sisi lain, tidak akan mudah bagi pemerintah RI menyediakan jumlah dana sebesar itu dari dirinya sendiri tanpa menerima bantuan dari lembaga internasional atau negara negara donor. Dana desa pada dasarnya disalurkan oleh Kementerian Keuangan langsung ke desa desa dan setiap desa diperbolehkan menetapkan bagaimana dana itu akan digunakan dengan bimbingan secara tahunan dari Kementerian Desa. Dana tersebut tidak harus habis dimanfaatkan untuk pembangunan prasarana/ sarana tetapi dapat digunakan untuk kegiatan pelatihan atau studi banding. Oleh karenanya, pinjaman yen tidak sesuai untuk dana desa.

⁶⁸ Di masa lampau, pembangunan dipimpin oleh para pemuka masyarakat, anggota BPD dan staf desa. Akan tetapi, dengan dilaksanakan PNPM, suatu metode pembangunan yang demokratis disosialisasikan yaitu pendekatan partisipatif untuk menampung keperluan masyarakat dan menyalurkan sumber daya untuk keperluan tersebut. Lebih dari itu, PNPM membangun kemampuan masyarakat untuk melakukan tindakan bersama secara mandiri dari pemerintah kabupaten/pusat. Meskipun begitu, menurut hasil evaluasi, penyediaan jasa pada tingkat masyarakat secara umum belum meningkat. “Tinjauan Tatakelola PNPM Perdesaan, Analisis tingkat masyarakat”, Andrea Woodhouse, 2012

⁶⁹ Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa membuat angka yang sama untuk perubahan dalam jumlah anggaran.

Dengan alasan tersebut di atas, proyek proyek kerjasama berurutan di bawah ini dapat dilaksanakan baik untuk Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, sebagai bantuan/ intervensi untuk peningkatan/ perluasan desentralisasi dan terhadap dana desa.

■ **Proyek Pembangunan Kapasitas Pemerintahan Desa**

Item	Keterangan		
Maksud dan Isi Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program pelatihan pembangunan kapasitas pemerintahan desa (fokus pada kepala desa, sekretaris desa, bendahara, anggota dewan desa) di beberapa desa/ wilayah perdesaan terseleksi dari Wilayah Indonesia Timur (misalnya; Prov. Sulsel, Prov. NTT), • Terdiri dari kedua komponen: i) komponen untuk pemerintah pusat (kurang dari satu tahun), dan ii) komponen untuk pemerintah daerah (dua tahun). <p><i>*perlu perhatian pada pembagian peran dengan DFAT (Australia)</i></p>		
Tujuan Pencapaian	Terbentuknya siklus manajemen pemerintahan yang meliputi serangkaian proses, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi, berkaitan dengan program desa/ perdesaan, dengan melaksanakan pelaksanaan pelatihan di beberapa desa percontohan sehingga kemampuan aparatur desa dan tokoh masyarakat desa dapat meningkat.		
Instansi Bersangkutan	Ditjen Pembinaan Pemberdayaan Desa, Kemendagri Pemerintah Daerah (misalnya; 2 propinsi → 4 kabupaten → 8 desa)		
Susunan Expert JICA	Tenaga Ahli Jangka Pendek Tim Tenaga Ahli (3~4 org) + Staf Indonesia		
Periode Pelaksanaan	TA 2015	TA 2016	TA 2017
	preparasi	Tenaga Ahli (kurang dari satu tahun)	Tim Tenaga Ahli + SDM Indonesia (dua tahun)

■ **Proyek Pelatihan Fasilitator Desa**

Item	Keterangan		
Maksud dan Isi Bantuan	Pelaksanaan program pelatihan pembangunan kapasitas fasilitator desa (sebelum dan setelah mulai tugasnya) dalam kaitan dengan Program Dana Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (misalnya; keterampilan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan secara partisipatif).		
Tujuan Pencapaian	Terbentuknya model pembangunan wilayah di tingkat desa/ perdesaan atas dasar pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan mengenai pembangunan partisipatif di lapangan kerja masing-masing yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan program pelatihan bagi fasilitator desa yang dikontraskan Kemendes.		
Instansi Bersangkutan	Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Kemendes Pusat Penelitian & Pembangunan, Pendidikan dan Pelatihan, Kemendes		
Susunan Expert JICA	Tenaga Ahli Jangka Pendek (1~2 org) + Staf Indonesia (misalnya; COMMIT)		
Periode Pelaksanaan	TA 2015	TA 2016	TA 2017
	preparasi	Tenaga Ahli Jangka Pendek (diulangi beberapa kali)	

Dalam hal melaksanakan bantuan/ intervensi seperti disarankan di atas, para fasilitator yang dikembangkan JICA atau COMMIT tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya lokal. Dalam hal ini, COMMIT sendiri menyadari bahwa mereka harus memiliki kemampuan yang diperlukan sebagai fasilitator desa dan bahwa koordinasi mendesak diperlukan untuk menyepakatinya sebagai suatu lembaga resmi yang akan melatih para fasilitator. Oleh karena itu, untuk memajukan upaya mereka sendiri dan mendukung kemandirian/ keberlanjutannya, JICA perlu memanfaatkan COMMIT di dalam kerjasama teknis tersebut di atas.

Karena peran lembaga pemerintahan desa akan kian membesar, peningkatan tatakelola desa merupakan persoalan yang amat penting di dalam masyarakat Indonesia. Sangat penting bagi JICA merancang dan melaksanakan program bantuan dari perspektif jangka panjang dengan pemikiran bahwa pembangunan kapasitas dan peningkatan tatakelola tidak bisa dicapai dalam sehari. Sementara itu, perlu perhatian pada rancangan program dukungan agar efek/ dampak dari kegiatan pilot yang ditawarkan di atas dapat

diterapkan ke daerah-daerah lainnya melalui pelaksanaan pelatihan secara nasional yang diharapkan untuk dilaksanakan atas inisiatif pemerintah pusat.

Versi Berikut dari Proyek Pengembangan Daerah untuk Pengurangan Kemiskinan (RISE-II)

Penyaluran dana desa telah dimulai setelah selesainya PNPM. Kemudian, pelaksanaan versi berikut RISE-II di tingkat perdesaan akan menjadikan pembagian peran dan garis batas antara Dana Desa dan RISE menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, lebih disukai apabila versi berikut RISE-II dilaksanakan tanpa intervensi langsung terhadap Dana Desa. Seperti ditunjukkan oleh para intelektual Jepang dan para pemangku kepentingan Indonesia, lebih masuk akal bagi JICA memfokuskan diri pada “tingkatan yang lebih tinggi dari desa” untuk membangun prasarana dengan memberikan manfaat umum bagi beberapa desa. Keuntungan dari besar skala dapat diharapkan melalui pembangunan sarana pasokan air bersih, dan pasar pasar yang umumnya digunakan beberapa desa. Menargetkan beberapa desa memerlukan koordinasi diantara beragam keinginan/ kepentingan, dan para fasilitator yang dibentuk JICA dapat dimanfaatkan untuk memperkuat fungsi kerjasama/ koordinasi di antara kabupaten, kota dan desa desa. Proyek kerjasama teknis di atas dapat berkerja sama.

Proyek RISE-II yang sedang berjalan melaksanakan pembangunan infrastruktur (jalan, sarana pasokan air bersih, fasilitas produksi, pasar, dll.) yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan industri daerah menuju KSK, untuk mencapai beberapa hasil positif. Di sisi lain, versi berikut RISE-II, terdaftar di Bluebook sebagai program untuk suatu wilayah kumuh (Pembangunan Prasarana Permukiman Perkotaan: RSID), yang mungkin akan berfokus pada pembangunan prasarana untuk meningkatkan lingkungan yang higienis (air dan saluran air kotor, sarana drainase). Sementara itu BAPPENAS dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen Cipta Karya) akan membicarakan dan berkoordinasi untuk menetapkan komponen proyek yang sebenarnya, RSID diharapkan akan memasukkan komponen prasarana untuk peningkatan industri, berdasarkan pencapaian RISE-II. Kombinasi anatra peningkatan lingkungan higienis dan promosi industri akan berkaitan dengan No. 5 (peningkatan kualitas kehidupan) dan No. 6 (peningkatan produktivitas dan daya saing) dari *NAWACITA*, yang menjamin kelangsungan politik.

Sebagaimana dinyatakan di atas, versi berikut RISE-II dapat disusun seperti di bawah untuk menjawab baik itu peningkatan industri maupun peningkatan lingkungan higienis.

■ Proyek Pembangunan Prasarana Perdesaan (=RSID)

Item	Keterangan		
Maksud dan Isi Bantuan	Dua jenis infrastruktur yaitu i) sarana dan prasarana membantu promosi industri (misalnya; jalan, pasar, fasilitas produksi/ pengolahan) dan ii) sarana dan prasarana membantu peningkatan lingkungan higienis (misalnya; pasokan air minum, jaringan drainase) akan dibangun di area sasaran yang terdiri dari lebih dari satu desa. <i>* perlu mengatutkan kerangka atuan kerja dari RSID (Rural Settlement Infrastructure Development) yang terdaftar dalam Bluebook</i>		
Tujuan Pencapaian			
Instansi Bersangkutan	BAPPENAS, PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Pemerintah Daerah (propinsi, kabupaten/ kota)		
Susunan Expert JICA	Pelaksanaan proyek akan didukung oleh TA (<i>Technical Assistance</i>) yang dapat diberikan dari proyek dana pinjaman. <i>* kemungkinan besar akan dikaitkan/ dikolaborasi dengan program peningkatan kapasitas pemerintah daerah</i>		
Periode Pelaksanaan	TA 2015	TA 2016	TA 2017
	preparasi	 Prosedur untuk Dana Pinjaman (Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, L/A, dsb)	 Tahap Pelaksanaan (k.l. dua tahun)

Lebih dari itu, penambahan komponen kredit mikro pada versi berikut RISE-II mungkin dibicarakan, berdasarkan latar belakang bahwa RISE-I tertarik pada pengenalan kredit mikro sebagai uji coba, mempelajari dengan baik pengalaman dan pelajaran dari program pembiayaan mikro yang dilaksanakan di dalam komponen PNPM lain. Pengenalan yang aktif atas pendekatan inklusif gender saat ini ditekankan pada proyek proyek pengembangan daerah. Penambahan dan pelaksanaan komponen pembiayaan mikro, perbaikan mata pencaharian untuk para wanita perkotaan untuk mendukung kegiatan ekonomi oleh individual dan kelompok akan memberikan kontribusi terhadap perwujudan kebijakan utama gender yang dipromosikan saat ini pada tataran regional.

B) Bantuan untuk Promosi IKM/ Industri Daerah

Studi tersebut mengkonfirmasi bahwa anggaran 2015 untuk Konsep Science/ Technopark telah disiapkan seperti rencana. Walaupun kemajuannya beragam diantara lembaga/ kementerian pelaksana, mereka semua sudah memulai kegiatannya, dan diharapkan pedoman perencanaan/ pelaksanaannya selesai di tahun 2015. Bantuan donor sudah jarang sejak sekarang, dan lembaga lembaga kementerian pemerintah pusat pada prinsipnya akan mempromosikan sendiri Konsep tersebut. Namun demikian, para pelaksana itu, yang telah mendapat pengalaman dengan studi di Jepang, relatif mengharapkan bantuan Jepang seperti studi banding ke koperasi koperasi pertanian di Jepang dan bimbingan teknis untuk pertanian. JICA dapat mempertimbangkan bantuan tersebut ke arah Konsep, tergantung pada isi tiap parks (luas industri, tipe produk, dan teknik/ peralatan yang diperlukan, dll).

Mempertimbangkan situasi demikian, JICA dapat memberikan bantuan dengan menggunakan proyek-proyek yang menargetkan peningkatan IKM dan pertalian universitas-industri-pemerintah. Riilnya, model/ metodologi proyek yang menghubungkan universitas-industri-masyarakat dalam Pembangunan IKM berbasis penyerahan jasa yang meningkat (Kementerian Perindustrian) dapat dikenalkan, setelah mengkonfirmasi kemajuan/tantangan dari Pembangunan Technopark di lokasi lokasi proyek yang ditargetkan (kabupaten kabupaten di Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah). Seterusnya, perluasan secara horisontal dari hubungan universitas-industri-masyarakat dengan target S/TP di Indonesia bagian timur (seperti. Bantaeng Agro-technopark) dapat dibantu, sebagai bagian dari pemajuan hubungan universitas-industri-masyarakat di Indonesia Timur, yang diadopsi oleh C-BEST. Mungkin juga memasukkan Maluku atau Papua di wilayah target dengan memperkuat hubungan/ pertalian diantara universitas.

Dalam banyak hal bantuan untuk pembuatan program kerja yang mengkaitkan perguruan tinggi-industri-masyarakat, pembangunan pasar yang memerlukan survei/ test pasar, dll., dimungkinkan. Target S/TP dapat dengan mudah digabungkan secara jarak fisik dan teknologi. Adalah beralasan bahwa kemudian mencari bantuan lebih lanjut, mencari tindakan untuk membantu/ mengintervensi setiap park dan terhadap contoh contoh yang baik.

Melalui Konsep S/TP, 100 lokasi akan dikembangkan dalam 5 tahun mendatang dengan anggaran yang lebih kecil 1.5 trilyun Rupiah (15 milyar Rupiah tiap park). Di samping itu, banyak aspek seperti sistem pelaksanaan di tingkat pusat dan sistim kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak jelas, meskipun lembaga lembaga/ kementerian yang terkait telah berbagi konsep umum tentang S/TP. Oleh karena itu, sulit untuk menargetkan Konsep S/TP sebagai program pinjaman yen saat ini.

Mempertimbangkan situasi di atas, terkait pembangunan UKM, disarankan untuk menggunakan bantuan teknis JICA yang ada dan juga memperkuat pertalian perguruan tinggi-industri-pemerintah,

sebagai tindakan untuk membantu dan mengintervensi dalam Konsep S/TP. Ringkasan bantuan dijelaskan berikut ini :

■ Bantuan untuk Penguatan Pertalian antar Industri, Akademisi dan Masyarakat dalam Promosi Industri Daerah

Item	Keterangan		
Maksud dan Isi Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan proyek-proyek kerjasama teknis yang saat ini berlangsung oleh JICA, agar menerapkan/ mengadopsi model tindakan untuk membentuk/ memperkuat kelembagaan antar swasta, akademisi dan pemerintah berfokus pada daerah-daerah sasaran tertentu, sehingga mempercepat pengembangan produk serta pemasaran. 		
Tujuan Pencapaian	<p><u>Tujuan dari Kedua Proyek JICA yang dicalonkan untuk dimanfaatkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya sistem pendukung pengembangan industri kecil dan menengah dengan menerapkan model/ pola kegiatan menyediakan layanan dukungan bagi IKM, • Ditingkatkan kapasitas fakultas UNHAS dalam aktivitas penelitian berkualitas serta kerjasama dengan swasta dan daerah, dengan memanfaatkan fasilitas yang dilengkapi sebagai COT atau Pusat Teknologi Kolaborasi Swasta, Akademisi dan Daerah. 		
Instansi Bersangkutan	Ditjen IKM, Kemenperin dan Pemda (proponi, kabupaten/ kota), COT dari UNHAS, dan Instansi Pemerintah Propinsi Sulsel		
Susunan Expert JICA	Tenaga Ahli yang bertugas untuk kedua Proyek JICA tersebut		
Periode Pelaksanaan	TA 2015	TA 2016	TA 2017
	Masing-masing Proyek JICA akan melaksanakan tindakan sebagaimana mestinya atas dasar kontrak yang berlaku		

Adalah penting untuk memberi perhatian pada pembuatan konsesus tentang bantuan/ intervensi yang disarankan di atas melalui pembahasan dengan lembaga/ kementerian terkait. Selanjutnya, juga perlu melakukan penambahan/ perubahan di dalam kontrak dari proyek proyek tersebut di atas sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK).

C) Bantuan untuk Pembangunan Wilayah Indonesia Timur

Kebutuhan akan Studi/ Perencanaan Dasar

Terkait Poros Maritim atau Tol Laut, hal itu disebutkan juga di dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Jepang-Indonesia yang diadakan di Tokyo pada tanggal 23 Maret, 2015. Dalam pertemuan itu, disepakati untuk membentuk Forum Maritim Jepang-Indonesia agar membahas lebih lanjut soal pengamanan dan keselamatan laut dan pengembangan industri laut, dll. Menurut informasi resmi, melalui Forum itu, pembahasan secara menyeluruh sudah harus dilakukan untuk mewujudkan bantuan terkait, seperti pembangunan pelabuhan pelabuhan dan pembuatan sistim pembiayaan perkapalan. Akan tetapi, hingga akhir bulan Juni 2015, belum terlihat kemajuan yang nyata.

Dalam kondisi tersebut di atas, kami mendapat banyak pendapat dan saran dari para Intelektual Jepang dan pemangku kepentingan Indonesia bahwa pembangunan pelabuhan pelabuhan untuk meningkatkan layanan laut adalah penting sementara itu revitalisasi social-ekonomi di daerah pedalaman juga diperlukan dalam waktu yang bersamaan. Juga, Kepala Komisi Pembangunan Infrastruktur/ Prasarana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, menyatakan bahwa kerjasama teknis Jepang dengan pengetahuan/ teknologi sudah lebih maju diharapkan untuk membangun bidang perikanan dan desa perikanan, pencegahan bencana (Tsunami, dll.) atau pembangunan pariwisata berbasis lingkungan, yang secara nyata tertinggal di Indonesia Timur.

Terkait pembangunan daerah pedalaman, karena KKP sedang melaksanakan program pembangunan pulau pulau terpencil dekat perbatasan (Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi : PK2PT) atau Pembangunan Desa Pesisir *Resilient* dengan anggaran nasional, Kementerian

mengharapkan bantuan teknis Jepang untuk kesiapan penempatan darurat, pengelolaan penanggulangan bencana, promosi OVOP, perlindungan lingkungan pantai (pencegahan erosi, pembangunan zona hijau, konservasi bakau, dll).

Tidak mudah mengusulkan kerjasama finansial untuk mewujudkan Poros Maritim/ Tol Laut, karena status pelaksanaan anggarannya (700 trilyun Rupiah secara total dilaporkan) tidak jelas. Kemungkinan untuk suatu bantuan resmi juga tidak jelas seperti untuk pembangunan pelabuhan besar yang sangat bernilai komersial setelah tahun fiskal 2016, yang sebagian dilaksanakan oleh PT. Pelindo dengan dukungan keuangan negara di tahun fiskal 2015.

Poros Maritim/ Tol Laut akan lebih mudah ditargetkan untuk dilaksanakan dengan kerjasama yang diminati Jepang, karena hal tersebut mencakup komponen yang ada dalam bidang keahlian Jepang, seperti pembangunan berbagai skala pelabuhan dan pengembangan kelautan, termasuk juga pembangunan bidang perikanan dan desa perikanan.

Akan tetapi, seperti disebutkan di atas, karena masa depan poros maritime/ tol laut tidak cukup jelas, maka saat ini sulit untuk membahas tindakan nyata untuk suatu kerjasama finansial. Terkait kerjasama teknis, meskipun pembangunan wilayah pulau pulau kecil nampak diperlukan, hanya terdapat sedikit informasi yang diberikan untuk dievaluasi apakah benar ada cukup alasan untuk melaksanakan suatu proyek kerjasama teknis.

Mempertimbangkan kondisi yang demikian, suatu studi dasar yang berfokus pada Poros Maritim/ Tol Laut diusulkan untuk diujjagi sebagai tindakan nyata untuk bantuan/ intervensi atas konsep tersebut.

■ Studi Pembangunan Wilayah Indonesia Timur

Item	Keterangan		
Maksud dan Isi Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka mewujudkan Poros Maritim/ Tol Laut, sebagai strategis nasional dari kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini, akan dilaksanakan sebuah studi yang meliputi komponen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Penetapan tujuan dan maksud dalam memberikan dukungan JICA Penyusunan skenario dukungan JICA Perumusan proyek-proyek prioritas Perencanaan proyek masing-masing serta pengusulan isi dukungan JICA Verifikasi proyek-proyek dari segi relevansi, efektivitas dan efisiensi <p>*studi ini kemungkinan akan dilaksanakan dalam bentuk <i>data collection survey</i> atau <i>project preparation study</i></p>		
Tujuan Pencapaian	Terbentuknya proyek kerjasama teknis yang akan dilaksanakan untuk Wilayah Indonesia Timur		
Instansi Bersangkutan	BAPPENAS, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan		
Susunan Expert JICA	Tim Tenaga Ahli (4~5 org) + Staf Indonesia		
Periode Pelaksanaan	TA 2015	TA 2016	TA 2017
	persiapan	Sekitar 8 bulan	

USAID dan DFAT cukup aktif bekerja memberikan bantuan ke Indonesia bagian Timur. Mereka berfokus pada bidang kesehatan dan higienitas serta pemberdayaan perempuan, dll., melaksanakan/ meneruskan program-programnya dengan menggunakan sumberdaya lokal mereka. Atas kondisi tersebut Jepang/ JICA dapat melaksanakan suatu program untuk peningkatan layanan pendidikan/ kesehatan juga. Di samping itu, disarankan bantuan pembangunan untuk penyusunan sebuah *masterplan* yang mencakup pembangunan prasarana, penggunaan lahan (termasuk tanah para imigran),

peningkatan ekonomi industri, yang mengarah pada penyesuaian atas kesejangan ekonomi, yang menjadi tantangan penting dalam RPJMN.


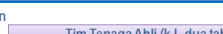
Pelaksanaan proyek proyek kerjasama teknis jangka menengah dan panjang

Dua kerjasama teknis berikut diusulkan, yang menargetkan pencapaian Poros maritime/ Tol Laut berdasarkan hasil dari studi dasar tersebut di atas.

Wilayah sasaran adalah pelabuhan kecil/ menengah lokal tersebut di atas yang dibangun “Proyek Pembangunan Pelabuhan Kecil di Bagian Timur Indonesia” (1998~2005). Selanjutnya, pembangunan kapasitas untuk para pemangku kepentingan dapat diperbantukan dalam membuat dan melaksanakan suatu rencana pembangunan dari desa perikanan dan perikanan berbasis kota kecil/ menengah. Lebih dari itu, situasi selanjutnya dapat dipelajari untuk suatu pembangunan yang menyeluruh di Sulawesi Selatan sejak 2005 dengan prakarsa satuan kerja ODA (Pembangunan Menyeluruh Wilayah Metropolitan Mamminasata yang terdiri dari suatu program pembangunan prasarana dan program pembangunan social ekonomi). Kemudian, perencanaan untuk promosi investasi pembangunan dapat diperbantukan terutama untuk mengkoreksi/ mengupgrade rencana yang diusulkan pada waktu lampau.

Untuk membuat rencana pembangunan dengan target daerah pedalaman dari pelabuhan kecil, dan, konsep dasarnya harus mempertimbangkan penyediaan kesempatan kerja bagi generasi muda dan pembangunan kota kecil/ menengah yang menarik kaum tua dengan pemajuan industri, pengendalian bencana dan harmonisasi lingkungan. Sebuah model unik ala Jepang dapat ditawarkan dengan memperkenalkan “gerakan OVOP” dan atau “*Michi-no-eki*” untuk program promosi industry daerah. Juga, hal ini bisa dicapai dengan menyarankan “pembentukan kesiapan penempatan keadaan darurat, atau melalui “pengelolaan/ konservasi lingkungan pesisir” atau “pembangunan energi terbarukan” sebagai program harmonisasi lingkungan. Program yang diusulkan dirangkum sebagai berikut:

■ **Proyek Pembangunan Kota Maritim Kecil/ Menengah**

Item	Keterangan		
Maksud dan Isi Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian kerjasama teknis dalam rangka menyusun rencana pembangunan wilayah di beberapa kota maritime terseleksi dengan tujuan untuk membangun kawasan perkotaan yang menyerap tenaga kerja generasi pemuda serta menyediakan lingkungan baik bagi kehidupan generasi tua, beserta memfasilitasi pembentukan kelembagaan pelaksanaan, • Akan menerapkan unsur-unsur keterampilan/ pengetahuan yang unik berasal Jepang di bidang pengembangan industri daerah, pecegahan/ pengendalian bencana alam, dan harmonisasi lingkungan, • Kota maritime berskala kecil/ menengah yang berada di Maluku, Papua atau Nusa Tenggara kemungkinan ditentukan sebagai kawasan perkotaan sasaran. 		
Tujuan Pencapaian	Dapat ditingkatkan kapasitas pemerintahan di daerah sasaran supaya rencana pembangunan kawasan perkotaan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. . * <i>mempertimbangkan juga formulasi proyek pinjaman dana</i>		
Instansi Bersangkutan	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PUPR, Kemendagri, Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/ Kota)		
Susunan Expert JICA	Tim Tenaga Ahli (5~6 org) + Staf Indonesia		
Periode Pelaksanaan	TA 2015	TA 2016	TA 2017
	persiapan	Prosedur Internal JICA untuk Persiapan 	
			 Tim Tenaga Ahli (k.l. dua tahun)

Di lain pihak, Propinsi Sulawesi Selatan sedang menghadapi kelambatan dalam pencagihan struktur industrinya atau perpindahan/ penggantian dari industri pertanian/ perikanan ke industry manufaktur. Sul-sel masih menghadapi tantangan seperti penambahan atau meningkatnya dalam nilai tambah, penurunan dalam perbedaan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja. Juga, Gubernur propinsi Sulsel saat ini menaruh upaya ke arah pembangunan prasarana untuk memperkuat konektivitas di

dalam/ di luar propinsi dan juga mengarah pada peningkatan platform dari pembangunan industri dan peningkatan layanan publik. Walau demikian kemajuannya lambat.

Terkait Sulawesi selatan, isi dari rencana pembangunan menyeluruh kota Metropolitan Mamminasata sekarang ini sebaiknya ditinjau ulang, setelah 10 tahun dari pembuatannya, dalam rangka meningkatkan fungsi Propinsi tersebut sebagai “pusat” di Indonesia Timur, memperkuat konektivitas dengan wilayah wilayah di dalam/di luar Propinsi, dan meningkatkan investasi dari sektor swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Program yang diusulkan dirangkum sebagai berikut :

■ **Proyek Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan dalam rangka Promosi Permodalan**

Item	Keterangan		
Maksud dan Isi Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> • Mereview/ memperbaharukan rencana pengembangan wilayah perkotaan Mamminasata, • Menyusun/ mengusulkan proyek-proyek layak investasi, • Mempertimbangkan/ mengatur kelembagaan pelaksanaan menurut proyek prioritas, • Mereview program pengembangan sosial dan ekonomi di Propinsi dan mengusulkan model kegiatan yang praktek (pelaksanaan kegiatan pilot), • Mendukung pembentukan kelembagaan pelaksanaan pembangunan: pengaturan system koordinasi, kolaborasi serta kerjasama di antara pemangku kepentingan, dan perancangan organisasi pelaksanaan pembangunan, dsb. 		
Tujuan Pencapaian	Terbentuknya kelembagaan pelaksanaan pembangunan wilayah dengan mengatur/ merumuskan proyek-proyek prioritas yang layak investasi baik bagi pemerintah maupun swasta. <i>* mempertimbangkan juga formulasi proyek pinjaman dana</i>		
Instansi Bersangkutan	BAPPENAS, PUPR, BKPM, Pemerintah Daerah		
Susunan Expert JICA	Tim Tenaga Ahli (5~6 org) + Staf Indonesia		
Periode Pelaksanaan	TA 2015	TA 2016	TA 2017
		Prosedur Internal JICA untuk Persiapan 	Tim Tenaga Ahli (k.l. dua tahun)

Untuk melaksanakan kerjasama teknis semacam studi pembangunan wilayah secara komprehensif, perlu mendapatkan persetujuan/ kerjasama dari Propinsi dan kota/ kabupaten di bawahnya dan juga jaminan komitmen yang semestinya dari pemerintah pusat (BAPPENAS, PUPR, Kementerian Perhubungan, dll). Di pihak lain, pemerintah Jepang juga diharapkan secara intensif menarik perhatian perusahaan perusahaan swasta, pembangunan prasarana, kerjasama teknis Jepang, dll., dengan menghadirkan kembali semua bentuk kerjasama Jepang seperti satuan kerja ODA di masa lampau dan berbagi pencapaian, seperti contohnya, menunjukkan keberhasilan selama 10 tahun dalam kerjasama dengan Kedutaan Besar Jepang, JETRO, JICA, dsb.

5-4 Poin poin untuk dicatat dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Program

Tindakan bagi bantuan/ intervensi yang disarankan di bagian 5-3 merupakan gagasan tahap dasar berdasarkan hasil studi ini. Untuk mengubah gagasan menjadi lebih nyata untuk dilaksanakan, perlu diadakan pembahasan/ koordinasi dengan JICA atau dengan pemerintah RI. Di sini, pada kesimpulan dari studi, poin poin untuk dicatat bagi bantuan/ intervensi di sektor Pengembangan Daerah di Indonesia akan dirangkum lagi berdasarkan pengalaman/ pembelajaran JICA di sektor yang menjadi sasaran.

1) Memulai program secara lebih dini

Aset JICA seperti SDM yang terakumulasi melalui kerjasama di masa silam tidak dimanfaatkan secara terus menerus lagi sementara itu kehadiran Jepang di lembaga lembaga pemerintah, masyarakat Indonesia dan juga masyarakat International telah menurun. Hal tersebut jelas khususnya di Indonesia

Bagian Timur karena kerjasama JICA akhir akhir ini terbatas walaupun banyak pencapaian dari kerjasama telah dibuat. Untuk keluar dari situasi saat ini, sangat penting untuk memulai bantuan/ intervensi nyata sesegera mungkin setelah membuat kebijakan/ program ke depan. Dari sudut pandang ini, adalah penting melaksanakan bantuan/ intervensi sesegera mungkin dengan cepat menyikapi program program pemerintah RI untuk tindakan tindakan prioritas pada saat yang bersamaan.

2) Memanfaatkan Aset JICA seperti SDM dan proyek proyek di waktu lampau

JICA dapat melaksanakan bantuan teknis/ finansial di sektor Pengembangan Daerah dengan mengambil keuntungan dari penggunaan SDM dan proyek proyeknya di masa lampau. Hal tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi dari bantuan dimana aset aset itu dapat digunakan secara terus menerus yang berefek pada meningkatnya kesinambungan. Dengan begitu, cukup beralasan/ menjadi masuk akal untuk memanfaatkan COMMIT dan menargetkan bidang dimana JICA telah mengerjakan pembangunan pelabuhan pelabuhan dan sarana sarana irigasi.

Lebih dari itu, JICA telah berpengalaman dalam pengembangan SDM untuk membantu pembangunan setempat, misalnya, pembangunan kapasitas professor teknik dari 11 universitas di Sumatera dan Kalimantan, dari tahun 1990 hingga 2002. Pengalaman ini dapat digunakan untuk melatih para pemimpin pembangunan di Indonesia Timur dengan menargetkan universitas di wilayah seperti Papua dan Maluku. Dalam hal ini, UNHAS akan menjadi pusat dari bantuan. Bantuan ini akan bermanfaat sebagai suatu cara untuk mencari pendekatan-pendekatan untuk memajukan pembangunan yang berkesinambungan dengan menggunakan jejaring akademis dan mengatasi perbedaan budaya/ etnis.

3) Mengembangkan sistim kerjasama yang praktis antara pemerintah pusat dan daerah

Kemajuan dari program prioritas yang terdaftar di dalam Rencana Pembangunan Metropolitan Mamminasata terlambat. Salah satu alasan pokoknya adalah komitmen pemerintah pusat (PUPR saat ini) tidak jelas pada tahap pembuatan program.

Program tersebut dibuat atas persetujuan antara Propinsi Sulawesi Selatan dengan satuan kerja ODA, dimana pemerintah pusat hanya bekerja sebagai pemantau. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah pusat sedikit walaupun banyak dari program prioritas untuk pembangunan prasarana utama membutuhkan anggaran nasional. Demikian, anggaran tersebut akhirnya dialokasikan setelah pembuatan rencana di tahun 2006 dan penetapan KEPRES di tahun 2011. Atas pelajaran tersebut, Studi ini menyarankan dikembangkannya suatu sistim kerjasama yang layak antara pemerintah pusat dan daerah, dan juga antara daerah, pada tahap perencanaan di saat JICA merumuskan dan melaksanakan suatu program pengembangan daerah⁷⁰. Penting juga pertimbangan pendirian suatu badan/ organisasi serupa BUMD yang berkewenangan dalam penganggaran dan pelaksanaan pembangunan wilayah sebagai pendekatan alternatif dalam rangka mempercepat kemajuan pembangunannya.

Selanjutnya, JICA diharapkan memiliki pendekatan yang mengarah pada solusi permasalahan seperti inklusivitas, keberlanjutan dan ketahanan, juga memberi perhatian terhadap kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG: *Sustainable Development Goals*) dan revisi kerangka umum ODA Jepang.

⁷⁰ Dr. Yuri Sato, yang berpartisipasi dalam rapat para intelektual Jepang mengatakan bahwa untuk mengetahui komitmen pemerintah pusat dari pemernitahan saat ini, penting untuk mempertegas kemauan politiknya, 4 lembaga kementerian, yaitu, Kantor Presiden, Kantor wakil Presiden, BAPPENAS, dan lembaga/ kementerian di barisan depan.

Penting bagi JICA memberi perhatian pada pemerintahan Indonesia saat ini, yang bisa berubah dengan cepat, dan untuk secara tepat menyikapi permasalahan penting sektor pengembangan daerah yaitu pemajuan industri daerah dan peningkatan konektivitas, dan juga memberi daya tarik atas keberadaannya. Juga, penting untuk merumuskan program program jangka menengah panjang yang diminati bangsa Indonesia dan secara strategis melaksanakannya.



Para Narasumber yang hadir Rapat Intelektual

Dari kiri: Masaaki OKAMOTO (Center for Southeast Asian Studies, Kyoto Univ.)
Yuri SATO (Institute of Developing Economies, JETRO)
Hajime KOIZUMI (Institute of Development Policy Studies)

(Selesai)

LAMPIRAN

Lampiran 1: Jadwal Studi Lapangan

(1) Studi Lapangan Tahap Pertama

Date		Activities
2 Mar	Mon	<ul style="list-style-type: none"> ● Arrival in Jakarta
3 Mar	Tue	<ul style="list-style-type: none"> ● Setup of Study team office ● Meeting at JICA Indonesia Office (Ms. Uno)
4 Mar	Wed	<ul style="list-style-type: none"> ● Study assistant recruitment ● Arrangement for meetings with Donors/ International Organization
5 Mar	Thu	<ul style="list-style-type: none"> ● Same as above
6 Mar	Fri	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with Chairperson of Infrastructure Commission (Komisi V), the House of Representatives of the RI (Mr. Fary Francis)
7 Mar	Sat	<ul style="list-style-type: none"> ● Data compilation
8 Mar	Sun	<ul style="list-style-type: none"> ● Same as above
9 Mar	Mon	<ul style="list-style-type: none"> ● Negotiation for Sub-contract work ● Meeting with JICA Mission from Tokyo at JICA Indonesia Office
10 Mar	Tue	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with BAPPENAS, jointly with Cipta Karya, MPWH for discussion of PNPM (incl. RISE (II)) and related policies <ul style="list-style-type: none"> -Directorate for Regional Autonomy -Directorate for Urban and Rural Affairs -Directorate for Regional Development
11 Mar	Wed	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with Ministry of Home Affairs ● Meeting with Regional Infrastructure Development Agency, MPWH ● Meeting with the consultant team for RISE (II)
12 Mar	Thu	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with Ministry of Industry <ul style="list-style-type: none"> Dir.Gen of International Industrial Cooperation (KII) and Dir. Gen. of Small and Medium Industry ● LSP (<i>Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat</i> : Institute of Profession Certification for Community Empowerment Facilitator) <ul style="list-style-type: none"> Director: Ms. Chamiyatus Sidqiyah
13 Mar	Fri	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with Ministry of Village, Disadvantaged Regions and Transmigration ● Meeting with Ministry of Finance ● Meeting with the World Bank
14 Mar	Sat	<ul style="list-style-type: none"> ● Moving to Makassar
15 Mar	Sun	<ul style="list-style-type: none"> ● Site Visit: Yen Loan Projects in Makassar
16 Mar	Mon	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with BAPPEDA South Sulawesi Province ● Site visit: RISE (II) (Jeneponto Regency) ● Moving to Bantaeng Regency
17 Mar	Tue	<ul style="list-style-type: none"> ● Site Visit: PRIMA-K, Bulukumba Regency ● Meeting with the Head of Bantaeng Regency ● Moving back to Makassar
18 Mar	Wed	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with Mr. Sakamoto, Chief Advisor of UNHAS Tech. Cooperation Project ● Meeting with Mr. Ashar, Executive Director of "COMMIT" ● Moving back to Jakarta
19 Mar	Thu	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with USAID
20 Mar	Fri	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with CIDA
21 Mar	Sat	<ul style="list-style-type: none"> ● Data compilation
22 Mar	Sun	<ul style="list-style-type: none"> ● Same as above
23 Mar	Mon	<ul style="list-style-type: none"> ● Survey Team Meeting
24 Mar	Tue	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with GIZ
25 Mar	Wed	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with Mr. Rusnadi (Assistant for Minister of Village) ● Meeting with DFAT, Australia
26 Mar	Thu	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with Mr. Sumedi (Head of Subdit. Social Analysis and Regional Economy)
27 Mar	Fri	<ul style="list-style-type: none"> ● Data compilation ● Schedule arrangement for South Sulawesi Field Survey
28 Mar	Sat	<ul style="list-style-type: none"> ● Data compilation

Date		Activities
29 Mar	Sun	<ul style="list-style-type: none"> ● Moving to Makassar
30 Mar	Mon	<ul style="list-style-type: none"> ● Attendance at Musrenbang, South Sulawesi Province ● Meeting with COMMIT
31 Mar	Tue	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with PMD, Bantaeng Regency ● Interview with Village Corporation (BUMDes), Bantaeng Regency
1 Apr	Wed	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with Dr. Darmawan (Hasanuddin University) ● Meeting with BaKTI ● Moving back to Jakarta
2 Apr	Thu	<ul style="list-style-type: none"> ● Reporting to JICA Indonesia Office (Mr. Saito, Senior Representative) ● Data compilation
3 Apr	Fri	<ul style="list-style-type: none"> ● Data compilation (Easter holiday)
4 Apr	Sat	<ul style="list-style-type: none"> ● Data compilation
5 Apr	Sun	<ul style="list-style-type: none"> ● Data compilation
6 Apr	Mon	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with Mr. Kim (RISE II, Team leader)
7 Apr	Tue	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with Mr. Bambang Prihartono (BAPPENAS, Director of Transportation) ● Meeting with GIZ
8 Apr	Wed	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with LIPI ● Meeting with Ministry of Health (Mr. Dyah, Head of Empowerment and Community Engagement, Center for Health Promotion) ● Reporting to JICA Indonesia Office (Mr. Saito and Ms. Uno)
9 Apr	Thu	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with ADB
10 Apr	Fri	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with Dr. Slamet Budijanto (Associate Dean, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, Bogor Agricultural University) ● Meeting with Dr. Nurul Taufiqu Rochman, Mr. Firman Tri Ajie (Center for Innovation, LIPI)
11 Apr	Sat	<ul style="list-style-type: none"> ● Data compilation
12 Apr	Sun	<ul style="list-style-type: none"> ● Data compilation
13 Apr	Mon	<ul style="list-style-type: none"> ● Meeting with Ms. Vanya Abuthan (Unit Manager, KOMPAK project, DFAT) ● Supervision of Sub-contract work
14 Apr	Tue	<ul style="list-style-type: none"> ● Moving back to Tokyo/Berlin
15 Apr	Wed	<ul style="list-style-type: none"> ● Arrival in Tokyo/Berlin

(2) Studi Lapangan Tahap Kedua

Date		Activities
1 Jun	Mon	● Arrival in Jakarta
2 Jun	Tue	● Indonesian National Holiday
3 Jun	Wed	● Preparation for 1 st Stakeholder meeting
4 Jun	Thu	● Meeting_ Ministry of Women's Empowerment and Child Protection
5 Jun	Fri	● Meeting_Directorate for Population, Women's Empowerment, and Child Protection, BAPPENAS
6 Jun	Sat	● Data compilation
7 Jun	Sun	● Data compilation
8 Jun	Mon	● Preparation for 1 st Stakeholder meeting
9 Jun	Tue	● Meeting_JICA Indonesia ● Meeting_BAPPENAS and Cipta Karya (regarding RISE)
10 Jun	Wed	● Meeting_RISE II Consultant (Team leader) ● Meeting_Ministry of Home Affairs
11 Jun	Thu	● Meeting_Ministry of Marine Affairs and Fisheries ● Preparation for 1 st Stakeholder meeting
12 Jun	Fri	● 1 st Stakeholder meeting
13 Jun	Sat	● Data compilation
14 Jun	Sun	● Data compilation
15 Jun	Mon	● Meeting_Ministry of Transportation ● Meeting_Embassy of Japan
16 Jun	Tue	● Meeting_Mr. Fary Francis, Chair of Infrastructure Commission, The House of Representatives of the Republic of Indonesia ● Meeting_JICA Indonesia Office (Mr. Saito, Ms. Uno)
17 Jun	Wed	● Meeting_RISE II (Consultant for gender) ● Meeting_Sub-contractor (presentation by sub-contractor)
18 Jun	Thu	● Meeting_Ministry of Village ● Meeting_BPPT
19 Jun	Fri	● Meeting_Ministry of Home Affairs, BPD
20 Jun	Sat	● Data compilation
21 Jun	Sun	● Moving to Makassar
22 Jun	Mon	● Meeting_COMMIT ● Meeting_PELINDO IV
23 Jun	Tue	● Meeting_BAPPEDA Sulsel for Interim Report ● Meeting_BKPMD Sulsel ● Meeting_Former PRIMA-K Staff
24 Jun	Wed	● Meeting_Aeng Batu-Batu Village (Head of Village), Galesong Utara Sub-district (Head of Sub-district), Takalar District
25 Jun	Thu	● Meeting_Head of Bantaeng District ● Meeting_Secretary and PMD of Bantaeng District ● Meeting_Palajau Village (Head of Village), Jeneponto District ● Moving back to Jakarta
26 Jun	Fri	● Meeting_Ministry of Marine Affairs and Fisheries ● Meeting_Ministry of Agriculture ● Meeting_RISE II Consultant (Team leader)
27 Jun	Sat	● Data compilation
28 Jun	Sun	● Moving to Kupang, Prov. NTT
29 Jun	Mon	● Meeting_Kupang Municipality (Vice Mayor) ● Meeting_BAPPEDA Prov. NTT (Head of BAPPEDA) ● Site visit_Tilong Dam, Kupang Port
30 Jun	Tue	● Meeting_Dinas PU, Kab. Kupang ● Site visit_Oesao (2) Irrigation Weir ● Moving back to Jakarta

Date		Activities
1 Jul	Wed	<ul style="list-style-type: none"> Meeting_RISTEK-Dikti Team meeting
2 Jul	Thu	<ul style="list-style-type: none"> Meeting_LSP-FPM
3 Jul	Fri	<ul style="list-style-type: none"> Meeting_JICA Indonesia (Mr. Saito, Ms. Uno) Meeting_Ministry of Marine Affairs and Fisheries
4 Jul	Sat	<ul style="list-style-type: none"> Data compilation
5 Jul	Sun	<ul style="list-style-type: none"> Data compilation
6 Jul	Mon	<ul style="list-style-type: none"> Meeting_BATAN
7 Jul	Tue	<ul style="list-style-type: none"> Meeting_Ministry of Industry
8 Jul	Wed	<ul style="list-style-type: none"> Leaving for Tokyo
9 Jul	Thu	<ul style="list-style-type: none"> Arrival in Tokyo

(3) Studi Lapangan Tahap Ketiga

Date		Activities
5 Aug	Wed	<ul style="list-style-type: none"> Arrival in Jakarta
6 Aug	Thu	<ul style="list-style-type: none"> Meeting_JICA Indonesia Preparation for the trip to South Sulawesi/2nd Stakeholder meeting
7 Aug	Fri	<ul style="list-style-type: none"> Preparation for the trip to South Sulawesi/2nd Stakeholder meeting
8 Aug	Sat	<ul style="list-style-type: none"> Moving to Makassar
9 Aug	Sun	<ul style="list-style-type: none"> Data compilation
10 Aug	Mon	<ul style="list-style-type: none"> Meeting_the Vice Governor of South Sulawesi Meeting_Head of Mamminasata TIU (1st) Meeting_Dinas Spatial Planning and Settlement
11 Aug	Tue	<ul style="list-style-type: none"> Meeting_Dinas Head of Transportation, Communication and Information Meeting_Dinas Head of Highway Meeting_Dinas Head of Water Resources Management Meeting_Dinas Head of Energy and Mineral Resources (1st)
12 Aug	Wed	<ul style="list-style-type: none"> Meeting_the Secretary of Province Meeting_Dinas Head of Industry and Trade Meeting_Dinas Head of Energy and Mineral Resources (2nd) Meeting_Head of Mamminasata TIU (2nd) Moving back to Jakarta
13 Aug	Thu	<ul style="list-style-type: none"> Team meeting Preparation for 2nd Stakeholder meeting
14 Aug	Fri	<ul style="list-style-type: none"> Meeting_JICA Indonesia
15 Aug	Sat	<ul style="list-style-type: none"> Data compilation
16 Aug	Sun	<ul style="list-style-type: none"> Data compilation
17 Aug	Mon	<ul style="list-style-type: none"> Data compilation (Independence day)
18 Aug	Tue	<ul style="list-style-type: none"> Preparation for 2nd Stakeholder meeting
19 Aug	Wed	<ul style="list-style-type: none"> 2nd Stakeholder meeting Meeting_Embassy of Japan
20 Aug	Thu	<ul style="list-style-type: none"> Meeting_Chairman of Infrastructure Commission
21 Aug	Fri	<ul style="list-style-type: none"> Data compilation
22 Aug	Sat	<ul style="list-style-type: none"> Moving to Makassar
23 Aug	Sun	<ul style="list-style-type: none"> Data compilation
24 Aug	Mon	<ul style="list-style-type: none"> Meeting_BAPPEDA Sulsel
25 Aug	Tue	<ul style="list-style-type: none"> Meeting_the Vice Mayor of Makassar Meeting_Assistant for the Mayor of Makassar Moving back to Jakarta
26 Aug	Wed	<ul style="list-style-type: none"> Meeting_JICA Indonesia Moving back to Tokyo
27 Aug	Thu	<ul style="list-style-type: none"> Arriving at Tokyo

Lampiran 2: Daftar Narasumber yang Diwawancarai

Organization/Institute	Interviewee	
	Name	Title
Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS)	Drs. Sumedi Andono Mulyo	Head of Sub Directorate for Regional Economic and Social Analysis, Directorate for Regional Development
	Dr. Yudianto	Deputy Director for Regional Data and Information, Directorate for Regional Development
	Mr. Bambang Prihartono	Director of Transportation
	Ir. Suharti, MA, Ph.D	Director for Population, Women Empowerment and Child Protection
Ministry of Home Affairs	Mr. Ketut Sukadana	Head of Sub-division for Data and Information, Directorate General of Village and Community Empowerment (PMD)
	Ms. Anna Gurning	Head of Section for Village and Kelurahan Government Capacity Development, Sub-directorate of Capacity Development (PMD)
	Mr. Happy Harto Bwk	Staff of Data & Information Sub-Division (PMD)
	Ms. Damera Sihombing	Staff of Data & Information Sub-Division (PMD)
	Mr. Oktotianus J.R	Head of Section for Village Administration, Sub-directorate of Village and Kelurahan Administration (PMD)
Ministry of Finance	Mr. Ahmad Yani	Secretary for Directorate General, Directorate General of Fiscal Balance
Ministry of Village, Disadvantaged Region Development and Transmigration	Dr. Suprayoga Hadi	Deputy Minister for the Development of Special Regions
	Mr. Rusandi	Economic advisor for Minister
	Dr. Anwar Sanusi, PhD	Secretary General
	Ms. Theresia Junidar Spi, M.Ec	Head of Foreign Cooperation Division
	Ms. Windhy	Head of Sub division for Bilateral Cooperation
	Mr. Fajar Tri Suprapro	Head of Public relations and Cooperation Bureau
Ministry of Public Works and Housing (PU)	Dr. A. Hermanto Dardak	Acting Chairman for Regional Infrastructure Development Agency
	Mr. Hadi Sucahyono	Director of Settlement Development, Directorate General of Human Settlements
	Dr. Dadang Rukmana	Director for Urban Planning and Development, Directorate General of Spatial Planning
	Mr. Kuswardono	Director for Center of Urban Development, Agency for Regional Infrastructure Development
	Mr. Sanusi Sitorus	Agency for Regional Infrastructure Development
	Mr. Endra S. Atmawidjaja	Deputy Director for Urban Development Policies and Strategies, Directorate General of Spatial Planning and Development, Directorate of Urban Planning and Development
	Ms. Anastasia Carolina	Directorate of Settlement Area Development, Directorate General of Cipta Karya
Ministry of Industry	Mr. Eko Agus Nugroho	Head of Administrative Foreign Technical and Subdivision, Directorate General of International Industrial Cooperation
	Mr. Riris Marhadi	Secretary, Directorate General of International Industry Cooperation
	Ir. Endang Supraptini	Secretary, Directorate General of Industrial Region Development
	Dr. Heru Kustanto	Head of Division of Program Evaluation and Reporting, Directorate General of Industrial Region Development
	Dr. Ignatius Warsito	Director for Electronic and ICT Industry
	Ms. Enny Santiastuti	Deputy Director for Program, Evaluation and Report, Direktorat Electronic and ICT Industry
	Mr. Heradi Prabowo	Deputy Director for Software & Content
	Mr. Kastoro	Directorate General of International Industrial Cooperation
Ministry of Health	Ms. Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS	Head of Empowerment and Community Engagement, Center for Health Promotion
Ministry of Marine Affairs and Fisheries	Ir. Sri Atmini, M. Sc.	Secretary to the Directorate General for Marine Coastal and Small Islands Affairs (MCSIA)
	Dr. Abdul Muhari, PhD	Tsunami Engineering and Coastal Disaster Mitigation, Sub-Directrate for Environmental Disaster Mitigation
	Mr. R. Tomi Supratomo, Ssi, M.Si	Assistant Deputy Secretary for Partnership
	Dr. Hendra Yusran Siry	Deputy Director of Marine and Coastal Disaster, Mitigation and Climate Change Adaption, Directorate General Marine, Coast and Small Islands Affairs
	Mr. Farkan, A. Pi, SE, Ms. Si	Head of Program, Monitoring and Evaluation Division

Organization/Institute	Interviewee	
	Name	Title
Ministry of Transportation	Mr. Rifanie Komara	Deputy of Planning Division, Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation
	Ms. Arie Prakswati	Staff for International Cooperation, Directorate General of Sea Transportation
Ministry of Women Empowerment and Child Protection	Mrs. Eko Novi Ariyanti Rahayu Darmayanti	Assistant Deputy for Gender in Agriculture, Forestry, Fishery and Marine
Ministry of Agriculture	Dr. Agung Hendriadi	Executive Secretary of IAARD (Indonesian Agency for Agricultural Research and Development)
	Dr. Chandra Ijdrawanto	Deputy Director for Research Cooperation and Public Relation, IAARD
	Ms. Seta R. Agustina, M. Sc.	Assistant Deputy Director for Collaboration, IAARD
Ministry of Research and Technology of the Republic of Indonesia (RISTEK-DIKTI)	Dr. Muhammad Dimiyati	Director General for Research & Development
	Mr. Wisnu Sadjno Soenarso	Director for Science and Technology Investment
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI: Indonesian Institute of Sciences)	Dr. Bambang Subiyanto	Deputy Chairman for Scientific Services
	Dr. Nurul Taufiqu Rochman	Director, Center for Innovation
	Dr. Mego Pinandito, M. Eng.	Director, Research Center for Metrology
	Mr. Firman Tri Ajie	Staff, Technology Transfer Sub Division, Center for Innovation
	Mr. Mauludin	Senior staff
Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT)	Dr. Tatang A. Taufik	Deputy Chairman for Technology Policy Assessment
	Dr. Ir. Iwan Sudrajat, MSEE	Director, Center for Technology Diffusion Policy Assessment
	Dr. Ir. Anugerah Widiyanto, B.Sc, M. Eng	Head of Technology Incubator
National Nuclear Energy Agency (BATAN)	Dr. Hendig Winarno	Director of Center for Application of Isotopes and Radiation (PAIR: Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi)
	Dr. Sobrizal	Rice Breeder, PAIR
	Dr. Erawan Effendi	Center for Dissemination and Cooperation
	Dr. Firsoni	Animal husbandry expert, PAIR
	Dr. Arwin	Soybean breeder, PAIR
	Dr. Sudi Ariyanto	Director of Center for Education and Training
Governor's Office Sulsel	Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, MS	Vice Governor/Chairman of BKSPMN (Mamminasata Metropolitan Development
	Ir. H. Abdul Latif, Ms. Si., M.M	Secretary of Province
BAPPEDA Sulsel	Drs. Andi Yaksan Hamzah	Head of BAPPEDA
	Mr. Irawan	Head of Institutional Development and Human Resources
Dinas: Industry and Commerce	Drs. Sidik Salam, M.M.	Dinas Head
	Dra. Hj. A. Rahmi Mutty, Ms.Si	Dinas Secretary
	Ir. Ahmad Habib, M.Si	Division Head of International Trade
Dinas: Spatial Planning and Housing	Ir. H. A. Bakti Haruni, CES	Dinas Head
	Ir. Hj. Sumi Heriza Sikki, M. Si	Dinas Secretary
Dinas: Transportation, Communication and Information	Ir. H. Masykur A. Sulthan, Ms.	Dinas Head
	Drs.H. Arsal Arifin, M.M	Dinas Secretary
Dinas: Highway	Ir. H. Andi Hasdullah, M. Si	Acting Dinas Head
Dinas: Energy and Mineral Resources	Ir. H. Gunawan Palaguna, M. Si	Dinas Head
Dinas: Water Resouces Management	Ir. H. Muh. Amin Yakob, M. Si	Dinas Head
Mamminasata Regional Technical Implementation Unit	Ir. H. A. Zulklarnain Kitta, Ms. Si	UPTD Head
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (BKPMMD)	Mr. H. Irman Yasin Limpo, SH	Director of BKPMMD
Indonesia Port Corporation IV (PELINDO 4)	Mr. Alif Abadi	Director for Operation
	Mr. Kusmahadi Setya Jaya	Head of Planning and Corporate Strategy Bureau

Organization/Institute	Interviewee		
	Name	Title	
South Sulawesi Province Governmental Agencies	Kabupaten Bantaeng	H.M. Nurdin Abdullah	Regent of Bantaeng
		Drs. H. Abdul Gani	Sekretaris Daerah
	Kabupaten Bantaeng, PMD	Mr. Joni Tambing	Secretary
		Mr. Masrif	Staff
		Mr. Andi Makkasollah	Staff
		Mr. Ramlan	Facilitator
		Mr. Yudif	Facilitator
	Kabupaten Bantaeng, Bonto Tiro Village, Village Corporation (BUMDes Mattiro Bulu)	Ms. Aminah	Director
		Mr. Israil	Supervisor
		Ms. Nurul Fajri	Secretary
		Ms. Subuedah	Treasurer
		Ms. Siti Rosmia	Head of Business unit
	Kabupaten Jeneponto	Mr. Toto Harianto	Head of Palajau Village
		Mr. H. Abdul Rahim	Head of Arungkeke Pallantikang Village
	Kabupaten Takalar	Mr. H. Hamzah	Head of Galesong Utara Sub-district
		Mr. Wahyidin	Head of Aeng Batu Batu Village, Galesong Utara Sub-district
East Nusa Tenggara Province Governmental Agencies	East Nusa Tenggara BAPPEDA	Ir. Wayan Darmawa, MT	Head of East Nusa Tenggara BAPPEDA
	Kupang City	Dr. Hermanus Man	Vice Mayor of Kupang City
		Ir. Elvianus Wairata, M. Si	Head of Kupang City BAPPEDA
		Mr. Max Maahury	Chief of Cooperation and Development Statistic
	Kabupaten Kupang, Dinas PU	Mr. Joni Nomseo	Head of Kupang District PU
Universities/Private groups/Others	Hasanuddin University	Dr. Darmawan Salman	Professor, Faculty of Agriculture, Department of Socioeconomic Agriculture/Agribusiness (Expertise: Rural Sociology)
		Dr. Arsyad Muhammad	Lecturer, Faculty of Agriculture, Department of Socioeconomic Agriculture/Agribusiness (Expertise: Agricultural Economics)
	Bogor Agricultural University	Dr. Slamet Budijanto	Professor and Associate Dean, Faculty of Agricultural Engineering and Technology
	LSP FPM	Mr. Hendry Souisa	Standarization manager
		Ms. Chamiyatus Sidqiyah	Executive Secretary
	COMMIT	Mr. Ashar Karateng	Executive Director
		Mr. Kamaruddim Azis	Secretary
Mr. Mardi		Program Manager	
BaKTI	Ms. Zuzzana Gosal	Partnership Manager	
Diet	The House of Representative of the Republic of Indonesia	Mr. Fary Djemy Francis	Chairman of Infrastructure Commission

	Organization/Institute	Interviewee	
		Name	Title
Donors	DFAT (Former AusAID)	Mr. Theodore Weohau	Deputy Program Director, Australia Indonesia Partnership for Decentralisation, Development Cooperation
		Ms. Patricia Bachtiar	Senior Program Manager, Social Protection, Development Cooperation
		Ms. Lulu Wardhani	Senior Program Manager, Rural Development, Development Cooperation
		Ms. Fenni Rum	Program Manager, AIPD Governance, Development Cooperation
		Ms. Vanya Abuthan	Unit Manager, KOMPAK project
	DFATD (Former CIDA)	Mr. Jeffrey Ong	Senior Development Officer, Development Cooperation
		Ms. Jane Palmer	First Secretary (Development)
		Ms. Solveig Schuster	Counsellor (Development)
	GIZ	Mr. Frank Bertelmann	Principal Advisor
		Mr. Danny F Juddin	Advisor
		Ms. Doris Christina Becker	Program Director, TRANSFORMASI
		Mr. Budi Sitepu	Team Leader, Public finance/Financial Governance, TRANSFORMASI
		Ms. Hartian Silawati	Senior Advisor, TRANSFORMASI
	USAID	Mr. Kevin P. McGrath	Deputy Director, Office of Democracy, Rights and Governance
		Mr. Adam Jung	Monitoring and Evaluation Officer
		Ms. Ketty Kadarwati	Project Development Specialist
		Ms. Maureen Laisang	Gender Specialist
	World Bank	Mr. Christobal Ridao-Cano	Lead Economist and Program Leader
	ADB	Mr. Anthony Gill	Senior Country Specialist, Indonesia Resident Mission
	JICA Project	The Capacity Building in Engineering, Science, and Technology (C-BEST)	Mr. Takashi Sakamoto
Regional Infrastructure for Social and Economic Development Project (RISE II)		Mr. Kim Suk Rae	Team Leader
PT. Inacon		Ms. Eni Rusnaini,	Consultant of PISEW
PRIMA-K		Ms. Ida Gosal	Former project staff

Lampiran 3: Daftar Bahan Informasi yang Terkumpul

(1) Dokumen Kebijakan Pemerintah

Document title		Source	Language/Form
Folder	File		
Dana Desa	Rincian Dana Desa per Kabupaten Kota 2015_original budget	House of Representatives	Bahasa • PDF
Gender	National strategy to accelerate gender mainstreaming	BAPPENAS, etc.	ENG • PDF
	Implementation and Analysis of Gender Mainstreaming PNPB PISEW-RISE	Min. of Public Works and Housing	ENG • PDF
KSK	Draft Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten		Bahasa • PDF
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa	Min. of Public Works and Housing	Bahasa • PDF
	Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten	Min. of Public Works and Housing	Bahasa • PDF (PPT)
	UU_No26_2007_PenataanRuang		Bahasa • PDF
Science_Technopark	Strategi Pengembangan Science and Technopark	LIPI	Bahasa • PDF
	Program of BATAN Science Techno Park	BATAN	ENG • PPT
	Teknopolitan Pelalawan (BPPT)	BPPT	Bahasa • PDF
	Development of Bantaeng Technopark	BPPT	Bahasa • PDF
	Masterplan 2015 Bantaeng Technopark (in preparation)	BPPT	Bahasa • PDF
	Quick Wins_Science and Techno Park Marine and Fisheries	KKP	Bahasa • PDF
	Development of Techno Park	KKP	Bahasa • PDF
	The education and training of fisheries Ambon	KKP	Bahasa • PPT
	The training of fisheries Banyuwangi	KKP	Bahasa • PPT
	Role of Ministry of Industry in Development of 100 Technoparks_english	Min. of Industry	ENG • PPT
MP3EI	MP3EI 2011-2025	Coordinating Min. for Economic Affairs	ENG • PDF
	Minutes of meeting_Launching of MP3EI by the President of Indonesia		ENG • Word
	MP3KI-PNPM Perkotaan	BAPPENAS	Bahasa • PDF (PPT)
Min. of Finance	HKPD Policy_Min of Finance	Min. of Finance	Bahasa • PDF
	Regional Transfer Policy	Min. of Finance	ENG • Word
Ministry of Industry	Action Plan for Industrial Region Development in Papua, Maluku and Sulawesi	Min. of Industry DG of Industrial Region Development	ENG • PDF(PPT)
	Industrial Region Development Policy in Indonesia	Min. of Industry DG of Industrial Region Development	ENG • PDF(PPT)
	Pembangunan dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (SME Area III)	Min. of Industry	Bahasa • PDF (PPT)
	Policy, Revitalization, Growth and Program of Small Medium Industry (SMI Policy)	Min. of Industry DG of SMI	ENG • PDF(PPT)
Ministry of Village	Organization chart of Min. of Village 2015	Min. of Village	Bahasa • Word
	SOTK BAB I (English_Function of Min.of Village)	Min. of Village	Bahasa • Word
MMAF (KKP)	Coastal Resilience Project	KKP	ENG • PPT
	DRAFT MASTERPLAN PK2PT	KKP	Bahasa • PPT
	Mangrove Learning and Restoration Center_PRPM	KKP	Bahasa • PDF
	Profile_Training Center Marines and Fisheries	KKP	Bahasa • PDF
Nawa cita	Nawacita (english)_based on Table prepared by Cipta Karya	Min. of Public Works and Housing	ENG • Word
PNPM Mandiri	BUKU_DAFAR_LOKASI_DAN_ALOKASI_BLM_PNPM_MANDIRI_2014	DG of Public Welfare	Bahasa • PDF
	Roadmap of PNPM Mandiri	Coord. Min. of People's Welfare/TNP2K	Bahasa • PDF
RPJMN 2010~2014	RPJMN 2010-2014 Full Text	BAPPENAS	ENG • Word
	RPJMN 2010-2014 Summary	BAPPENAS	ENG • PDF/PPT
RPJMN 2015~2019	Pedoman_RPJMN_2015-2019 (new administration version)	BAPPENAS	Bahasa • PDF
	RPJMN 2015-2019	BAPPENAS	Bahasa • PDF(PPT)
RPJMN 2015~2019 set	BUKU I RPJMN 2015-2019	BAPPENAS	Bahasa • PDF
	BUKU II RPJMN 2015-2019	BAPPENAS	Bahasa • PDF
	BUKU III RPJMN 2015-2019	BAPPENAS	Bahasa • PDF
	MATRIKS BIDANG PEMBANGUNAN	President's Office	Bahasa • PDF
	MATRIKS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA	President's Office	Bahasa • PDF
	Perpres 2 Tahun 2015	President's Office	Bahasa • PDF
	Perpres No.2 Th.2015 tentang RPJM 2015-2019	President's Office	Bahasa • PDF

Document title		Source	Language/Form
Folder	File		
BKPM Sulse	Foreign investment (PMA) Sulse 2014	BKPM Sulse	Bahasa · PDF
Pelindo IV	Explansion plan of Makassar New Port	Pelindo IV	Bahasa · PDF
	The Planned Development of Port_Pelindo IV	Pelindo IV	Bahasa · PDF
SulSel BAPPEDA	RENSTRA BAPPEDA SULSEL 2013-2018	Sulse BAPPEDA	Bahasa · Word
	RPJMD Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018	Sulse BAPPEDA	Bahasa · PDF
SulSel Musrenbang_Presentation Material_30 March 2015	1_Musrenbang_20150330_BAPPENAS	BAPPENAS	Bahasa · PPT
	2_Musrenbang_Sulse_20150330_South Sulawesi	Sulse	Bahasa · PPT
	3_Musrenbang_Sulse_20150330_Min.HA	Min. of Home Affairs	Bahasa · PPT
	4_Musrenbang_Sulse_20150330_PU	Min. of Public Works and Housing	Bahasa · PPT
	5_Musrenbang_Sulse_20150330_Min.Agr	Min. of Agriculture	Bahasa · PPT
South Sulawesi Development Plans	1. South Sulawesi_Mainstay Map of 5 Strategic Areas	Sulse BAPPEDA	Bahasa · PDF
	2. South Sulawesi_Comodities Map of 5 Strategic Areas	Sulse BAPPEDA	Bahasa · PDF
	3. South Sulawesi_Poverty Rate of each Kabupaten on 2014	Sulse BAPPEDA	Bahasa · PDF
	4. South Sulawesi_Brochure of RM AKSESS_B.Ina	Sulse BAPPEDA	Bahasa · PDF
	5. South Sulawesi_Brochure of RM AKSESS_Eng	Sulse BAPPEDA	Bahasa · PDF
	6. South Sulawesi_Infrastructure in KEK Barru	Sulse BAPPEDA	Bahasa · PDF
	7. South Sulawesi_PP of KEK Potentials	Sulse BAPPEDA	Bahasa · PDF
	Ekspose KaBappeda Rakorprov - 12 Februari 2015	Sulse BAPPEDA	Bahasa · PPT
Folder_Renstra	Sulse BAPPEDA	Bahasa · Word	
Sulse Kab. Bantaeng	Community Economy Empowerment Program Report (BUMDes)_Bantaeng 2014	Kab. Bantaeng, Sulse	Bahasa · PDF

(2) Peraturan Perundang-undangan

Document title		Source	Language/Form
Folder	File		
Village Law	Law No. 6 of 2014 on Villages	www.indolaw.org	Bahasa · PDF
	Village Law No. 6 Year 2014 (original)	Min. of Home Affairs	Bahasa · PDF
	PerMenDes_PDT_No 1_Tahun 2015 (from LSPFPM)	Ministry of Village, Disadvantaged Region Development and Transmigration	Bahasa · PDF
	PerMenDes_PDT_No 2_Tahun 2015 (from LSPFPM)	Ministry of Village, Disadvantaged Region Development and Transmigration	Bahasa · PDF
	PerMenDes_PDT_No 3_Tahun 2015 (from LSPFPM)	Ministry of Village, Disadvantaged Region Development and Transmigration	Bahasa · PDF
	PerMenDes_PDT_No 4_Tahun 2015 (from website)	Ministry of Village, Disadvantaged Region Development and Transmigration	Bahasa · PDF
	PerMenDes_PDT_No 5_Tahun 2015 (from website)	Ministry of Village, Disadvantaged Region Development and Transmigration	Bahasa · PDF
Other Laws and Regulations	Law No. 17 of 2014 on People's Consultative Assembly, Legislative Council, House of Representatives, and Regional House of Representatives	www.indolaw.org	Bahasa · PDF
	Law No. 22 of 2014 on Election of Governors, Regents, and Mayors	www.indolaw.org	Bahasa · PDF
	Law No. 23 of 2014 on Local Government	www.indolaw.org	Bahasa · PDF
	Law No. 32 of 2004 on Regional administration (Eng)	AKBAR & AKBAR Law Office	ENG · PDF
	Law No. 33 of 2004 on Fiscal Balance between the Central Government (Eng)	AKBAR & AKBAR Law Office	ENG · PDF
	Law No. 81 of 2012 on Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ttg Fasilitator	Min. of Manpower and Transmigration	Bahasa · PDF
	Govt reg. No. 38 of 2007 on allocation of govt matters	President's Office	ENG · Word
Perda Kab_Bantaeng_10_2006_ttg BUMDes	Sulse Bantaeng Regency	Bahasa · PDF	

(3) Dokumen dari Organisasi-Internasional/ Negara-Donor

Document title		Source	Language/Form	
Folder	File			
ADB	Completion report_Rural Infrastructure Support to the PNPM Mandiri Project II	ADB	ENG • PDF	
	Country Partnership Strategy 2012-2014	ADB	ENG • PDF	
	Fact sheet 2014_Apr	ADB	ENG • PDF	
	Loan agreement_Rural infrastructure support to the PNPM Mandiri project II	ADB	ENG • PDF	
	Loan agreement_Second local government finance & governance reform program cluster-subprogram I	ADB	ENG • PDF	
	Report & recommendation of the president to the board of directors_Second local government finance & governance reform program	ADB	ENG • PDF	
	Technical assistance report_Local government finance & governance reform	ADB	ENG • PDF	
	Technical assistance report _Preparing the second community & local government support sector project	ADB	ENG • PDF	
	Technical assistance report _Support for local government finance & governance reform 2	ADB	ENG • PDF	
Technical assistance report _Sustainable infrastructure assistance program	ADB	ENG • PDF		
DFAT (AusAID)	Analisisi Penerimaan & Pengeluaran _Kab Raja Ampat 2013	AIPD	Bahasa • PDF	
	Gender strategy 2011	AusAID (Australia Indonesia Partnership for Decentralisation)	ENG • PDF	
	Indonesia country strategy 2013_Jul	DFAT	ENG • PDF	
	Program design document part A_Empowering Indonesian women for poverty reduction 2012	AusAID	ENG • PDF	
	Program design document part B_Empowering Indonesian women for poverty reduction 2012	AusAID	ENG • PDF	
	Strategy for Support to Indonesia's PNPM	AusAID	ENG • PDF	
	Summary design document_Promoting rural income through support for markets in agriculture 2013	DFAT	ENG • PDF	
GIZ	RED-Prog	Fact sheet _ CJ (Central Java), various sheets	GIZ	Eng/Bahasa • PDF
		Fact sheet _ NTB (Lombok), various sheets	GIZ	Eng/Bahasa • PDF
		Fact sheet _ WK (West Kalimantan), various sheets	GIZ	Eng/Bahasa • PDF
	GIZ ACCH (Anti Corruption Clearing House)	GIZ	ENG • PDF	
	GIZ Decentralisation as Contribution to Good Governance Programme	GIZ	ENG • PDF	
	GIZ Supports on Fiscal Decentralization (2011-2013)	GIZ	ENG • PDF	
	GIZ Geographical Location of Projects (map)	GIZ	ENG • PDF	
USAID	Annual report Year 3_Kinerja Program	USAID	ENG • PDF	
	Fact sheet 2013_Kinerja Program	USAID	ENG • Word	
	USAID Strategy for Indonesia 2014-2018	USAID	ENG • PDF	
	USAID Gender	Fact sheet_Child marriage vision	USAID	ENG • PDF
		Fact sheet_US national action plan on women, peace & security	USAID	ENG • PDF
		US Strategy to prevent&respond to gender-based violence globally	USAID	ENG • PDF
		USAID Policy_Gender equality & female empowerment	USAID	ENG • PDF
USAID Vision for action_Ending child marriage	USAID	ENG • PDF		
World Bank	Country partnership strategy 2013-2015	World Bank	ENG • PDF	
	Evaluation_PNPM-Generasi 2011	World Bank	ENG • PDF	
	Fact sheet PNPM-Mandiri 2012	World Bank	ENG • PDF	
	Improving the delivery of local services and infrastructure in a decentralized Indonesia	World Bank	ENG • PDF	
	Project appraisal document_proposed loan_PNPM2012-2015	World Bank	ENG • PDF	
	Project paper_additional loan_local government&decentralization	World Bank	ENG • PDF	
PSF (PNPM Support Facility)	2014 PSF Progress Report	PSF	ENG • PDF	

(4) Dokumen JICA

Document title		Source	Language/Form
Folder	File		
3_PRIMA-K	PrimaK2(English)Results of Evaluation 20140315	JICA	English · Word
	PRIMA-K2 signed-MM	JICA	English · PDF
	PRIMA_Newsletter_No.01	JICA	English · PDF
4_Local Resources Industry Dev. in Sulsel	Joint Terminal Evaluation Report	JICA	English · PDF
5_RISE	RISE1_Exit Strategy Book (folder)	BAPPENAS	English
	RISE1_SAPI (folder)	JICA	English
	Structure of training activities of RISE	RISE II	English · Word
6_CDP	Finar Report CDP 2012	Ashar Karateng (COMMIT)	English · PDF

(5) Dokumen lainnya

Document title		Source	Language/Form
Folder	File		
LSP FPM	LSP FPM_Community Facilitator Certification	LSP FPM	Bahasa · PDF
	LSP FPM_Indonesian National Work Competency Standard (SKKNI)	LSP FPM	Bahasa · PDF
Regional Transfer Policy		Min. of Finance	ENG · Word